

CHEKLIST

NO. 1.a

**UNIT KERJA TELAH
MEMBENTUK TIM
PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS**



PENGADILAN NEGERI FAKFAK KELAS II

Jalan Yos Sudarso No.92 Wagom

Tlp : (0956) 22413 FAX : (0956) 22413

Website : www.pn-fakfak.go.id

Email : pengadilan_negeri_fakfak@yahoo..co.id

Ami-

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK KELAS II
W30-U6/41/KPN/SK/I/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PENGADILAN NEGERI
FAKFAK KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK KELAS II

- Menimbang :
- a. Sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pengadilan Negeri Fakfak kelas II, diperlukan dukungan dari segenap jajaran Pengadilan Negeri Fakfak kelas II untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. Bahwa untuk pelaksanaan tersebut perlu dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II;
 - c. Bahwa pemilihan koordinator dan anggota tim berdasarkan pada kompetensi ketugasan (Hakim Pengawas Bidang) dan jabatan yang berkaitan;
 - d. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II;
 - e. Bahwa telah terjadi Promosi dan Mutasi di Pengadilan Negeri Fakfak sehingga Susunan Tim Pembangunan Zona Integritas berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II Nomor : W30-U6/71/KPN/SK/II/2021 Tanggal, 24 Februari 2021 telah mengalami perubahan untuk itu perlu diterbitkan SK yang baru.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 7. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Percepatan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK KELAS II TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PENGADILAN NEGERI FAKFAK KELAS II.**
- Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor :W30-U6/71/KPN/SK/II/2021 Tanggal, 24 Februari 2021
- Kedua : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir.
- Ketiga : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas adalah :
- a. Menyusun rencana kerja Pembangunan Zona Integritas, dengan memprioritaskan pada target tujuan Pembangunan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. Memberikan dukungan pada masing-masing unit pelayanan untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II;
 - c. Membangun koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II;
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Fakfak.
- Keempat : Keputusan Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat ini.

Ditetapkan di : Fakfak

Tanggal : 13 Januari 2021



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK
 NOMOR : W30.U6/41/KPN/SK/ I/2022
 TANGGAL : 13 Januari 2022
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA
 INTEGRITAS PENGADILAN NEGERI FAKFAK

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PENGADILAN
 NEGERI FAKFAK KELAS II**

Pembina	KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK KELAS II
Ketua	WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK KELAS II
Koordinator Teknikal	PANITERA PENGADILAN NEGERI FAKFAK KELAS II
Koordinator Operasional	SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI FAKFAK KELAS II

AREA I MANAJEMEN PERUBAHAN	
Koordinator	IRANDA CARECA ANINDITYO,SH (Hakim)
Sekretaris	JOHANIS SIAHAYA, SH (Panmud Pidana)
Anggota	1. IRIANTO TANGGAHMA,SH (Staf Pidana) 2. YENI ANGGRAINI, S. Sos (Staf Perdata) 3. ROBERTHO TAWIRASARU, SH (Staf Pidana)

AREA II PENATAAN TATALAKSANA	
Koordinator	YURICE J.C.REMBET, S.T (Sekretaris)
Sekretaris	RANDY M SOHILAIT (Jurusita)
Anggota	1. ASRI WALI (Staf Umum & Keuangan) 2. AGUNG IRVAN BILI, S.Kom (Staf Perencanaan)

AREA III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA	
Koordinator	REYNOLD S.E.M.P. NABABAN, SH (Hakim)
Sekretaris	LA IDU (Kasubag Kep. Ortala)
Anggota	1. ISMET WAIROY, SH (Jurusita) 2. ENGELBERTHA TUROT,SH (Staf Kepegawaian & Ortala) 3. RATNA KELEY, A.Md.T (Staf Umum dan Keuangan)

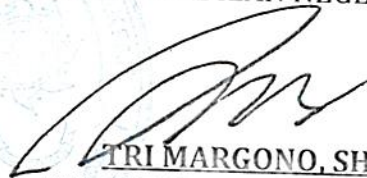
AREA IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS	
Koordinator	IVAN BHAKTI YUDISTIRA, SH (Hakim)
Sekretaris	RIZAL ASBAR, SH (Kasubbag Umum dan Keuangan)
Anggota	1. JOHANIS M. RAHADAT (Staf Keuangan) 2. RIKA MUSTIKA SARI, SH (Staf Keuangan) 3. OKTOVIANA T. WATTO, SH (Staf Hukum)

AREA V. PENGUATAN PENGAWASAN	
Koordinator	SANDAR SITANGGANG, SH (Panitera)
Sekretaris	ADOLFINA DURIAN, S.Kom (Panmud Perdata)
Anggota	1. YULIAN RISKI ANANDA,A.Md.A.B (Staf Perdata) 2. JUNIAR PATIMBANG, A.Md (Staf Kepeg.Ortala)

AREA VI. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	
Koordinator	GANJAR PRIMA ANGGARA, SH (Hakim)
Sekretaris	SALMUNA (Panmud Hukum)
Anggota	1. THOMAS WIRATRAUR, SH (Staf Umum) 2. LA WANDY (Staf Pidana) 3. WINDI YUNITA SARI NAINGGOLAN, SH (Staf Hukum)

Ditetapkan di : Fakfak
 Tanggal : 13 Januari 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK



TRI MARGONO, SH
 NIP. 19760211 200212 1 004



PENGADILAN NEGERI FAKFAK

JALAN. YOS SUDARSO NO. 92. Tlp/Fax (0956) 22413

Website. www.pn-fakfak.go.id

Email : pengadilan_negeri_fakfak@yahoo.co.id

FAKFAK PAPUA BARAT

Fakfak, 12 Januari 2022

UNDANGAN

<u>AGENDA ACARA</u> Rapat Pembentukan TIM Zona Integritas dan Sosialisasi	<u>PIMPINAN MEETING</u> BPK. TRI MARGONO, SH
<u>WAKTU PELAKSANAAN</u> HARI : Kamis TANGGAL : 13 Januari 2022 PUKUL : 15.00 WIT s/d selesai	<u>PETUGAS</u> NOTULIS : RATNA KELEY, A.Md.T DOKUMENTASI : AGUNG IRVAN BILI, S.Kom
	<u>TEMPAT</u> Ruang Rapat Lantai II PNF
<u>PESERTA RAPAT</u> SELURTUH APARATUR PENGADILAN NEGERI FAKFAK	
<u>SIFAT</u> 1. Harus Diikuti Oleh Seluruh Aparatur Pengadilan Negeri Fakfak 2. Hadir Di Ruang Rapat 5 Menit Sebelum Acara Dimulai 3. Memenuhi protocol kesehatan (3M)	
Ketua,	
TTD	
<u>TRI MARGONO, S.H.</u>	

RAPAT PEMBENTUKAN TIM ZONA INTEGRITAS

HARI / TANGGAL RAPAT	Kamis, 13 Januari 2022
LOKASI RAPAT	Ruang Rapat Lantai 2 Pengadilan Negeri Fakfak
MULAI WAKTU RAPAT	15.00 WIT SELESAI 16.00 WIT
POKOK BAHASAN	1 Rapat Pembentukan Tim Zona Integritas dan Sosialisasi 2 3
PEMATERI	1 Bpk. Tri Margono, SH
MODERATOR	1
NOTULEN	1 Ratna Keley, A.Md.T

KETERANGAN LAMPIRAN

DAFTAR HADIR

INTERNAL MEMO

Beri Tanda berikut



Rapat Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas dan Sosialisasi tugas masing masing Area Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

I. Pembukaan

Pada hari Kamis, 13 Januari 2022 bertempat di ruang Rapat Lantai 2 Pengadilan Negeri Fakfak dilaksanakan rapat pembentukan TIM Pembangunan Zona yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Bapak Tri MArgono, SH.



RAPAT PEMBENTUKAN TIM ZONA INTEGRITAS

II. Pembahasan

1. Bahwa sebagai upaya percepatan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pengadilan Negeri Fakfak, diperlukan dukungan dari segenap jajaran Pengadilan Negeri Fakfak untuk mewujudkan Pengadilan Negeri Fakfak sebagai Wilayah Bebas Korupsi dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
2. Bahwa untuk pelaksanaan tersebut perlu dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Fakfak.
3. Bahwa pemilihan koordinator dan anggota tim berdasarkan pada kompetensi ketugasan (Hakim Pengawas Bidang) dan jabatan yang berkaitan.
 - Ketua Pengadilan Negeri Fakfak sebagai Pembina dan sekaligus Ketua TIM
 - Panitera sebagai Koordinator Koordinator Teknikal
 - Sekretaris sebagai koordinator OperasionalDemikian pemilihan TIM Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Fakfak
4. Susunan Anggota TIM Pembangunan Zona Integritas
 - a. Area I Manajem Perubahan
 - Ketua Koordinator : Iranda Careca Anindityo, SH (Hakim)
 - Sekretaris : Johanis Siahaya, SH (Panmud Pidana)
 - Anggota : 1. Iriyanto Tanggahma (Staf Pidana)
2. Yeni Anggraini, S.Sos (Staf Perdata)
3. Robertho Tawirasaru, SH (Staf Pidana)
 - b. Area II Penataan Tatalaksana
 - Ketua Koordinator : Yurice J.C.Rembet, S.T (Kasubbag IT)
 - Sekretaris : Randy M. Sohilait (Juru Sita)
 - Anggota : 1. Asri Wali, S.Hi (Staf Umum Keuangan)
2. Agung Irvan Bili, S.Kom (Staf Perencanaan)
 - c. Area III Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
 - Ketua Koordinator : Reynold S.E.M.P. Nababan, SH (Hakim)
 - Sekretaris : La Idu (Kasub Kepegawaian dan Ortala)
 - Anggota : 1. Ismet Wairoy, SH (Juru Sita)
2. Ratna Keley, A.Md.T (Staf Keuangan)
3. Engelbertha T, SH (Staf Kepegawaian dan Ortala)
 - d. Area IV Penguatan Akuntabilitas
 - Ketua Koordinator : Ivan Bhakti Yudistira, SH (Hakim)
 - Sekretaris : Rizal Asbar (Kasub Umum Keuangan)
 - Anggota : 1. Johanis Rahadat (Staf Umum Keuangan)
2. Rika Mustika Sari (Staf Umum Keuangan)
3. Oktoviana T. W, SH (Staf Kepegawaian dan Ortala)
 - e. Area V Penguatan Pengawas
 - Ketua Koordinator : Sandar Sitanggang, SH (Panitera)
 - Sekretaris : Adolfina Durian, S.Kom (Panmud Perdata)
 - Anggota : 1. Ismail Rumodar, S.Hi (Juru Sita)
2. Yulian Rizqi A., A.Md.A.B (Staf Perdata)
3. Fadlan Ladihu, SH (Staf Hukum)
 - f. Area VI Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 - Ketua Koordinator : Ganjar Prima Anggara, SH (Hakim)
 - Sekretaris : Salmuna (Panmud Hukum)
 - Anggota : 1. Thomas Wiratraur, SH (Staf Umum Keuangan)
2. Sylviana (Staf Hukum)
3. La Wandy (Staf Perdata)

Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas adalah :

RAPAT PEMBENTUKAN TIM ZONA INTEGRITAS

Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas adalah :

- a. Menyusun rencana kerja Pembangunan Zona Integritas, dengan memprioritaskan pada target tujuan Pembangunan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
- b. Memberikan dukungan pada masing-masing unit pelayanan untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pengadilan Negeri Fakfak.
- c. Membangun koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pengadilan Negeri Fakfak.

Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Fakfak.

Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Fakfak.

III. Kesimpulan

1. Rapat dilaksanakan dengan tujuan menyusun Tim kerja yang akan menjadi motor penggerak dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK / WBBM.
2. Peserta Rapat agar menindaklanjuti pembahasan Rapat pada hari dengan penuh tanggung jawab

IV. Penutup

Demikian Rapat hari ini yang telah di pimpin oleh Bapak. Tri Margono, SH

TERIMA KASIH

PENGADILAN NEGERI FAKFAK BISA TERBINA

DIBUAT NOTULEN



Ratna Keley, A.Md.T

DIPERIKSA (TM)



TRI MARGONO, SH



PENGADILAN NEGERI FAKFAK KELAS II

Jalan Yos Sudarso No.92 Wagon

Tlp : (0956) 22413 FAX : (0956) 22413

Website : www.pn-fakfak.go.id















Email : pengadilan_negeri_fakfak@yahoo.co.id



DAFTAR HADIR

Rapat Pembentukan Tim 21 dan Sosialisasi

Hari : Kamis
Tanggal : 13 . JANUARI 2022

No	Nama	Paraf	Ket
1	TRI MARGONO		
2	Dedy Heryanto		
3	Sukarman		
4	Ganjar Prima Anggara		
5	Reynold Nababan		
6	Iranda Caraca Anstyo		
7	IVAN BHAKTI . Y		
8	Adolfino		
9	LA IDU		
10	ψJ.C.R		
11	J M Rahardat		
12	J. Siataya		

13	Rafna. Keloy		
14	Rika M Sari		
15	Agung		
16	Ismet Ismay		
17	Asri Wati		
18	Ismet Purnama		
19	Yeni A		
20	Ekowati T Wati		
21	Thomas - W		
22	Salmawati		
23	Erjanto T		
24	Yulian R		
25	Iryanto Tanggahua		
26	Sander Situngkir		

27	Roberto. T.		
28	Rizal Akbar		
29	--		
30			
31			
32			

Ketua,


TRI MARGONO, SH

CHEKLIST

NO. 1.b

**MEKANISME
PENENTUAN ANGGOTA
TIM PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS**

**MEKANISME PENENTUAN ANGGOTA TIM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS PENGADILAN NEGERI FAKFAK**

1. Sekretaris dengan dibantu Bagian Kepegawaian dan Ortala membuat rencana kegiatan dan mengidentifikasi jumlah dan kualifikasi kebutuhan personil Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Fakfak
 2. Sekretaris mengusulkan data-data pegawai yang ada sesuai kompetensi, pangkat dan golongan.
 3. Ketua memeriksa data-data pegawai yang ada.
 4. Ketua memerintahkan Sekretaris untuk menyelenggarakan rapat pembentukan tim Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Fakfak.
 5. Sekretaris menyiapkan undangan dan ruangan yang akan digunakan untuk rapat pembentukan tim Pembangunan Zona Integritas.
 6. Ketua melaksanakan rapat pembentukan tim Pembangunan Zona Integritas dengan diikuti seluruh Aparatur Pengadilan Negeri Fakfak.
 7. Pelaksanaan rapat pembentukan tersebut berdasarkan kompetensi ketugasan dan jabatan yang terkait dengan dipadukan dengan musyawarah mufakat.
 8. Notulen rapat pembentukan tim mencatat susunan Tim Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Fakfak.
 9. Ketua memerintahkan notulen untuk melaporkan hasil rapat tersebut ke Bagian Kepegawaian dan Ortala agar segera dibuat SK Tentang Tim Pembangunan Zona Integritas
 10. Ketua menetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Fakfak.
-

CHEKLIST

NO. 2.a

**DOKUMEN RENCANA
KERJA PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS**



PENGADILAN NEGERI FAKFAK KELAS II

JLN YOS SUDARSO NO : 92 WAGOM

☎ : (0956) 22413 FAX : (0956) 22413

Website : www.pn-fakfak.go.id

Email : pengadilan_negeri_fakfak@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK KELAS II

Nomor : W30-U6/ 68 /KPN/SK/II/2022

TENTANG

RENCANA KERJA TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS TAHUN 2022 PENGADILAN NEGERI FAKFAK KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK KELAS II

- Menimbang :
- Bahwa sebagai upaya akselerasi reformasi birokrasi pada Pengadilan Negeri Fakfak, utamanya mewujudkan birokrasi yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme maka perlu langkah kongkrit dengan memulai pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri fakfak;
 - Bahwa untuk memberikan arah dalam pembangunan Zona Integritas tersebut, maka perlu disusun program kerja;
 - Bahwa oleh karena itu program kerja yang telah di gagas oleh Tim Pembangunan Zona Integritas perlu dipertegas dan di legalisasi melalui surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak;

- Mengingat :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 - Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 194A/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 59A/Sek/SK/11/2014 Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan di Bawahnya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK TENTANG RENCANA KERJA TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA PENGADILAN NEGERI FAKFAK;
- Kesatu : Mencabut surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor W30-U6/ 71 /KPN/SK/II/2021, Tanggal 24 Februari 2021
- Kedua : Rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Fakfak sebagaimana terlampir.

- Ketiga : Rencana kerja tersebut menjadi program yang akan dilakukan / dilaksanakan oleh Tim Pembangunan Zona Integritas.
- Keempat : Keputusan berlaku sejak ditetapkanm dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Fakfak

Pada tanggal : 03 Februari 2022

KETUAPENGADILAN NEGERI FAKFAK,


TRIMARGONO.SH

NIP. 19760211 200212 1 004

RENCANA KERJA TIM ZONA INTEGRITAS TAHUN 2022
PENGADILAN NEGERI FAKFAK KELAS II

1. KOORDINATOR TIM KERJA AREA 1 MANAJEMEN PERUBAHAN, bertugas :

- a. Membuat **Rencana Aksi/Rencana Kerja** ZI menuju WBK/WBBM (kapan dimulai, berapa lama, target yang akan dicapai).
Dalam Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung:
 - Undangan, absensi serta foto.
 - Dokumen rencana aksi.
 - Dokumen Laporan kegiatan penyusunan rencana aksi ZI.
- b. Membuat **target-target prioritas** yang relevan dengan tujuan pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM. Target prioritas adalah hasil yang ingin dicapai dalam tiap-tiap kegiatan, Program dan Inovasi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat proses perubahan serta membawa dampak menuju kearah yang lebih baik, dengan cara:
 - Tentukan target prioritas yang dirasa mudah diraih atau dicapai di tiap komponen perubahan.
 - Penentuan target-target prioritas harus melibatkan seluruh Tim Kerja.
 - Melaksanakan Analisa dan Evaluasi pada masing-masing Rencana Aksi/Rencana Kerja yang terlaksana maupun tidak.
- c. Proses Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM harus disosialisasikan kepada seluruh personil maupun masyarakat agar tujuan utama meraih WBK/WBBM dapat tercapai, melalui kegiatan:
 - ❖ **Sosialisasi kepada pegawai melalui:**
 - Pengarahan saat apel pagi, rapat staf secara periodik.
 - Pendampingan/pembinaan oleh pusat dan wilayah terkait program kegiatan dan inovasi pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.
 - Pemasangan spanduk dan banner di lingkungan kerja.
 - ❖ **Sosialisasi kepada masyarakat melalui:**
 - Website.
 - Media sosial.
 - Media elektronik/ cetak.
 - Pemasangan spanduk dan banner.
 - ❖ **Membuat laporan sosialisasi**
Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung:
 - Capture website, Media sosial, dan kliping.
 - Dokumen laporan sosialisasi.
- d. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM.
Dalam pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM perlu dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara terus menerus pada tiap-tiap komponen untuk memastikan :
Apakah kegiatan Pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana?
 - Pelaksanaan kegiatan harus melibatkan seluruh anggota Tim.
 - Membuat laporan hasil pelaksanaan masing-masing rencana aksi/rencana kerja yang telah dilaksanakan.
 - Membuat dokumentasi berupa foto-foto kegiatan.
Dalam kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung:
 - Dokumen laporan pelaksanaan rencana aksi oleh Tim Kerja WBK/WBBM.
 - Dokumentasi (foto kegiatan).

e. Apakah monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas sudah dilakukan secara berkala?

- Melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi secara bulanan.
- Membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi bulanan Kegiatan tersebut yang dilengkapi dengan data dukung:
 - Undangan, notula, daftar hadir, foto rapat.
 - Dokumen laporan berkala hasil monitoring dan evaluasi secara bulanan.

f. Apakah temuan monitoring dan evaluasi sudah ditindaklanjuti?

Menyusun laporan tindak lanjut atas laporan monitoring dan evaluasi yang dipimpin oleh ketua tim ZI.

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung : Dokumen hasil monitoring dan evaluasi serta rekomendasi yang telah ditindaklanjuti.

g. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja

Perubahan pola pikir dan budaya kerja adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka merubah pola pikir anggota ke arah yang lebih baik melalui upaya :

- Pemilihan *Role Model* diantara Pimpinan (Ketua Satuan Kerja, Hakim-hakim serta pejabat struktural dibawahnya) dalam pelaksanaan Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM. Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung :
- Dokumentasi tentang proses pemilihan *role model* (undangan, daftar hadir, sk penunjukan role model dan sk kriteria role model), dokumentasi kegiatan sinergitas, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat, *press release* yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja/ pejabat struktural.
 - a) Absensi Pimpinan Satuan Kerja dan pejabat struktural.
 - b) Foto/dokumentasi pimpinan Satuan Kerja/pejabat struktural sebagai pembina upacara.
- Pemilihan Agen Perubahan di antara para staff harus sudah ditetapkan dengan mengacu pada Permenpan RB Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Intansi Pemerintahan, dengan tahapan :
 1. Membuat sk kriteria pemilihan agen perubahan sesuai Permenpan tersebut.
 2. Membuat undangan penetapan agen perubahan.
 3. Melaksanakan rapat penetapan agen perubahan.
 4. Pengesahan agen perubahan.

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung:

- Berita acara pemilihan.
- Dokumen laporan pelaksanaan penetapan agen perubahan.
- Sk penetapan agen perubahan terpilih.

h. Apakah budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi sudah berjalan dengan baik?

- Menerapkan budaya kerja sebagaimana tertuang dalam kode etik dan perilaku.
 - Berikan *reward and punishment*.
 - Membuat laporan kegiatan pembangunan budaya kerja dan pola pikir.
- Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung :

- Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan penerapan budaya kerja berikut dokumentasinya.
- Rekap absensi pegawai.
- Dokumentasi program *reward and punishment*.

Setiap anggota organisasi harus terlibat dalam pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM, melalui upaya :

- Penandatanganan pakta integritas oleh seluruh pegawai.
- Apel pagi dan apel sore.
- Rapat berjenjang.
- Membuat laporan Hasil Kegiatan.

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung:

- Dokumen pakta integritas.
- Dokumen Laporan hasil kegiatan pembangunan ZI yang melibatkan keterwakilan masing-masing bagian.
- Dokumentasi kegiatan ZI.

2. KOORDINATOR TIM KERJA AREA 2 PENATAAN TATALAKSANA, bertugas :

- a. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
- b. Target yang ingin dicapai pada masing-masing program ini adalah:
 - Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pada satuan kerja.
 - Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pada satuan kerja.
 - Meningkatnya kinerja pada satuan kerja.

Beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan penataan tatalaksana, yaitu :

- **Standar Operasional Prosedur (SOP)**
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada peta bisnis proses instansi dan kondisi yang seharusnya telah dilakukan seperti : a)
Penyusunan Standar Operasional Prosedur
- Penerapan Standar Operasional Prosedur
- Evaluasi/Perbaikan Standar Operasional Prosedur.

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung:

- Dokumen peta bisnis instansi.
- Dokumen SOP yang ditandatangani.
- Dokumen SOP Inovasi yang ditandatangani Ketua Satuan Kerja.

c. E-Office/E-Government

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada yang telah dilakukan, seperti :

- Penyusunan sistem pengukuran kinerja berbasis sistem informasi (contoh LLK Elektronik).
- Penyusunan sistem kepegawaian berbasis sistem informasi (Contoh SIKEP).
- Penyusunan sistem pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi.

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung:

- Dokumen kinerja satker yang diambil melalui aplikasi SIKEP.
- Dokumen manajemen SDM yang diambil melalui aplikasi SIKEP.
- *Capture website*, aplikasi layanan serta media sosial.
- Undangan, notulan, daftar hadir, foto rapat.

d. Keterbukaan Informasi Publik

Pengukuran Indikator ini dilakukan dengan mengacu pada :

- Penerapan kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan.
- Memiliki website dengan informasi terkini yang memudahkan masyarakat pencari keadilan.
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung:

- *Capture* anggaran DIPA melalui website.
- Foto spanduk/baner, website dan media sosial lainnya.
- Undangan rapat, notulensi, daftar hadir.
- Dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi

3. KOORDINATOR TIM KERJA AREA 3 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SDM, / bertugas :

- a. Meningkatkan profesionalisme SDM Pengadilan Negeri Pagar Alampada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah :

- Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu :

- Satuan kerja telah melakukan rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya dalam hal rasio dengan beban kerja dan kualifikasi pendidikan serta mengacu pada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja;
- Menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya;
- Pola Mutasi Internal dan Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi :
 - 1) Penyusunan kebijakan pola mutasi internal.
 - 2) Penerapan kebijakan pola mutasi internal.
 - 3) Monitoring dan evaluasi atas kebijakan pola mutasi internal
- Pengembangan pegawai berbasis kompetensi Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada : hak bagi pegawai di unit kerja terkait untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya;
- Melakukan upaya pengembangan kompetensi (*capacity building/transfer knowledge*).

- Penetapan Kinerja Individu

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada :

- 1) Telah memiliki penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi;
 - 2) Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya;
 - 3) Telah melakukan pengukuran kinerja individu secara periodic;
 - 4) Hasil penilaian kinerja individu telah diimplementasikan mulai dari penerapan sampai dengan pemantauan.
- Penegakan aturan disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku. Indikator dilakukan dengan mengacu pada pelaksanaan aturan disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku:
 - Penegakan aturan disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku pegawai melalui penerapan aturan disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku pegawai (data dukung antara lain absensi, ijin keluar kantor, ijin keluar negeri dan pengawasan melekat).
 - Sistem Informasi Kepegawaian melalui Pemutakhiran informasi kepegawaian dilakukan secara terbuka.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti pelaksanaan tertib absensi kerja dan pemotongan tunjangan kinerja.

- Sistem Informasi Kepegawaian pada unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala dengan indikator sebagai berikut :
 - Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM Aparatur pada masing – masing satker.
 - Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing – masing satker;
 - Meningkatnya disiplin SDM Aparatur pada masing – masing satker
 - Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada satker
 - Meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur pada satker.

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung:

- Undangan, notula, daftar hadir dan foto rapat
- Dokumen kebutuhan pegawai berdasarkan pemetaan jabatan dan analisis beban kerja
- Surat usulan kebutuhan pegawai.
- Dokumen monitoring dan evaluasi kinerja pegawai baru terhadap kinerja bagian

- SK mutasi/rotasi internal.
- DRP (Daftar Riwayat Pekerjaan) /DRH (Daftar Riwayat Hidup).
- dokumen monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja.
- dokumen rencana pengembangan kompetensi pegawai berdasarkan penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai).
- surat kepada pegawai perihal kesempatan mengikuti Diklat/pengembangan kompetensi lainnya.
- Surat usulan pegawai yang akan mengikuti Diklat/pengembangan kompetensi lainnya.
- Daftar pegawai yang telah pegawai mengikuti Diklat/ pengembangan kompetensi lainnya.
- Dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam rangka perbaikan kinerja.
- Dokumen SKP yang disetujui dan ditandatangani oleh atasan langsungnya.
- Dokumen Kinerja Unit yang disetujui dan ditandatangani oleh atasan.
- Dokumen SKP berjenjang (JFU, atasan langsung/kasubsi, atasan langsung/kasi, kepala Satuan Kerja).
- Dokumen pengukuran kinerja individu per bulan.

4. KOORDINATOR TIM KERJA AREA 4 PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA, bertugas :

a. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pada satuan kerja.

Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah :

- Meningkatnya kinerja instansi pemerintah; dan
- Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah.

Untuk mengukur pencapaian program ini digunakan indikator :

1) Keterlibatan Pimpinan

Dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan dokumen perencanaan strategis satuan kerja dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki, strategi pencapaian serta ukuran keberhasilan **harus** melibatkan pimpinan satker.

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung:

- Undangan, notula, daftar hadir, foto rapat.
- Dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran.
- Dokumen Perjanjian Kinerja.

2) Pengelolaan akuntabilitas kinerja

Pengelolaan akuntabilitas kinerja terdiri dari pengelolaan data kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja, dengan pencapaian program yang diharapkan sebagai berikut :

- a. Satuan kerja telah memiliki dokumen perencanaan.
- b. Dokumen Perencanaan telah berorientasi hasil.
- c. Indikator kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja telah memiliki kriteria Spesifik.
- d. Satuan kerja telah menyusun Laporan tentang kinerja.
- e. Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja.
- f. Satuan kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas Kinerja.
- g. Satuan kerja memiliki dokumen perencanaan kerja jangka pendek (Renja) Tahunan, Rencana Strategis (Renstra) serta Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja).
- h. Membuat turunan Renja yang mendukung peningkatan pelayanan publik (penetapan standar pelayanan, budaya pelayanan prima, survei kepuasan masyarakat).

- i. Membuat turunan Renja yang mendukung kegiatan anti korupsi (sk pengendalian gratifikasi, penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP), dan penanganan pengaduan masyarakat).

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung :

- Undangan, notula, daftar hadir, foto rapat.
- Dokumen pemantauan pencapaian kinerja secara bulanan dipimpin oleh kepala satuan kerja.
- Dokumen perencanaan kerja jangka pendek (Renja) Tahunan, Rencana Strategis (Renstra) serta Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja).
- Dokumen turunan Renja yang mendukung peningkatan pelayanan publik (penetapan standar pelayanan, budaya pelayanan prima, survei kepuasan masyarakat) serta mendukung kegiatan anti korupsi (pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, dan penanganan pengaduan masyarakat).
- Dokumen IKU dan IKU tambahan yang mendukung peningkatan pelayanan publik.

5. KOORDINATOR TIM KERJA AREA 5 PENGUATAN PENGAWASAN, Bertugas :

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan satuan kerja yang bersih dan bebas KKN.

Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- 1) Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara.
- 2) Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara.
- 3) Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang.

Beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan penguatan pengawasan, yaitu :

-1- Pengendalian gratifikasi.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi :

- 1.1. Satuan kerja telah memiliki *Public Campaign* tentang pengendalian gratifikasi.
- 1.2. Satuan kerja telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi.
- 1.3. Kedisiplinan pelaporan LHKPN.

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung:

- *Capture banner/spanduk/media public campaign* lainnya.
- SK Unit Pengendali Gratifikasi.
- *Capture* kamera pengawas (CCTV) dan tampilannya.
- Bukti pengiriman LHKPN.

-2- Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada :

- 2.1. Satuan kerja telah membangun lingkungan pengendalian.
- 2.2. Satuan kerja telah melakukan penilaian resiko atas unit kerja.
- 2.3. Satuan kerja telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi.
- 2.4. Satuan kerja telah melakukan sosialisasi, mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPIP kepada seluruh pihak terkait.

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung:

- Dokumen matrik identifikasi resiko.
- Dokumen analisis resiko.
- Dokumen level resiko.
- Dokumen laporan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi.

-3- Pengaduan masyarakat.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada :

- 3.1. Satuan kerja telah mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat baik melalui media cetak dan elektronik (website)
- 3.2. Satuan kerja telah melaksanakan tindak lanjut atas hasil penanganan pengaduan masyarakat.
- 3.3. Satuan kerja telah melakukan monitoring dan evaluasi atas hasil penanganan pengaduan masyarakat.
- 3.4. Satuan kerja telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung:

- SK petugas Pengaduan Masyarakat.
- Foto petugas/ruang/loket/kotak khusus pengaduan.
- Foto spanduk/banner informasi sarana penyampaian pengaduan.
- Capture sarana pengaduan melalui Media online.
- *Capture* respon pengaduan masyarakat.
- Bukti penyampaian pengaduan masyarakat kepada bagian terkait.
- Laporan monitoring dan evaluasi laporan pengaduan setiap bulan.
- Bukti penyampaian pengaduan masyarakat kepada bagian terkait untuk ditindaklanjuti.
- Dokumen laporan tindak lanjut (tindakan perbaikan pelayanan) atas Laporan monitoring dan evaluasi laporan pengaduan.

-4- *Whistle Blowing System* (WBS)

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada :

- 4.1. Satuan kerja telah menerapkan *Whistle Blowing System*.
- 4.2. Satuan kerja telah melakukan evaluasi atas penerapan *Whistle Blowing System*.
- 4.3. Satuan kerja menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan *Whistle Blowing System*.

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung :

- Dokumen dan foto internalisasi *Whistle Blowing System* (WBS). - Dokumen Laporan hasil evaluasi atas penerapan *Whistle Blowing System*.
- dokumen Laporan tindak lanjut hasil evaluasi atas penerapan *Whistle Blowing System*.

-5- Penanganan Benturan Kepentingan sesuai Permenpan RB Nomor 37 Tahun 2012 tentang Benturan Kepentingan dan SK Sekma Nomor 59A Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Penetigan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya..

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada :

- 5.1. Satuan kerja telah mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas dan fungsi utama.
- 5.2. Satuan kerja telah melakukan sosialisasikan penanganan benturan kepentingan.
- 5.3. Satuan kerja telah mengimplementasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan.
- 5.4. Satuan kerja telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan penanganan benturan kepentingan.
- 5.5. Satuan kerja telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas pelaksanaan penanganan benturan kepentingan.

Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung:

- Dokumen identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama.
- Dokumen surat pernyataan bebas dari benturan kepentingan.
- Dokumen laporan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan.
- dokumen laporan tindak lanjut atas penanganan Benturan Kepentingan.

6. KOORDINATOR TIM KERJA AREA 6 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK, Bertugas :

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Target yang ingin dicapai melalui program peningkatan kualitas pelayanan publik ini adalah :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau).
2. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional.
3. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan peningkatan kualitas pelayanan publik, yaitu :

-1- Standar Pelayanan Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :

- 1.1. Satuan kerja telah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- 1.2. Satuan kerja telah memaklumkan Standar Pelayanan.
- 1.3. Satuan kerja telah memiliki SOP bagi pelaksanaan Standar Pelayanan.
- 1.4. Satuan kerja telah melakukan revidi dan perbaikan atas Standar Pelayanan dan SOP.
- 1.5. Melakukan sosialisasi/pelatihan Pelayanan Prima kepada pegawai.
- 1.6. Menyediakan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat dalam memperoleh informasi layanan dan kegiatan melalui media cetak, papan pengumuman, media sosial, website, dan lain-lain.
- 1.7. Telah terdapat sistem *punishment* (sanksi)/*reward* (penghargaan) bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan yang diberikan tidak sesuai standar.
- 1.8. Menyediakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- 1.9. Terdapat Inovasi layanan.
- 1.10. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan.

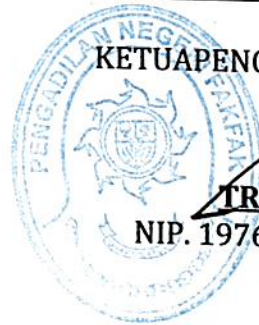
Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung:

- Dokumen Standar pelayanan pada satuan kerja.
- *Capture* maklumat standar pelayanan ditempat pelayanan.
- Dokumen SOP pelaksanaan standar pelayanan.
- Dokumen revidi dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP.
- Dokumen sosialisasi/pelatihan Pelayanan Prima kepada pegawai.
- *Capture* sarana informasi layanan.
- Sistem *reward* dan *punishment*.
- Dokumen penghargaan pegawai teladan sebagai *reward*, dokumen hukuman disiplin sebagai *punishment* serta kompensasi kepada penerima layanan.

- *Capture* aplikasi, sarana dan prasarana Pelayanan terpadu (PTSP).
- *Capture* inovasi pada pelayanan
- Dokumen laporan survei;
- *Capture* dan foto/Dokumentasi
- Dokumen laporan perbaikan pelayanan sebagai tindak lanjut dari survei kepuasan masyarakat

Ditetapkan di : Fakfak

Pada tanggal : 03 Februari 2022



KETUAPENGADILAN NEGERI FAKFAK,

TRI MARGONO.SH

NIP. 19760211 200212 1 004

**DOKUMEN RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
PENGADILAN NEGERI FAKFAK
TAHUN 2022**



**Oleh:
TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS
PENGADILAN NEGERI FAKFAK**

**PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI
(WBK)/WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (BBM)
PENGADILAN NEGERI FAKFAK TAHUN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1.Latar Belakang

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, makainstansi pemerintah perlu untuk membangun pilot project Pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu perlu secara kongkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas. Dalam rangka pembangun Zona Integritas, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah : (1) Menyelaraskan instrument Zona Integritas dengan instrumen evaluasi Reformasi Birokrasi, serta (2) Penyederhanaan pada indikator proses dan indikator hasil yang lebih fokus dan akurat. Untuk itu perlu disusun pedoman pembangunan zona integritas pada Pengadilan Negeri Fakfak dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014.

1.2.Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
- d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- f. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
- h. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- i. Peraturan Presiden 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
- j. Peraturan Presiden 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Inpres 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- k. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- l. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah
- m. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.194A/KMA/SK/XI/2014 tanggal 25 November 2014.

1.3.Maksud dan Tujuan

- Dokumen rencana kerja ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pengadilan Negeri Fakfak dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM); dan
- Tujuan penyusunan dokumen rencana kerja ini adalah memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Pengadilan Negeri Fakfak

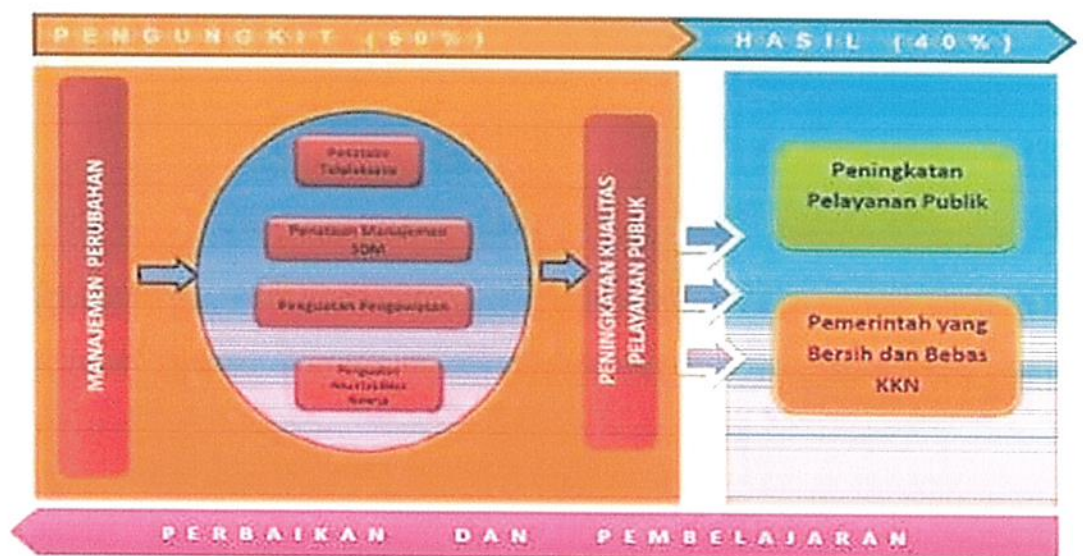
1.4.Pengertian Umum

Dalam dokumen rencana kerja ini,yang dimaksud dengan :

1. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinannya dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan,penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
4. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah; Unit Kerja adalah Unit/satuan Kerja di instansi Pemerintah, serendah- rendahnya eselon III yang menyelenggarakan fungsi pelayanan.

5. Menteri adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
6. Tim Penilai Internal (TPI) adalah tim yang dibentuk oleh pimpinan instansi pemerintah yang mempunyai tugas melakukan penilaian unit kerja dalam rangka memperoleh predikat Menuju WBK/Menuju WBBM.
7. Unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM ditetapkan, maka hal yang selanjutnya dilakukan adalah menentukan komponen-komponen yang harus dibangun.

Terdapat dua jenis komponen yang harus dibangun dalam unit kerja terpilih, yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Di bawah ini adalah gambar yang menunjukkan hubungan masing-masing komponen dan indikator pembangun komponen.



Melalui model tersebut dapat diuraikan bahwa program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik merupakan komponen pengungkit yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

BAB II

PROGRAM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

2.1. Pencanaan Pembangunan Zona Integritas

- a. Pencanaan Pembangunan Zona Integritas adalah dengan deklarasi / pernyataan dari pimpinan suatu instansi pemerintah bahwa instansinya telah siap membangun Zona Integritas.
- b. Pencanaan Pembangunan Zona Integritas dilakukan oleh pimpinan dan seluruh atau sebagian besar pegawainya telah menandatangani Dokumen Pakta Integritas. Pendatangan dokumen Pakta Integritas dapat dilakukan secara masal/serentak pada saat pelantikan, baik sebagai CPNS, PNS, maupun pelantikan dalam rangka mutasi kepegawaian horizontal dan vertikal. Bagi instansi pemerintah yang belum seluruh pegawainya menandatangani Dokumen Pakta Integritas, dapat melanjutkan / melengkapi setelah perencanaan pembangunan Zona Integritas;
- c. Pencanaan pembangunan Zona Integritas telah dilaksanakan secara terbuka dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya dibidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;

2.2. Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Program Pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut perencanaan yang telah dilakukan oleh pimpinan. Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit.

BAB III

RENCANA AKSI/RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

3.1. RENCANA KERJA

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) mempunyai beberapa Komponen antara lain :

1. Manajemen Perubahan

Komponen Manajemen Perubahan memiliki Indikator sebagai berikut :

1) Penyusunan Tim Kerja

Penyusunan Tim Kerja ini dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pembentukan Tim untuk melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
- b. Pembentukan Tim ini dilakukan melalui prosedur atau mekanisme yang jelas
- c. Ketua Pengadilan Negeri Fakfak bertanggung jawab atas pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

2) Dokumen Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Penyusunan Dokumen Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Dokumen Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) telah memuat target-target prioritas yang relevan sesuai dengan tujuan.
- b. Mekanisme atau media untuk mensosialisasikan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) telah disediakan.

3) Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) ini dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Seluruh kegiatan pemantauan dan evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) telah dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan.
 - b. Hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) telah ditindak lanjuti
- 4) Perubahan pola pikir dan budaya kerja
- Perubahan pola pikir dan budaya kerja ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Pimpinan menjadi role model dalam Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
 - b. Pemilihan agen perubahan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah.
 - c. Pembangunan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Fakfak
 - d. Keterlibatan Hakim, dan seluruh Aparatur Sipil Negara Pengadilan Negeri Fakfak dalam Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

2. Penataan Tata Laksana

Komponen Penataan Tata Laksana memiliki Indikator sebagai berikut :

1) Standar Operasioanal Prosedure (SOP)

Penyusunan Standar Operasional Prosedure (SOP) memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Penyusunan Standar Operasional Prosedure (SOP) telah mengacu pada Proses Peta Bisnis Pengadilan Negeri Fakfak
- b. Penerapan Standar Operasional Prosedure (SOP)
- c. Reviu/Perbaikan Standar Operasional Prosedure (SOP)

2) E-Office/E-Govenment

Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Penyusunan Sistem Pengukuran Kinerja Berbasis Sistem Informasi
- b. Penyusunan Sistem Kepegawaian Berbasis Sistem Informasi
- c. Penyusunan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Sistem Informasi

3) Keterbukaan Informasi Publik

Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Penerapan kebijakan Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- b. Monitoring dan Evaluasi Penerapan kebijakan Tentang Keterbukaan Informasi Publik

3. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)

Komponen Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki Indikator sebagai berikut :

- 1) Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi. Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menerapkan rencana kebutuhan pegawai pada Pengadilan Negeri Fakfak yang mengacu pada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja
 - b. Monitoring dan Evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai pada Pengadilan Negeri Fakfak
- 2) Pola Mutasi Internal
Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Menyusun kebijakan pola mutasi internal
 - b. Menerapkan kebijakan pola mutasi internal
 - c. Monitoring dan Evaluasi kebijakan pola mutasi internal
- 3) Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Melakukan upaya pengembangan kompetensi
 - b. Memberikan kesempatan kepada Hakim dan Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Negeri Fakfak untuk mengikuti pengembangan kompetensi
- 4) Penetapan Kinerja Individu
Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Penerapan penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi
 - b. Penerapan penetapan kinerja individu sesuai indikator level atasnya
 - c. Penerapan penetapan kinerja individu secara periodik
 - d. Hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakan atau diimplementasikan mulai dari penetapan, implementasi dan pemantauan.
- 5) Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai
Indikator ini memperhatikan Penerapan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai telah dilaksanakan
- 6) Sistem Informasi Kepegawaian
Indikator ini memperhatikan pemutakhiran Informasi Kepegawaian telah dilakukan secara berkala

4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Komponen Penguatan Akuntabilitas Kinerja memiliki Indikator sebagai berikut:

- 1) Keterlibatan Pimpinan
Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan perencanaan
 - b. Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan penetapan kinerja
 - c. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala

2) Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan yang telah berorientasi hasil
- b. Penerapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah memiliki kriteria Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant and Time Bound (SMART)
- c. Penyusunan Laporan Kinerja tepat waktu
- d. Peningkatan Kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas Kinerja

5. Penguatan Pengawasan

Komponen Penguatan Pengawasan memiliki Indikator sebagai berikut :

1) Pengendalian Gratifikasi

Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Public Campaign tentang Pengendalian Gratifikasi
- b. Mengimplementasikan Pengendalian Gratifikasi

2) Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Membangun Lingkungan Pengendalian Unit Kerja
- b. Mensosialisasikan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) kepada pihak terkait

3) Pengaduan Masyarakat

Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menerapkan Kebijakan Pengaduan Masyarakat
- b. Menindaklanjuti Pengaduan Masyarakat
- c. Monitoring dan Evaluasi Pengaduan Masyarakat

4) Whistle Blowing System

Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menerapkan Whistle Blowing System
- b. Monitoring dan Evaluasi Penerapan Whistle Blowing System
- c. Menindak lanjuti hasil Evaluasi Penerapan Whistle Blowing System

5) Penanganan Benturan Kepentingan

Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
- b. Mensosialisasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan
- c. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Benturan Kepentingan
- d. Menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan benturan kepentingan

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Komponen Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik memiliki Indikator sebagai berikut :

1) Standar Pelayanan Pengukuran Indikator :

Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Penyusunan Standar Operasional Prosedure (SOP) Pelayanan

3.2 TABEL RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

No	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET
1	2	3	4	5	6
1	MANAJEMEN PERUBAHAN	1. Penyusunan Tim Kerja	a. Membuat Undangn Pembentukan Tim Kerja WBK/WBBM	- Undangn pembentukan Tim Kerja WBK/WBBM	100 %
			b. Rapat Pembentukan Tim Kerja WBK/WBBM	- Notulen, Absensi Rapat, Foto Kegiatan / Dokumentasi Rapat	100 %
			c. Penentuan Anggota Tim Kerja WBK/WBBM	- Berita Acara dan Mekanisme Seleksi Anggota Tim	100 %
			d. Pengesahan Tim Kerja WBK/WBBM oleh Ketua Pengadlian Negeri Fakfak	- SK Tim Kerja WBK/WBBM	100 %
	2. Dokumen Pembangunan Integritas WBK/WBBM	Rencana Zona Menuju	a. Membuat Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	- Undangn, Absensi, Foto Kegiatan / Dokumentasi Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM - Dokumen Laporan Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	100 %
			b. Membuat Target-target Prioritas yang Relevan dengan Tujuan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	- Surat Keputusan tentang Rencana pembangunan Zona Integritas dan Target Prioritas - Dokumen Rencana Aksi yang Berisi Target Prioritas - Dokumen laporan	100 %

		<p>c. Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Kepada Seluruh Aparatur Sipil Negara Pengadilan Negeri Faktak dan Masyarakat dan Pembuatan Laporan Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM</p> <p>d. Melakukan <i>Public Campaign</i> Zona Integritas, Pembagian Stiker Anti Korupsi kepada Masyarakat.</p>	<p>Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Target Prioritas Zona Integritas</p>	<p>Foto / Dokumentasi Sosialisasi Pencangangan Zona Intregitas Menuju WBK/WBBM dan Penandatanganan Komitmen Bersama Spanduk dan Banner Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kerja Capture Website, Media Sosial, Media Elektronik/Cetak</p> <p>Dokumen laporan Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM</p> <p>Dokumentasi Pembagian Stiker Anti Korupsi ke Masyarakat.</p>	<p>100 %</p>
	<p>3. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM</p>	<p>a. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Secara Berkala (Bulanan) Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM</p>	<p>Undangan, Notulen, Daftar Hadir dan Foto/Dokumentasi Kegiatan</p> <p>Dokumen Laporan Berkala Hasil Monitoring dan Evaluasi Secara Bulanan</p> <p>Laporan Tindak Lanjut Atas Laporan Monitoring dan Evaluasi</p>	<p>100 %</p>	

		4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	a. Pilihlah Role Model diantara Pimpinan (Ketua Pengadilan Negeri, Hakim, pejabat Struktural dalam Pelaksanaan Pembangunan	- Undang, Daftar Hadir, Berita Acara dan SK Penunjukan Role Model dan SK Role Model	100 %
--	--	---	---	--	--------------

			Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	- Dokumentasi Kegiatan Penunjukan Role Model	
			b. Pemilihan Agen Perubahan diantara Staf Mengacu Pada PERMENPAN RB Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah	- SK Penetapan Agen Perubahan	100 %
			c. Pembangunan Budaya Kerja dan Pola Pikir	- Kode Etik dan Perilaku Hakim, Panitera, Jurusita, Aparatur Sipil Negara - Pemberian Reward and Punishment - Laporan kegiatan Pembangunan Budaya Kerja dan Pola Pikir Meliputi : Dokumen, Absensi Pegawai - Program Reward and Punishment - Dokumen Pakta Integritas yang ditandatangani Seluruh Pegawai - Dokumentasi Apel Pagi dan Sore - Dokumentasi Rapat Bulanan - Dokumen Laporan Hasil Kegiatan Pembangunan Zona Integritas	100 %
II	PENATAAN TATA LAKSANA	1. Standar Operasional Procedure (SOP)	a. Penyusunan Standar Operasional Procedure (SOP) b. Penerapan Standar Operasional Procedure (SOP) c. Evaluasi Standar Operasional Procedure (SOP)	- Peta Bisnis Instansi - Dokumen Standar Operasional Procedure (SOP) - Dokumen Reviu Standar Operasional Procedure	100 %

			(SOP) yang di Tanda Tangani Ketua Pengadilan Negeri Fakfak	
	2. E-Office/E- Government	a. Penyusunan Sistem Pengukuran Kinerja Berbasis Sistem Informasi	<ul style="list-style-type: none"> - Undangan, Notulen, Daftar Hadir, Foto / Dokumentasi Rapat Bulanan - Aplikasi Komunikasi Data Nasional (KOMDANAS) - Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) - Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) - Aplikasi Persediaan - Aplikasi Gaji Pokok Pegawai (GPP) - Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS) 	100 %
		b. Penyusunan Sistem Kepegawaian Kinerja Berbasis Sistem Informasi	<ul style="list-style-type: none"> - Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) 	100 %
		c. Penyusunan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Sistem Informasi	<ul style="list-style-type: none"> - Website Resmi Pengadilan Negeri Fakfak - Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) - Aplikasi Sistem Pengawasan (SIWAS) - Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) - Aplikasi Indeks Kepuasan 	100 %

			<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat (IKM) - Aplikasi Antrian Sidang - Aplikasi Antrian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 	
	3. Keterbukaan Informasi Publik	<p>a. Penerapan Kebijakan Tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>b. Memiliki Website dengan Informasi Terkini yang Memudahkan Masyarakat Pencari Keadilan</p> <p>c. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik</p>	<ul style="list-style-type: none"> - SK tentang Layanan Informasi - Banner tentang Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik - Brosur tentang Penerapan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik - Penerapan Kebijakan Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Media Sosial 	100 %
			<ul style="list-style-type: none"> - Capture Website Pengadlan Negeri Faktak - Undangan, Notulen, Daftar Hadir, Foto / Dokumentasi Rapat 	100 %

				- Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik	
III	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA /SDM	1. Perencanaan Kebutuhan Pegawai Dengan Kebutuhan Organisasi	<p>a. Menyusun Analisa Kebutuhan Pegawai dalam Hal Rasio dan Beban Kerja dan Kualifikasi Pendidikan yang Mengacu Pada Peta Jabatan dan Hasil Analisis Beban Kerja</p> <p>b. Menyusun Monitoring dan Evaluasi Rencana Kebutuhan Pegawai</p>	<p>- Dokumen Analisa Kebutuhan Pegawai</p> <p>- Dokumen Rasio Beban Kerja Pegawai</p>	100 %
		2. Pola Mutasi Internal	<p>a. Penyusunan Kebijakan Pola Mutasi Internal</p> <p>b. Penerapan Kebijakan Pola Mutasi Internal</p>	<p>- SK Badan Pertimbangan Pangkat dan Jabatan (BAPERJAKAT)</p> <p>- SK Mutasi Internal</p>	100 %
			c. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pola Mutasi Internal	- Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pola Mutasi Internal	100 %
		3. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	<p>a. Pengembangan Kompetensi (Capacity Building/Transfer Knowledge</p> <p>b. Menyusun Daftar Bagi Hakim dan Aparatur Sipil Negara untuk Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Maupun Pengembangan Kompetensi Lainnya</p>	<p>- Dokumen Pengiriman Hakim/ Aparatur Sipil Negara untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT)</p>	100 %
			c. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	- Dokumen Monitoring	100 %

			Pengembangan Profesi	dan Evaluasi Kegiatan Pengembangan Profesi	
	4. Penetapan Kinerja Individu	<p>a. Menyusun Penilaian Kinerja Individu</p> <p>b. Menyusun Pengukuran Kinerja Individu Telah Memiliki Kesesuaian dengan Indikator Kinerja Individu Level Atasnya</p>	<p>- Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)</p> <p>- Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)</p>	100 %	
		<p>c. Menyusun Pengukuran Kinerja Individu Secara Periodik</p>	<p>- Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Triwulan</p>	100 %	
		<p>d. Hasil Penilaian Penilaian Kinerja Individu Telah Diimplementasikan Mulai dari Penerapan Sampai Dengan Pemantauan</p>	<p>- Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)</p>	100 %	
	5. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku	<p>a. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai Melalui Penerapan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai</p> <p>b. Sistem Informasi Kepegawaian Melalui Pemutakhiran Informasi Kepegawaian dilakukan Secara Terbuka</p>	<p>- Absensi Pegawai, Jjin Keluar Kantor</p> <p>- Dokumen Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP)</p>	100 %	
	6. Sistem Informasi Kepegawaian Pada Unit Kerja Telah Di Mutakhirkan Secara Berkala	<p>a. Meningkatkan Ketaatan Terhadap Pengelolaan SDM Aparatur Pada Pengadlian Negeri Faktak</p>	<p>- Undangn, Notulen, Daftar Hadir, Foto / Dokumentasi Rapat</p> <p>- Dokumen Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Permtaan Jabatan dan Analisis Beban Kerja</p> <p>- Surat U an kebutuhan</p>	100 %	

				<ul style="list-style-type: none"> - Pegawai - Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai Baru - SK Mutasi/Rotasi Internal - Daftar Riwayat Pekerjaan (DRP) / Daftar Riwayat Hidup (DRH) 	
		<p>b. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan SDM Aparatur Pada Pengadilan Negeri Fakfak</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Monitoring dan Evaluasi Terhadap Kegiatan Mutasi - Dokumen Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) 	100 %	
		<p>c. Meningkatkan Disiplin SDM Aparatur Pada Pengadilan Negeri Fakfak</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Daftar Absensi Hakim dan Pegawai 	100 %	
		<p>d. Meningkatkan Efektivitas SDM Aparatur Pada Pengadilan Negeri Fakfak</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Daftar Urut Kepangkatan (DUK), Daftar Urut Senioritas (DUS) 	100 %	
		<p>e. Meningkatkan Profesionalisme SDM Aparatur Pada Pengadilan Negeri Fakfak</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Rencana Pengembangan Kompetensi - Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) - Surat Kepada pegawai Yang Akan Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) / Pengembangan Kompetensi - Surat Usulan pegawai Yang Akan Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) / Pengembangan 	100 %	

			<ul style="list-style-type: none"> - Kompetensi - Daftar Pegawai Yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) / Pengembangan Kompetensi - Dokumen Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pengembangan Kompetensi - Dokumen Pengukuran Kinerja Individu Per Bulan 	
<p>IV PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</p>	<p>1. Keterlibatan Pimpinan</p>	<p>a. Mengadakan Rapat Perencanaan dan Anggaran.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Undangan, Notulen, Daftar Hadir, Foto / Dokumentasi Rapat - Dokumen Perencanaan Kegiatan dan Anggaran - Dokumen Perjanjian Kinerja 	<p>100 %</p>
	<p>2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja</p>	<p>b. Menyusun Dokumen Perencanaan c. Menyusun Indikator Kinerja Utama d. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) e. Menyusun Rencana Kerja Tahunan, Rencana Strategis (Resntra), Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja) f. Menyusun Standar Operasional Prosedure (SOP) Pelayanan g. Membuat Aplikasi Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) h. Menyusun SK Pengendalian Gratifikasi i. Menyusun Sistem Pengawasan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Undangan, Notulen, Daftar Hadir, Foto / Dokumentasi Rapat Bulanan - Dokumen Perencanaan yang Telah Berorientasi Hasil - Indikator Kinerja Utama (IKU) - Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) - Dokumen Rencana Kerja Tahunan - Rencana Strategis (Resntra) 	<p>100 %</p>

			<p>j. Internal Pemerintah (SPIP) Menyusun Standar Operasional Procedure (SOP) Penanganan Pengaduan Masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja) - Dokumen Standar Operasional Procedure (SOP) Pelayanan - Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat - SK Pengendalian Gratifikasi - SK Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) - Standar Operasional Procedure (SOP) Penanganan Pengaduan Masyarakat 	
V	<p>PENGUATAN PENGAWASAN</p>	<p>1. Pengendalian Gratifikasi</p>	<p>a. Menyusun Public Campaign tentang Pengendalian Gratifikasi</p> <p>b. Menyusun Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - SK Pengendalian Gratifikasi - Capture Banner/Spanduk/Media Public Campaign - Capture Close Circuit Television (CCTV) - Bukti Pengiriman (LHKASN) 	<p>100 %</p>
		<p>2. Pengawasan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)</p>	<p>a. Menyusun Analisis Resiko Pengaduan Negeri Fakfak</p> <p>b. Melakukan Sosialisasi dan Mengimplementasikan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah</p>	<ul style="list-style-type: none"> - SK Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) - Dokumen Matrik Indentifikasi Resiko - Dokumen Analisis Resiko - Dokumen Level Resiko - Dokumen Laporan Pengendalian Resiko - Undangan, Notulen, Daftar Hadir, Foto / Dokumentasi Rapat 	<p>100 %</p>

		(SPIP)		
	3. Pengaduan Masyarakat	<p>a. Layanan Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi dan Media Sosial</p> <p>b. Tindak Lanjut Hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat</p> <p>c. Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> - SK Petugas pengaduan Masyarakat - Foto/Dokumentasi Petugas/Ruang/Loket/Kotak Khusus Pengaduan - Foto/Dokumentasi Spanduk/Banner - Informasi Sarana Pengaduan - Capture Aplikasi Sistem Pengawasan (SIWAS) - Capture Pengaduan Melalui Media Sosial - Capture Respon Pengaduan Masyarakat - Bukti Penyampaian Pengaduan Masyarakat Kepada Bagian terkait - Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi laporan Pengaduan Tiap Bulan - Dokumen Laporan Tindak Lanjut Pengaduan 	100 %
	4. Whistle Blowing System (WBS)	<p>a. Menyusun SK dan Standar Operasional Prosedure (SOP) Whistle Blowing System (WBS)</p> <p>b. Mensosialisasikan Whistle Blowing System (WBS)</p> <p>c. Menyusun Laporan Evaluasi dan Tindak Lanjut Atas Penerapan Whistle Blowing System (WBS)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - SK Whistle Blowing System (WBS) - Standar Operasional Prosedure (SOP) Whistle Blowing System (WBS) - Foto/Dokumentasi Kegiatan Whistle Blowing System (WBS) - Dokumen Laporan Evaluasi dan Tindak Lanjut atas Penerapan 	100 %

				Whistle Blowing System (WBS)	
		5. Penanganan Benturan Kepentingan	<p>a. Mengidentifikasi Benturan Kepentingan dalam Tugas dan Fungsi Utama</p> <p>b. Mensosialisasikan Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan</p> <p>c. Mengimplementasikan Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan</p> <p>d. Menyusun Laporan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan</p> <p>e. Menyusun Tindak Lanjut Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Identifikasi/Pemetaan Benturan Kepentingan - Dokumen Surat Pernyataan Bebas dari Benturan Kepentingan - Undangan, Notulen, Daftar Hadir, Foto / Dokumentasi Rapat - Dokumen Laporan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan - Dokumen Tindak Lanjut Hasil Laporan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan 	100 %
VI	PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	1. Standar Pelayanan Pengukuran Indikator	<p>a. Menyusun Standar Pelayanan Minimal</p> <p>b. Menyusun Maklumat Standar Pelayanan</p> <p>c. Menyusun Standar Operasional Prosedure (SOP) Standar Pelayanan</p> <p>d. Mereviu Standar Operasional Prosedure (SOP) Standar Pelayanan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Standar Pelayanan - Capture Maklumat Standar Pelayanan - Dokumen Standar Operasional Prosedure (SOP) Standar Pelayanan - Dokumen Reviu Standar Operasional Prosedure (SOP) Standar Pelayanan 	100 %

		<ul style="list-style-type: none"> - Undangan, Notulen, Daftar Hadir, Foto / Dokumentasi Rapat 	
	<p>e. Melakukan Sosialisasi/Pelatihan Pelayanan Prima kepada Pegawai Pengadlian Negeri Faktak</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Capture Website Pengadlian Negeri Faktak 	
	<p>f. Menyediakan Informasi yang Mudah Diakses Oleh Masyarakat Melalui Media Cetak, Papan Pengumuman, Media Sosial, Website dan lain-lain</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Capture Sistem Informasi Pelayanan Perkara (Sipp) - Capture Direktori Putusan - Capture Akun Instagram Resmi Pengadlian Negeri Faktak - Capture Channel Youtube Resmi Pengadlian Negeri Faktak - Capture Banner Dan Figura Pelayanan 	
	<p>g. Menyediakan Penghargaan (Reward) dan Saksi (Punishment)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Penghargaan Pegawai Teladan (Role Model) - Dokumen Sanksi (Punishment) Pegawai 	
	<p>h. Pemberian Kompensasi Bagi Pelaksana Layanan Bila Layanan Yang Diberikan Tidak Sesuai Standar</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Pemberian Kompensasi Bagi Pelaksana Layanan Bila Layanan Yang Diberikan Tidak Sesuai Standar 	
	<p>i. Menyediakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Capture Aplikasi Antrian Sidang - Capture Aplikasi Antrian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 	

		<p>j. Menyediakan Inovasi Layanan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Capture Aplikasi Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Capture Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) - SITASYA DUTA E-COURT - Dokumen Laporan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Dokumen Laporan Perbaikan Pelayanan Sebagai Tindak Lanjut dari Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 	
		<p>k. Menyediakan Aplikasi Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan</p>		

BAB IV PENUTUP

Unit kerja berpredikat WBK/WBBM merupakan *outcome* dari upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan secara konkrit di dalam lingkup Zona Integritas.

Pengembangan WBK/WBBM secara bertahap sejalan dengan konsep *Island of Integrity*. Diharapkan, upaya ini akan menjadi bagian dari upaya yang dapat meningkatkan nilai IPK Indonesia. Untuk itu diperlukan upaya dan pendekatan yang proaktif dalam rangka memperlihatkan kepada dunia internasional/global, bahwa upaya pencegahan korupsi di Indonesia dilakukan secara kontinyu dan komprehensif.

Pedoman ini bersifat dinamis, dalam arti ketentuan-ketentuan di dalamnya dapat diubah sesuai kebutuhan berdasarkan perkembangan lingkungan strategis yang ada. Indikator dalam rangka penetapan predikat menuju WBK/WBBM diharapkan secara bertahap dapat diubah sehingga semakin mengarah kepada zero tolerance approach dalam pemberantasan korupsi.

- b. Menerapkan Standar Operasional Prosedure (SOP) Pelayanan
- c. Melakukan reuiu Standar Operasional Prosedure (SOP) Pelayanan
- d. Melakukan Sosialisasi Standar Operasional Prosedure (SOP) Pelayanan
- e. Memiliki informasi tentang standar pelayanan yang mudah diakses melalui berbagai media
- f. Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat
- g. Monitoring dan Evaluasi Survey Kepuasan Masyarakat

BAB IV

PENUTUP

Unit kerja berpredikat WBK/WBBM merupakan *outcome* dari upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan secara konkrit di dalam lingkup Zona Integritas.

Pengembangan WBK/WBBM secara bertahap sejalan dengan konsep *Island of Integrity*. Diharapkan, upaya ini akan menjadi bagian dari upaya yang dapat meningkatkan nilai IPK Indonesia. Untuk itu diperlukan upaya dan pendekatan yang proaktif dalam rangka memperlihatkan kepada dunia internasional/global, bahwa upaya pencegahan korupsi di Indonesia dilakukan secara kontinyu dan komprehensif.

Pedoman ini bersifat dinamis, dalam arti ketentuan-ketentuan di dalamnya dapat diubah sesuai kebutuhan berdasarkan perkembangan lingkungan strategis yang ada. Indikator dalam rangka penetapan predikat menuju WBK/WBBM diharapkan secara bertahap dapat diubah sehingga semakin mengarah kepada zero tolerance approach dalam pemberantasan korupsi.

CHEKLIST

NO. 2.b

**TARGET-TARGET
PRIORITAS DALAM
RENCANA
PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS**

**TARGET PRIORITAS PROGRAM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PENGADILAN NEGERI FAKFAK**

No	Target Prioritas
1	2
1	Pembentukan Tim Zona Integritas
2	Menyusun dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
3	Sosialisasi Program Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
4	Penguatan komitmen pembangunan Zona Integritas.
5	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Zona Integritas melalui pemantauan kegiatan strategis Pengadilan Negeri Fakfak, tindak lanjut hasil audit internal maupun eksternal Akreditasi Penjaminan Mutu pelaksanaan pembinaan Sistem Manajemen Mutu, serta penerapan standar pelayanan public.
6	Pelaksanaan Pelatihan peningkatan SDM
7	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi SOP kegiatan
8	Peningkatan disiplin dan profesionalisme pegawai.
9	Menyusun kegiatan dan penganggaran kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.
10	Peningkatan akuntabilitas kinerja
11	Pelaksanaan pengawasan internal melalui Sistem Pengendalian Intern
12	Peningkatan kepatuhan pengelolaan Keuangan Negara melalui laporan keuangan
13	Menetapkan Agen Perubahan dan Role Model pada Pengadilan Negeri Fakfak
14	Melaksanakan pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> kepada Aparatur Pengadilan
15	Meningkatkan partisipasi pegawai agar terlibat dalam Program Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
16	Pelaporan kegiatan TIM ZI.

CHEKLIST

NO. 2.c

**MEDIA UNTUK
MENSOSIALISASIKAN
PEMBANGUNAN
WBK/WBBM**

FACEBOOK PENGADILAN NEGERI FAKFAK

Tidak ada SIM 13.22 83%

Pengadilan Negeri Fakfak



Pengadilan Negeri Fakfak
Akun Resmi Pengadilan Negeri Fakfak,
dikelola oleh Bagian PTIP PN. Fakfak
www.pn-fakfak.go.id

+ Tambah ke Cerita

Edit Profil

WEBSITE PENGADILAN NEGERI FAKFAK

Tidak ada SIM 13.21 83%
 Tidak Aman — pn-fakfak.go.id
 PENGADILAN NEGERI FAKFAK MENUJU WILAYAH BEBAS K

PENGADILAN NEGERI FAK FAK JADWAL SIDANG TANGGAL SELASA, 12 OKT. 2021

NO	NO PERKARA	TERDAKWA	RUANG	AGENDA	JENIS PERKARA
----	------------	----------	-------	--------	---------------

MAKLUMAT PELAYANAN
 Nomor: W30.LU6/29/KPN/SK/II/2021

"DENGAN INI KAMI SELURUH APARATUR PENGADILAN NEGERI FAKFAK, MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, APABILA TIDAK MENEPATI JANJI TERJADI PENYIMPANGAN, SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU"

FAKFAK, 10 FEBRUARI 2021
 KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK

M. MARGONO, SH
 NIP. 19760211 200212 1 004

Pengumuman

- Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021
 - Pengumuman Hasil Akhir Seleksi Lembaga Layanan Pos Bantuan Hukum
 - Pengumuman Hasil Akhir Tes Calon Tenaga Pramubakti
 - Pengumuman Hasil Tes Kemampuan Komputer
 - Penundaan Jadwal Seleksi Lembaga Pembinaan Layanan Pos Bantuan Hukum
 - Pengumuman Hasil Seleksi Berkas/Administrasi Rekrutmen Tenaga Honorar (Pramubakti) Pengadilan Negeri Fakfak
 - Penempatan Penastabatan Tenaga Pramubakti (Honorar)
- [Lebih lanjut](#)

[Berita Mahkamah Agung](#)

Kegiatan

- Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Panitera Muda Hukum
 - Closing Meeting Pengawasan Reguler, Assesmen Surveilans Akreditasi Penjaminan Mutu serta Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas
 - Opening Meeting Pengawasan Reguler, Assesment Surveilans Akreditasi Penjaminan Mutu serta Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas
 - Closing Meeting Audit Internal
 - Opening Meeting Audit Internal
 - Sosialisasi DIPA, RKA-K/L 2021 dan Monitoring evaluasi Anggaran Triwulan 1
 - Desk - Evaluation Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas
- [Lebih lanjut](#)

[Pengumuman Mahkamah Agung](#)

Pilihan Bahasa

Pilih Bahasa ▼

Layanan Pengadilan Negeri Fakfa

- Layanan Survey Masyarakat
- Informasi Perkara
- Surat Keterangan Elektronik
- Pos Bantuan Hukum
- Pengaduan Secara Online
- Pendaftaran Perkara Secara Elektronik
- Persyaratan Pelayanan Perdata
- Persyaratan Pelayanan Pidana
- Persyaratan Pelayanan Hukum



INSTAGRAM PENGADILAN NEGERI FAKFAK



PENGADILAN NEGERI
FAKFAK

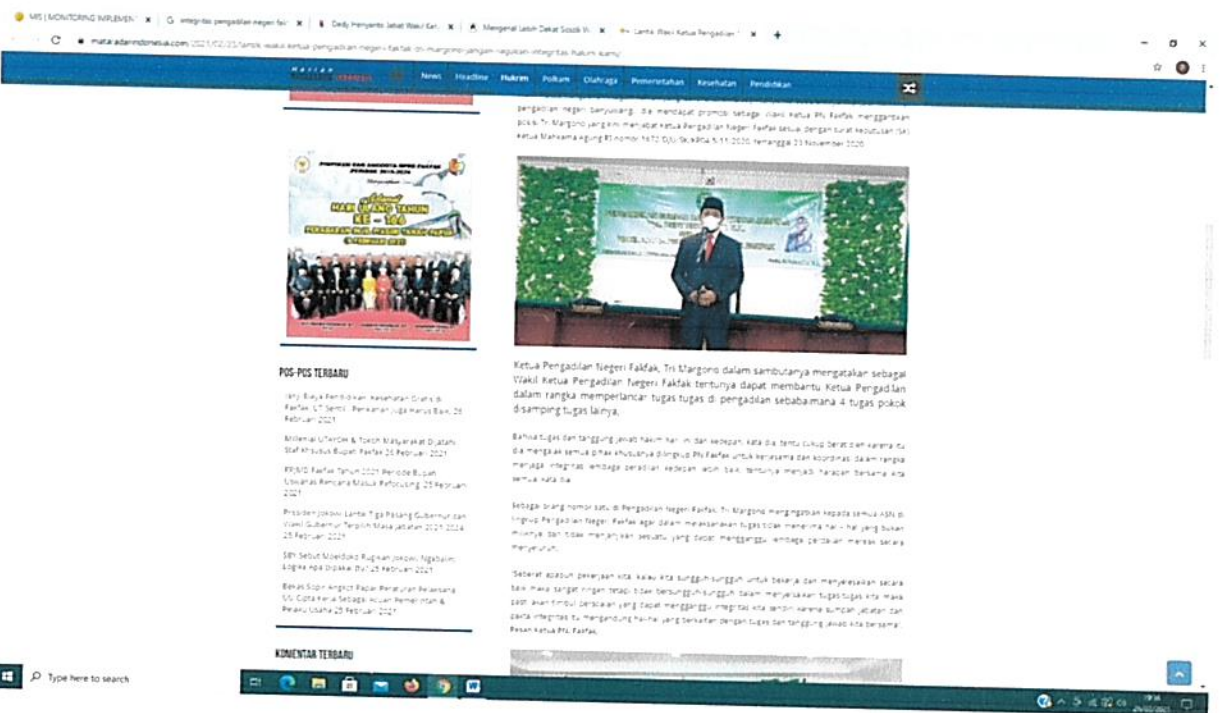
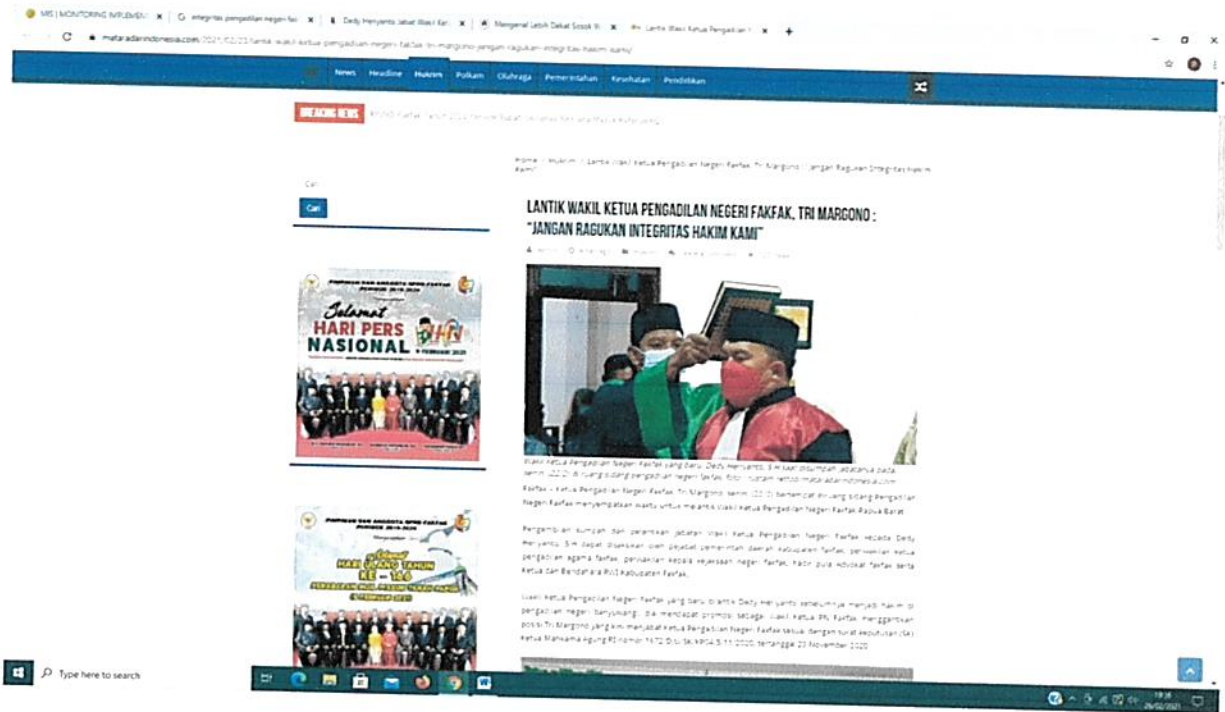
SILAMAT
DATANG

ANDA MEMASUKI
ZONA INTEGRITAS!!



STOP GRATIFIKASI

Dokumentasi Pembangunan Zona Integritas melalui Media Massa



DOKUMENTASI

Pengadilan Negeri Fakfak x +

sk.go.id/home/content/kegiatan/page/3/2021022303281011241559946034764a55189.html

Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Wakil Ketua

PER
23

Konten : kegiatan Sosial

Telah dibaca : 195 Kali



Senin, 22 Februari 2021 bertempat di Ruang Sidang Cendrawasih Pengadilan Negeri Fakfak telah dilaksanakan Upacara Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Bpk. Dedy Heryanto, SH. Acara dimulai pukul 10.00 WIT.

Acara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II yang sebelumnya menjabat sebagai Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi Kelas I A diawali dengan pembacaan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang disaksikan oleh Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak, Perwakilan Ketua Pengadilan Agama Fakfak, Perwakilan Kepala Kejaksaan Negeri Fakfak, Para Advokat dan Bendahara PWI Kabupaten Fakfak. Kemudian dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Fakfak. Selanjutnya penandatanganan berita acara sumpah, kata-kata pelantikan, kemudian penandatanganan Pakta Integritas dan dilanjutkan dengan pengalungan kalung jabatan oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Bapak Tri Margono, SH. Ketua Pengadilan Negeri Fakfak memberikan beberapa kata sambutan.

Acara ditutup dengan beberapa kata perkenalan dari Bapak Dedy Heryanto, SH. selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Fakfak yang telah dilantik, kemudian dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak, para hakim, serta seluruh aparaturnya Pengadilan Negeri Fakfak dan para tamu undangan.

POS-POS TERBARU

- Aty Jaya Peringati Kesenakan Gribu di Fakfak, 17 Januari 2024
- Militeri L'ArDin & Tim Maklukkan D'urum Staf Khusus Bupati Fakfak 26 Februari 2024
- PKMD Fakfak Tahun 2024 Periode Kedua Usahakan Berkarya Masak Reforcing 25 Februari 2024
- Priksid Provinsi Lantik Tiga Pasang Gubernur dan Wakil Gubernur Tengah Masa Jabatan 2024-2024 25 Februari 2024
- SDN Sebatu Maridoko Rujukan sebagai Ngabalin Logistik dan Logistik 2024 25 Februari 2024
- Bupati Sagar Anggot Pagar Peraturan Perakulan UU Cipta Kerja Sebagai Badan Pemerintahan & Peraku Usaha 25 Februari 2024

KOMENTAR TERBARU

- admin 2024 Perkiraan Budget - Yaku Bupati Fakfak Periode 2020-2025 Peraku Pejabat S.H
- ABR1848 Sakabawa 1984 atau 1984 pata

Tri Margono: Jangan Ragukan Integritas Hakim Pengadilan Negeri Fakfak

Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Tri Margono menjamin integritas hakim pengadilan negeri Fakfak berjangka waktu dengan zona integritas di Pengadilan negeri Fakfak yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2019 karena di pengangkatan zona integritas di Pengadilan negeri Fakfak harus di anggap dari di anggapkan.

PKMD Aty di di anggapkan bahwa pada tahun 2024 ini akan dengan surat dari Badan Direksi untuk di Berikan Umum dan Masyarakat untuk di anggapkan negeri Fakfak di gunakan untuk membangun wilayah bebas korupsi (BBK) karena ini mulai saat ini pemerintah harus lebih giat dan bekerja keras untuk melindungi Pengadilan negeri Fakfak dari wilayah bebas korupsi.

Tetapi di Pengadilan negeri Fakfak di gunakan untuk membangun wilayah bebas korupsi (BBK) karena di dengan terpa baru dan pejabat baru serta kerangka baru maka akan bekerja keras untuk menahkanya bebas dari korupsi di Pengadilan negeri Fakfak tegas ketua Pengadilan negeri Fakfak, Tri Margono, Sa.

Menurut dia, hakim menjadi juga menjadi salah satu tugas baru dan akan ketua Pengadilan negeri Fakfak, Dedy Heriyanto, Sa, sebagai ketua ini untuk membangun zona integritas di Pengadilan negeri Fakfak dan ini tugas berat yang harus di buat baru trial ketua Pengadilan negeri Fakfak, saat ini Margono ketua Pengadilan negeri Fakfak.

Pengadilan negeri Fakfak **No Pungli** bahwa tidak menerima uang atau dalam bentuk barang atau apapun dari orang yang berkecukuh melakukan penyidikan terhadap kita, itu sudah di gar oleh negara yang sudah benar tidak perlu mencari sumber pendapatan lain dari sumber yang tidak ada, jadi tidak mau menerima uang atau barang di berikan di berikan di pengadilan negeri Fakfak, di anggap ketua PK Fakfak, 1984.

Keterangan:

Screenshot berita mengenai pelantikan Wakil Ketua Pengadilan Fakfak Bpk. Dedy Heriyanto, S.H. oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak yang dalam sambutannya menerangkan bahwa agar masyarakat Kabupaten Fakfak jangan meragukan integritas Hakim di Pengadilan Negeri Fakfak



**ANDA MEMASUKI WILAYAH
ZONA INTEGRITAS
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
PADA PENGADILAN NEGERI FAKFAK KELAS II**



Keterangan : Salah satu mekanisme Pengadilan Negeri Fakfak dalam mensosialisasikan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM yaitu melalui media sosial.

CHEKLIST

NO. 2.b

**TARGET-TARGET
PRIORITAS DALAM
RENCANA
PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS**

**TARGET PRIORITAS PROGRAM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PENGADILAN NEGERI FAKFAK**

No	Target Prioritas
1	2
1	Pembentukan Tim Zona Integritas
2	Menyusun dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
3	Sosialisasi Program Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
4	Penguatan komitmen pembangunan Zona Integritas.
5	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Zona Integritas melalui pemantauan kegiatan strategis Pengadilan Negeri Fakfak, tindak lanjut hasil audit internal maupun eksternal Akreditasi Penjaminan Mutu pelaksanaan pembinaan Sistem Manajemen Mutu, serta penerapan standar pelayanan public.
6	Pelaksanaan Pelatihan peningkatan SDM
7	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi SOP kegiatan
8	Peningkatan disiplin dan profesionalisme pegawai.
9	Menyusun kegiatan dan penganggaran kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.
10	Peningkatan akuntabilitas kinerja
11	Pelaksanaan pengawasan internal melalui Sistem Pengendalian Intern
12	Peningkatan kepatuhan pengelolaan Keuangan Negara melalui laporan keuangan
13	Menetapkan Agen Perubahan dan Role Model pada Pengadilan Negeri Fakfak
14	Melaksanakan pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> kepada Aparatur Pengadilan
15	Meningkatkan partisipasi pegawai agar terlibat dalam Program Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
16	Pelaporan kegiatan TIM ZI.

CHEKLIST

NO. 2.c

**MEDIA UNTUK
MENSOSIALISASIKAN
PEMBANGUNAN
WBK/WBBM**

Tidak ada SIM 13.22 83%

Pengadilan Negeri Fakfak



Pengadilan Negeri Fakfak
Akun Resmi Pengadilan Negeri Fakfak,
dikelola oleh Bagian PTIP PN. Fakfak
www.pn-fakfak.go.id

Tambah ke Cerita

Edit Profil

WEBSITE PENGADILAN NEGERI FAKFAK

Tidak ada SIM 13.21 83%
 Tidak Aman — pn-fakfak.go.id
 PENGADILAN NEGERI FAKFAK MENUJU WILAYAH BEBAS K

PENGADILAN NEGERI FAK FAK
JADWAL SIDANG TANGGAL SELASA, 12 OKT. 2021

NO	NO PERKARA	TERDAKWA	RUANG	AGENDA	JENIS PERKARA
----	------------	----------	-------	--------	---------------

MAKLUMAT PELAYANAN
 Nomor: W30.U6/29.KPN/ISK/II/2021

DENGAN INI KAMI SELURUH APARATUR PENGADILAN NEGERI FAKFAK MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN. APABILA TIDAK MENEPAATI/JANJITERJADI PENYIMPANGAN, SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU.

FAKFAK, 10 FEBRUARI 2021
 KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK

DR. MARGONO, SH.
 NIP. 19760211 200212 1 004

Pengumuman

- Petaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021
- Pengumuman Hasil Akhir Seleksi Lembaga Layanan Pos Bantuan Hukum
- Pengumuman Hasil Akhir Tes Calon Tenaga Pramubakti
- Pengumuman Hasil Tes Kemampuan Komputer
- Penundaan Jadwal Seleksi Lembaga Pembinaan Layanan Pos Bantuan Hukum
- Pengumuman Hasil Seleksi Berkas/Administrasi Rekrutmen Tenaga Honorar (Pramubakti) Pengadilan Negeri Fakfak
- Penamaan Pendaftaran Tenaga Pramubakti (Honorar)

Lebih lanjut

Berita Mahkamah Agung

Kegiatan

- Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Paritera Muda Hukum
- Closing Meeting Pengawasan Reguler, Assesmen Surveilans Akreditasi Penjaminan Mutu serta Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas
- Opening Meeting Pengawasan Reguler, Assesment Surveilans Akreditasi Penjaminan Mutu serta Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas
- Closing Meeting Audit Internal
- Opening Meeting Audit Internal
- Sosialisasi DIPA, RKA-KA 2021 dan Monitoring evaluasi Anggaran Triliun 1
- Desk - Evaluation Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas

Lebih lanjut

Pengumuman Mahkamah Agung

Pilihan Bahasa

Pilih Bahasa

Layanan Pengadilan Negeri Fakfa

- Layanan Survey Masyarakat
- Informasi Perkara
- Surat Keterangan Elektronik
- Pos Bantuan Hukum
- Pengaduan Secara Online
- Pendaftaran Perkara Secara Elektronik
- Persyaratan Pelayanan Perdata
- Persyaratan Pelayanan Pidana
- Persyaratan Pelayanan Hukum



INSTAGRAM PENGADILAN NEGERI FAKFAK





PENGADILAN NEGERI FAKFAK

**SELAMAT
DATANG**

ANDA MEMASUKI
ZONA INTEGRITAS!!



STOP GRATIASI

Dokumentasi Pembangunan Zona Integritas melalui Media Massa

BREAKING NEWS 19:00 Fakfa, 19 Feb 2022, 19:00. Berita dan informasi terbaru dari Fakfa.

Home | Home | Lantik Wakil Ketua Pengadilan Negeri Fakfa, Tri Margono, Jargon Ragukan Integritas Hakim Kami

LANTIK WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK, TRI MARGONO: "JANGAN RAGUKAN INTEGRITAS HAKIM KAMI"

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Fakfa yang baru, Dedy Herianto, 8 Februari 2022, saat diantik sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Fakfa, 8 Februari 2022. (Dedy Herianto/Adinda Online)

Pengantian sultan dan perantaraan jabatan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Fakfa kepada Dedy Herianto, 8 Februari 2022, saat diantik sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Fakfa, 8 Februari 2022. (Dedy Herianto/Adinda Online)

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Fakfa yang baru, Dedy Herianto, saat diantik sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Fakfa, 8 Februari 2022. (Dedy Herianto/Adinda Online)

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Fakfa yang baru, Dedy Herianto, saat diantik sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Fakfa, 8 Februari 2022. (Dedy Herianto/Adinda Online)

KORPORASI BERKONTRAK DENGAN PENGADILAN NEGERI FAKFAK: "MELAKUKAKAN KEGIATAN SEMENTARA"

Pengadilan Negeri Fakfa, 19 Februari 2022, saat diantik sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Fakfa, 8 Februari 2022. (Dedy Herianto/Adinda Online)

Ketua Pengadilan Negeri Fakfa, Tri Margono, dalam sambutannya mengatakan sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Fakfa tentunya dapat membantu Ketua Pengadilan dalam rangka memperlancar tugas-tugas di pengadilan sebagaimana 4 tugas pokok di samping tugas lainnya.

Berita tugas dan tanggung jawab hakim dalam dan sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi di Pengadilan Negeri Fakfa, Tri Margono, saat diantik sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Fakfa, 8 Februari 2022. (Dedy Herianto/Adinda Online)

Sebagai orang nomor satu di Pengadilan Negeri Fakfa, Tri Margono mengatakan kepada semua ASN di Pengadilan Negeri Fakfa agar dalam melaksanakan tugas-tugas mereka harus tetap berpegang teguh pada integritas sebagai hakim yang jujur, adil, dan bermartabat.

Sebelum memulai pekerjaan maka harus ada komitmen yang kuat dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Maka dari itu akan timbul perasaan yang dapat mengganggu integritas, yaitu ketika merasa jenuh dan tidak semangat, mengundungi, yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Fakfa.

POS-POS TERBARU

- 1917 Baku Perencanaan Kesenjangan Sosial di Fakfa, 17 Februari 2022, 19:00. Berita dan informasi terbaru dari Fakfa, 17 Februari 2022, 19:00.
- Milena Uchirika & Toshi Masayuki D. Jurni Staf Khusus Bupati Fakfa, 26 Februari 2022.
- PRIND Fakfa, 19 Februari 2022, 19:00. Berita dan informasi terbaru dari Fakfa, 19 Februari 2022, 19:00.
- Presiden Jokowi Lantik Tiga Pasang Gubernur dan Wakil Gubernur Tingkat III Januari 2022, 25 Februari 2022.
- SBY Sebut Masalah Rujukan Jarak, Tegak dan Logika Ada Di Balik Itu, 25 Februari 2022.
- Berita Sopot Anggot Pagar Perburuan Perikanan UO Cofa Kena Sebagai Aduan Pemerintah & Petani Usaha, 25 Februari 2022.

KOMENTAR TERBARU

DOKUMENTASI

Pengadilan Negeri Fakfak x +

akgo.id/home/content/kegiatan/page/3/2021022303281011241559946034764a55189.html

Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Wakil Ketua

PER
23

Konten : kegiatan Sosial

Telah dibaca : 195 Kali



Senin, 22 Februari 2021 bertempat di Ruang Sidang Cendrawasih Pengadilan Negeri Fakfak telah dilaksanakan Upacara Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Bpk. Dedy Heriyanto, SH. Acara dimulai pukul 10.00 WIT.

Acara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II yang sebelumnya menjabat sebagai Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi Kelas I A diawali dengan pembacaan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang disaksikan oleh Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak, Perwakilan Ketua Pengadilan Agama Fakfak, Perwakilan Kepala Kejaksaan Negeri Fakfak, Para Advokat dan Bendahara PWI Kabupaten Fakfak. Kemudian dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Fakfak. Selanjutnya penandatanganan berita acara sumpah, kata-kata pelantikan, kemudian penandatanganan Pakta Integritas dan dilanjutkan dengan pengalungan kalung jabatan oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Bapak Tri Margono, SH. Ketua Pengadilan Negeri Fakfak memberikan beberapa kata sambutan.

Acara ditutup dengan beberapa kata perkenalan dari Bapak Dedy Heriyanto, SH. selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Fakfak yang telah dilantik, kemudian dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak, para hakim, serta seluruh aparatur Pengadilan Negeri Fakfak dan para tamu undangan.

The screenshot shows a news article on the website 'matakabardomedia.com'. The main headline is 'Tri Margono: Jangan Ragukan Integritas Hakim Pengadilan Negeri Fakfak'. The article text discusses the appointment of Dedy Heriyanto, S.H. as the new District Court Judge of Fakfak, emphasizing the integrity of the judiciary. The article also mentions the presence of the District Court Judge of Fakfak, Tri Margono, and the District Court Judge of Fakfak, Dedy Heriyanto, S.H. The article is dated 23 February 2021.

POS-POS TERBARU

- Wilya Baya Rendu dan Khasanah Gracia S. Fakfak, U.S. Resmi Penarikan Jaja Kurus Baku, 26 Februari 2021
- Milena S. T. dan Tri M. Khasanah Gracia S. Staf Khusus Bupati Fakfak, 24 Februari 2021
- WASCO Fakfak Tahun 2021 Periode Bulan November dan Desember Refocusing, 23 Februari 2021
- Presiden Jokowi Lantik Tiga Pasang Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Masa Jabatan 2021-2024, 23 Februari 2021
- Si Putih Mendapat Rujukan sebagai Nopalin, 23 Februari 2021
- Bupati Sopo dan Wakil Bupati Peraturan Perundang-undangan Kota Fakfak sebagai Kajian Kemerdekaan & Perilaku, 23 Februari 2021

KOMENTAR TERBARU

admin pada Reaksi dan Opini Wakil Bupati Fakfak Periode 2020-2025 Pada Putusan No. 48/2020/Sk/2020/10/BK/2020/10/2020

Keterangan:

Screenshot berita mengenai pelantikan Wakil Ketua Pengadilan Fakfak Bpk. Dedy Heriyanto, S.H. oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak yang dalam sambutannya menerangkan bahwa agar masyarakat Kabupaten Fakfak jangan meragukan integritas Hakim di Pengadilan Negeri Fakfak



CHEKLIST

NO. 3.a

**KEGIATAN
PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS SUDAH
SESUAI RENCANA**

**RENCANA AKSI ZONA INTEGRITAS
PADA AREA I MANAJEMEN PERUBAHAN**

No.	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1.	Penyusunan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas	Unit Kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas	Memastikan telah dilakukan rapat pembentukan tim pembangunan Zona Integritas	Telah tersedia Dokumen rapat pembentukan Tim pembangunan Zona Integritas pada Pengadlian Negeri Faktak dengan dilengkapi daftar hadir, notulensi dan dokumentasi serta dilengkapi dengan SK KPN Faktak tentang Tim pembangunan Zona Integritas Pengadlian Negeri Faktak Tahun 2022	Februari 2022
		Penentuan anggota Tim dipilih melalui Mekanisme yang jelas	Memastikan mekanisme yang telah ditentukan sudah diaplikasikan dalam rapat penentuan Tim pembangunan Zona Integritas Pengadlian Negeri Faktak Tahun 2022	Telah tersedia dokumen mekanisme penentuan anggota tim pembangunan Zona Integritas	Januaru 2022

2. Rencana Pembangunan Zona Integritas	<p>Terdapat Dokumen rencana kerja Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Faktak</p> <p>Terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan Zona Integritas</p> <p>Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM</p>	<p>Memastikan dokumen rencana kerja sudah disusun oleh Tim</p> <p>Memastikan apakah target prioritas telah disusun dan telah relevan dengan tujuan pembangunan Zona Integritas</p> <p>Memastikan bahwa masyarakat mengerti atas adanya pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Faktak melalui media</p>	<p>Telahtersedia Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Faktak</p> <p>facebook mengenai sosialisasi pembangunan Zona Integritas</p> <p>Telahtersedia dokumen target-target prioritas dalam rencana kerja pembangunan Zona Integritas</p> <p>Telahtersedia dokumen berupa screenshot website, instagram dan</p>	<p>Februari 2022</p> <p>Februari 2022</p> <p>Februari 2022</p>

No.	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
3.	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan	Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana	Memastikan kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan tepat waktu dan sesuai rencana	Telahtersedia tabel mengenai rencana aksi berupa paramater yang terdiri indikator langkah aksi bukti fisik dan target waktu	Maret 2022
		Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas	Memastikan kegiatan pemantauan dilaksanakan secara berkala dengan diikuti oleh pimpinan	Telahtersedia laporan monitoring dan evaluasi pembangunan zona integritas yang dilaksanakan setiap bulannya	Maret 2022
		Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti	Memastikan bahwa temuan dalam monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti oleh tim	Telah tersedia laporan tindak lanjut yang divalidasi oleh Koordinator Area I Manajemen Perubahan	Maret 2022
4.	Perubahan pola pikir dan budaya kerja	Pimpinan berperan sebagai role model dalam melaksanakan pembangunan WBK.WBBM	Memastikan jika pimpinan menjadi contoh pelaksanaan nilai-nilai organisasi	Telahtersedia dokumen absen Ketua Pengadilan Negeri Faktak, daftar hadir rapat, apel pagi, apel sore dan dokumen pemilihan role model serta SK KPN	Februari 2022

	<p>Sudah ditetapkan Agen Perubahan</p>	<p>Memastikan perubahan ditetapkan berkontribusi terhadap perubahan pada unit kerja</p>	<p>Telahtersedia dokumen pemilihan dan penetapan Agen Perubahan Pengadilan Negeri Faktak 2022</p>	<p>Maret 2022</p>
	<p>Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi</p>	<p>Memastikan telah dilakukan pembangunan budaya kerja dan pola pikir serta mampu mengurangi resistensi atas perubahan</p>	<p>Telah tersedia dokumen rencana perubahan budaya kerja dan pola pikir</p>	<p>Februari 2022</p>
	<p>Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WVK/WBBM</p>	<p>Memastikan semua anggota terlibat dalam pembangunan zona integritas dan usulan dari anggota diakomodasikan dalam sebuah keputusan</p>	<p>Telah tersedia dokumen yang berupa dokumentasi keikutsertaan seluruh anggota Pengadilan Negeri Faktak dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas seperti penandatanganan pakta integritas, apel pagi da sore, rapat, sosialisasi, dll</p>	<p>Maret 2022</p>

**DOKUMEN RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
PENGADILAN NEGERI FAKFAK
TAHUN 2022**



**Oleh:
TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS
PENGADILAN NEGERI FAKFAK**

**PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI
(WBK)/WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (BBM)
PENGADILAN NEGERI FAKFAK TAHUN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1.Latar Belakang

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, makainstansi pemerintah perlu untuk membangun pilot project Pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu perlu secara kongkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas. Dalam rangka pembangun Zona Integritas, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah : (1) Menyelaraskan instrument Zona Integritas dengan instrumen evaluasi Reformasi Birokrasi, serta (2) Penyederhanaan pada indikator proses dan indikator hasil yang lebih fokus dan akurat. Untuk itu perlu disusun pedoman pembangunan zona integritas pada Pengadilan Negeri Fakfak dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014.

1.2.Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
- d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun2009 tentang Pelayanan Publik;
- f. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentan Peradilan Umum;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
- h. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- i. Peraturan Presiden 81 Tahun 2010 tentang Grand Design ReformasiBirokrasi 2010 –

- j. Peraturan Presiden 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Inpres 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- k. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- l. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah
- m. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.194A/KMA/SK/XI/2014 tanggal 25 November 2014.

1.3.Maksud dan Tujuan

- Dokumen rencana kerja ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pengadilan Negeri Fakfak dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM); dan
- Tujuan penyusunan dokumen rencana kerja ini adalah memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Pengadilan Negeri Fakfak

1.4.Pengertian Umum

Dalam dokumen rencana kerja ini,yang dimaksud dengan :

1. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinannya dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
 2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
 3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan,penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
 4. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah; Unit Kerja adalah Unit/satuan Kerja di instansi Pemerintah, serendah- rendahnya eselon III yang menyelenggarakan fungsi pelayanan.
 5. Menteri adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 6. Tim Penilai Internal (TPI) adalah tim yang dibentuk oleh pimpinan instansi pemerintah yang mempunyai tugas melakukan penilaian unit kerja dalam rangka memperoleh predikat Menuju WBK/Menuju WBBM.
-

maka hal yang selanjutnya dilakukan adalah menentukan komponen-komponen yang harus dibangun.

Terdapat dua jenis komponen yang harus dibangun dalam unit kerja terpilih, yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Di bawah ini adalah gambar yang menunjukkan hubungan masing-masing komponen dan indikator pembangun komponen.



Melalui model tersebut dapat diuraikan bahwa program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik merupakan komponen pengungkit yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

BAB II

PROGRAM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

2.1. Pencanaan Pembangunan Zona Integritas

- a. Pencanaan Pembangunan Zona Integritas adalah dengan deklarasi / pernyataan dari pimpinan suatu instansi pemerintah bahwa instansinya telah siap membangun Zona Integritas.
- b. Pencanaan Pembangunan Zona Integritas dilakukan oleh pimpinan dan seluruh atau sebagian besar pegawainya telah mendatangi Dokumen Pakta Integritas. Pendatangan dokumen Pakta Integritas dapat dilakukan secara masal/serentak pada saat pelantikan, baik sebagai CPNS, PNS, maupun pelantikan dalam rangka mutasi kepegawaian horizontal dan vertikal. Bagi instansi pemerintah yang belum seluruh pegawainya menandatangani Dokumen Pakta Integritas, dapat melanjutkan / melengkapi setelah perencanaan pembangunan Zona Integritas;
- c. Pencanaan pembangunan Zona Integritas telah dilaksanakan secara terbuka dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya dibidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;

2.2. Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Program Pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut perencanaan yang telah dilakukan oleh pimpinan. Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit.

BAB III

RENCANA AKSI/RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

3.1. RENCANA KERJA

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) mempunyai beberapa Komponen antara lain :

1. Manajemen Perubahan

Komponen Manajemen Perubahan memiliki Indikator sebagai berikut :

1) Penyusunan Tim Kerja

Penyusunan Tim Kerja ini dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pembentukan Tim untuk melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
- b. Pembentukan Tim ini dilakukan melalui prosedur atau mekanisme yang jelas
- c. Ketua Pengadilan Negeri Fakfak bertanggung jawab atas pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

2) Dokumen Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Penyusunan Dokumen Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Dokumen Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) telah memuat target-target prioritas yang relevan sesuai dengan tujuan.
- b. Mekanisme atau media untuk mensosialisasikan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) telah disediakan.

3) Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) ini dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Seluruh kegiatan pemantauan dan evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) telah dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan

Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) telah ditindak lanjuti

4) Perubahan pola pikir dan budaya kerja

Perubahan pola pikir dan budaya kerja ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pimpinan menjadi role model dalam Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
- b. Pemilihan agen perubahan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah.
- c. Pembangunan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Fakfak
- d. Keterlibatan Hakim, dan seluruh Aparatur Sipil Negara Pengadilan Negeri Fakfak dalam Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

2. Penataan Tata Laksana

Komponen Penataan Tata Laksana memiliki Indikator sebagai berikut :

1) Standar Operasioanal Prosedure (SOP)

Penyusunan Standar Operasional Prosedure (SOP) memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Penyusunan Standar Operasional Prosedure (SOP) telah mengacu pada Proses Peta Bisnis Pengadilan Negeri Fakfak
- b. Penerapan Standar Operasional Prosedure (SOP)
- c. Reviu/Perbaikan Standar Operasional Prosedure (SOP)

2) E-Office/E-Govenment

Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Penyusunan Sistem Pengukuran Kinerja Berbasis Sistem Informasi
- b. Penyusunan Sistem Kepegawaian Berbasis Sistem Informasi
- c. Penyusunan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Sistem Informasi

3) Keterbukaan Informasi Publik

Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Penerapan kebijakan Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- b. Monitoring dan Evaluasi Penerapan kebijakan Tentang Keterbukaan Informasi Publik

3. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)

Komponen Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki Indikator sebagai berikut :

1) Perencanaan kebutuhan pegawainsesuai dengan kebutuhan organisasi. Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menerapkan rencana kebutuhan pegawai pada Pengadilan Negeri Fakfak yang mengacu pada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja

Negeri Fakfak

2) Pola Mutasi Internal

Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menyusun kebijakan pola mutasi internal
- b. Menerapkan kebijakan pola mutasi internal
- c. Monitoring dan Evalasi kebijakan pola mutasi internal

3) Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi

Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Melakukan upaya pengembangan kompetensi
- b. Memberikan kesempatan kepada Hakim dan Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Negeri Fakfak untuk mengikuti pengembangan kompetensi

4) Penetapan Kinerja Individu

Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Penerapan penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi
- b. Penerapan penetapan kinerja individu sesuai indikator level atasnya
- c. Penerapan penetapan kinerja individu secara periodik
- d. Hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakan atau diimplementasikan mulai dari penetapan, implementasi dan pemantauan.

5) Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai

Indikator ini memperhatikan Penerapan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai telah dilaksanakan

6) Sistem Informasi Kepegawaian

Indikator ini memperhatikan pemutakhiran Informasi Kepegawaian telah dilakukan secara berkala

4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Komponen Penguatan Akuntabilitas Kinerja memiliki Indikator sebagai berikut:

1) Keterlibatan Pimpinan

Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan perencanaan
- b. Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan penetapan kinerja
- c. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala

2) Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan yang telah berorientasi hasil
- b. Penerapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah memiliki kriteria Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant and Time Bound (SMART)
- c. Penyusunan Laporan Kinerja tepat waktu
- d. Peningkatan Kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas Kinerja

5. Penguatan Pengawasan

Komponen Penguatan Penguatan Pengawasan memiliki Indikator sebagai berikut :

- a. Public Campaign tentang Pengendalian Gratifikasi
 - b. Mengimplementasikan Pengendalian Gratifikasi
- 2) Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Membangun Lingkungan Pengendalian Unit Kerja
 - b. Mensosialisasikan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) kepada pihak terkait
- 3) Pengaduan Masyarakat
- Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Menerapkan Kebijakan Pengaduan Masyarakat
 - b. Menindaklanjuti Pengaduan Masyarakat
 - c. Monitoring dan Evaluasi Pengaduan Masyarakat
- 4) Whistle Blowing System
- Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Menerapkan Whistle Blowing System
 - b. Monitoring dan Evaluasi Penerapan Whistle Blowing System
 - c. Menindak lanjuti hasil Evaluasi Penerapan Whistle Blowing System
- 5) Penanganan Benturan Kepentingan
- Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
 - b. Mensosialisasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan
 - c. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Benturan Kepentingan
 - d. Menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan benturan kepentingan

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Komponen Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik memiliki Indikator sebagai berikut :

- 1) Standar Pelayanan Pengukuran Indikator :

Indikator ini memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

 - a. Penyusunan Standar Operasional Prosedure (SOP) Pelayanan
 - b. Menerapkan Standar Operasional Prosedure (SOP) Pelayanan
 - c. Melakukan reuiu Standar Operasional Prosedure (SOP) Pelayanan
 - d. Melakukan Sosialisasi Standar Operasional Prosedure (SOP) Pelayanan
 - e. Memiliki informasi tentang standar pelayanan yang mudah diakses melalui berbagai media
 - f. Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat
 - g. Monitoring dan Evaluasi Survey Kepuasan Masyarakat

3.2 TABEL RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

No	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET
1	2	3	4	5	6
1	MANAJEMEN PERUBAHAN	1. Penyusunan Tim Kerja	<p>a. Membuat Undangan Pembentukan Tim Kerja WBK/WBBM</p> <p>b. Rapat Pembentukan Tim Kerja WBK/WBBM</p> <p>c. Penentuan Anggota Tim Kerja WBK/WBBM</p> <p>d. Pengesahan Tim Kerja WBK/WBBM oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak</p>	<p>- Undangan pembentukan Tim Kerja WBK/WBBM</p> <p>- Notulen, Absensi Rapat, Foto Kegiatan / Dokumentasi Rapat</p> <p>- Berita Acara dan Mekanisme Seleksi Anggota Tim</p> <p>- SK Tim Kerja WBK/WBBM</p>	<p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p>
		2. Dokumen Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	a. Membuat Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	<p>- Undangan, Absensi, Foto Kegiatan / Dokumentasi Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM</p> <p>- Dokumen Laporan Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM</p>	100 %

			<p>b. Membuat Target-target Prioritas yang Relevan dengan Tujuan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Keputusan tentang Rencana pembangunan Zona Integritas dan Target Prioritas - Dokumen Rencana Aksi yang Berisi Target Prioritas - Dokumen laporan 	100 %
--	--	--	--	--	-------

		<p>c. Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Kepada Seluruh Aparatur Sipil Negara Pengadlan Negeri Fakfak dan Masyarakat dan Pembuatan Laporan Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM</p> <p>d. Melakukan <i>Public Campaign</i> Zona Integritas, Pembagian Stiker Anti Korupsi kepada Masyarakat.</p>	<p>Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Target Prioritas Zona Integritas</p>	<p>100 %</p>	
	<p>3. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM</p>	<p>a. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Secara Berkala (Bulanan) Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM</p>	<p>- Foto / Dokumentasi Sosialisasi Pencangangan Zona Intregitas Menuju WBK/WBBM dan Penandatanganan Komitmen Bersama</p> <p>- Spanduk dan Banner Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kerja</p> <p>- Capture Website, Media Sosial, Media Elektronik/Cetak</p> <p>- Dokumen laporan Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM</p> <p>- Dokumentasi Pembagian Stiker Anti Korupsi ke Masyarakat.</p>	<p>- Undangan, Notulen, Daftar Hadir dan Foto/Dokumentasi Kegiatan</p> <p>- Dokumen Laporan Berkala Hasil Monitoring dan Evaluasi Secara Bulanan</p> <p>- Laporan Tindak Lanjut Atas Laporan Monitoring dan Evaluasi</p>	<p>100 %</p>

		4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	a. Pemilihan Role Model diantara Pimpinan (Ketua Pengadilan Negeri, Hakim, pejabat Struktural dalam Pelaksanaan Pembangunan	- Undangan, Daftar Hadir, Berita Acara dan SK Penunjukan Role Model dan SK Role Model	100 %
--	--	---	--	--	--------------

			Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	- Dokumentasi Kegiatan Penunjukan Role Model	
			b. Pemilihan Agen Perubahan diantara Staf Mengacu Pada PERMENPAN RB Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah	- SK Penetapan Agen Perubahan	100 %
			c. Pembangunan Budaya Kerja dan Pola Pikir	- Kode Etik dan Perilaku Hakim, Panitera, Jurusita, Aparatur Sipil Negara - Pemberian Reward and Punishment - Laporan kegiatan Pembangunan Budaya Kerja dan Pola Pikir Meliputi : Dokumen, Absensi Pegawai - Program Reward and Punishment - Dokumen Pakta Integritas yang ditandatangani Seluruh Pegawai - Dokumentasi Apel Pagi dan Sore - Dokumentasi Rapat Bulanan - Dokumen Laporan Hasil Kegiatan Pembangunan Zona Integritas	100 %
II	PENATAAN TATA LAKSANA	1. Standar Operasional Procedure (SOP)	a. Penyusunan Standar Operasional Procedure (SOP) b. Penerapan Standar Operasional Procedure (SOP) c. Evaluasi Standar Operasional Procedure (SOP)	- Peta Bisnis Instansi - Dokumen Standar Operasional Procedure (SOP) - Dokumen Reviu Standar Operasional Procedure	100 %

			(SOP) yang di Tanda Tangani Ketua Pengadilan Negeri Fakfak	
	2. E-Office/E-Government	a. Penyusunan Sistem Pengukuran Kinerja Berbasis Sistem Informasi	<ul style="list-style-type: none"> - Undangan, Notulen, Daftar Hadir, Foto / Dokumentasi Rapat Bulanan - Aplikasi Komunikasi Data Nasional (KOMDANAS) - Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) - Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) - Aplikasi Persediaan - Aplikasi Gaji Pokok Pegawai (GPP) - Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS) 	100 %
		b. Penyusunan Sistem Kepegawaian Kinerja Berbasis Sistem Informasi	<ul style="list-style-type: none"> - Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) 	100 %
		c. Penyusunan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Sistem Informasi	<ul style="list-style-type: none"> - Website Resmi Pengadilan Negeri Fakfak - Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) - Aplikasi Sistem Pengawasan (SIWAS) - Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) - Aplikasi Indeks Kepuasan 	100 %

			<p>Masyarakat (IKM)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aplikasi Antrian Sidang - Aplikasi Antrian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 	
	3. Keterbukaan Informasi Publik	a. Penerapan Kebijakan Tentang Keterbukaan Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> - SK tentang Layanan Informasi - Banner tentang Penerapan Kebijakan Tentang Keterbukaan Informasi Publik - Brosur tentang Penerapan Kebijakan Tentang Keterbukaan Informasi Publik - Penerapan Kebijakan Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Media Sosial 	100 %
		b. Memiliki Website dengan Informasi Terkini yang Memudahkan Masyarakat Pencari Keadilan	<ul style="list-style-type: none"> - Capture Website Pengadilan Negeri Faktak 	100 %
		c. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> - Undangan, Notulen, Daftar Hadir, Foto / Dokumentasi Rapat 	100 %

				- Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik	
III	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA /SDM	1. Perencanaan Kebutuhan Pegawai Dengan Kebutuhan Organisasi	<p>a. Menyusun Analisa Kebutuhan Pegawai dalam Hal Rasio dan Beban Kerja dan Kualifikasi Pendidikan yang Mengacu Pada Peta Jabatan dan Hasil Analisis Beban Kerja</p> <p>b. Menyusun Monitoring dan Evaluasi Rencana Kebutuhan Pegawai</p>	<p>- Dokumen Analisa Kebutuhan Pegawai</p> <p>- Dokumen Rasio Beban Kerja Pegawai</p>	100 %
		2. Pola Mutasi Internal	<p>a. Penyusunan Kebijakan Pola Mutasi Internal</p> <p>b. Penerapan Kebijakan Pola Mutasi Internal</p> <p>c. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pola Mutasi Internal</p>	<p>- SK Badan Pertimbangan Pangkat dan Jabatan (BAPERJAKAT)</p> <p>- SK Mutasi Internal</p> <p>- Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pola Mutasi Internal</p>	100 %
		3. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	<p>a. Pengembangan Kompetensi (Capacity Building/Transfer Knowledge</p> <p>b. Menyusun Daftar Bagi Hakim dan Aparatur Sipil Negara untuk Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Maupun Pengembangan Kompetensi Lainnya</p> <p>c. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan</p>	<p>- Dokumen Pengiriman Hakim/ Aparatur Sipil Negara untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT)</p>	100 %
				- Dokumen Monitoring	100 %

		Pengembangan Profesi	dan Evaluasi Kegiatan Pengembangan Profesi	
	4. Penetapan Kinerja Individu	<p>a. Menyusun Penilaian Kinerja Individu</p> <p>b. Menyusun Pengukuran Kinerja Individu Telah Memiliki Kesesuaian dengan Indikator Kinerja Individu Level Atasnya</p>	<p>- Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)</p>	100 %
		<p>c. Menyusun Pengukuran Kinerja Individu Secara Periodik</p>	<p>- Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Triwulan</p>	100 %
		<p>d. Hasil Penilaian Penilaian Kinerja Individu Telah Diimplementasikan Mulai dari Penerapan Sampai Dengan Pemantauan</p>	<p>- Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)</p>	100 %
	5. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku	<p>a. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai Melalui Penerapan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai</p> <p>b. Sistem Informasi Kepegawaian Melalui Pemutakhiran Informasi Kepegawaian dilakukan Secara Terbuka</p>	<p>- Absensi Pegawai, Ijin Keluar Kantor</p> <p>- Dokumen Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP)</p>	100 %
	6. Sistem Informasi Kepegawaian Pada Unit Kerja Telah Di Mutakhirkan Secara Berkala	<p>a. Meningkatkan Ketepatan Terhadap Pengelolaan SDM Aparatur Pada Pengadilan Negeri Faktak</p>	<p>- Undangan, Notulen, Daftar Hadir, Foto / Dokumentasi Rapat</p> <p>- Dokumen Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Pemetaan Jabatan dan Analisis Beban Kerja</p> <p>- Surat Jalan kebutuhan</p>	100 %

				<ul style="list-style-type: none"> - Pegawai - Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai Baru - SK Mutasi/Rotasi Internal - Daftar Riwayat Pekerjaan (DRP) / Daftar Riwayat Hidup (DRH) 	100 %
		<p>b. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan SDM Aparatur Pada Pengadilan Negeri Fakfak</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Monitoring dan Evaluasi Terhadap Kegiatan Mutasi - Dokumen Aplikasi Sistem Informasi Kepegawain (SIKEP) 		100 %
		<p>c. Meningkatkan Disiplin SDM Aparatur Pada Pengadilan Negeri Fakfak</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Daftar Absensi Hakim dan Pegawai 		100 %
		<p>d. Meningkatkan Efektivitas SDM Aparatur Pada Pengadilan Negeri Fakfak</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Daftar Urut Keangkatan (DUK), Daftar Urut Senioritas (DUS) 		100 %
		<p>e. Meningkatkan Profesionalisme SDM Aparatur Pada Pengadilan Negeri Fakfak</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Rencana Pengembangan Kompetensi - Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) - Surat Kepada pegawai Yang Akan Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) / Pengembangan Kompetensi - Surat Usulan pegawai Yang Akan Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) / Pengembangan 		100 %

			<p>Kompetensi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Daftar Pegawai Yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) / Pengembangan Kompetensi - Dokumen Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pengembangan Kompetensi - Dokumen Pengukuran Kinerja Individu Per Bulan 	
<p>IV PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</p>	<p>1. Keterlibatan Pimpinan</p>	<p>a. Mengadakan Rapat Perencanaan dan Anggaran.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Undangan, Notulen, Daftar Hadir, Foto / Dokumentasi Rapat - Dokumen Perencanaan Kegiatan dan Anggaran - Dokumen Perjanjian Kinerja 	<p>100 %</p>
	<p>2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja</p>	<p>b. Menyusun Dokumen Perencanaan c. Menyusun Indikator Kinerja Utama d. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) e. Menyusun Rencana Kerja Tahunan, Rencana Strategis (Resntra), Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja) f. Menyusun Standar Operasional Prosedure (SOP) Pelayanan g. Membuat Aplikasi Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) h. Menyusun SK Pengendalian Gratisfikasi i. <input type="radio"/>nyusun Sistem Pengawasan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Undangan, Notulen, Daftar Hadir, Foto / Dokumentasi Rapat Bulanan - Dokumen Perencanaan yang Telah Berorientasi Hasil - Indikator Kinerja Utama (IKU) - Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) - Dokumen Rencana Kerja Tahunan - Rencana Strategis (Resn <input type="radio"/>) 	<p>100 %</p>

			<p>j. Internal Pemerintah (SPIP) Menyusun Standar Operasional Procedure (SOP) Penanganan Pengaduan Masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja) - Dokumen Standar Operasional Procedure (SOP) Pelayanan - Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat - SK Pengendalian Gratifikasi - SK Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) - Standar Operasional Procedure (SOP) Penanganan Pengaduan Masyarakat 	
V	PENGUATAN PENGAWASAN	<p>1. Pengendalian Gratifikasi</p>	<p>a. Menyusun Public Campaign tentang Pengendalian Gratifikasi</p> <p>b. Menyusun Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - SK Pengendalian Gratifikasi - Capture Banner/Spanduk/Media Public Campaign - Capture Close Circuit Television (CCTV) - Bukti Pengiriman (LHKASN) 	100 %
		<p>2. Pengawasan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)</p>	<p>a. Menyusun Analisis Resiko Pengaduan Negeri Faktak</p> <p>b. Melakukan Sosialisasi dan Mengimplementasikan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah</p>	<ul style="list-style-type: none"> - SK Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) - Dokumen Matrik Identifikasi Resiko - Dokumen Analisis Resiko - Dokumen Level Resiko - Dokumen Laporan Pengendalian Resiko - Undangan, Notulen, Daftar Hadir, Foto / Dokumentasi Rapat 	100 %

		(SPIP)		
	3. Pengaduan Masyarakat	<p>a. Layanan Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi dan Media Sosial</p> <p>b. Tindak Lanjut Hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat</p> <p>c. Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> - SK Petugas pengaduan Masyarakat - Foto/Dokumentasi Petugas/Ruang/Loket/Kotak Khusus Pengaduan - Foto/Dokumentasi Spanduk/Banner - Informasi Sarana Pengaduan - Capture Aplikasi Sistem Pengawasan (SIWAS) - Capture Pengaduan Melalui Media Sosial - Capture Respon Pengaduan Masyarakat - Bukti Penyampaian Pengaduan Masyarakat Kepada Bagian terkait - Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi laporan Pengaduan Tiap Bulan - Dokumen Laporan Tindak Lanjut Pengaduan 	100 %
	4. Whistle Blowing System (WBS)	<p>a. Menyusun SK dan Standar Operasional Procedure (SOP) Whistle Blowing System (WBS)</p> <p>b. Mensosialisasikan Whistle Blowing System (WBS)</p> <p>c. Menyusun Laporan Evaluasi dan Tindak Lanjut Atas Penerapan Whistle Blowing System (WBS)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - SK Whistle Blowing System (WBS) - Standar Operasional Procedure (SOP) Whistle Blowing System (WBS) - Foto/Dokumentasi Kegiatan Whistle Blowing System (WBS) - Dokumen Laporan Evaluasi dan Tindak Lanjut Atas Penerapan 	100 %

				Whistle Blowing System (WBS)	
		5. Penanganan Benturan Kepentingan	<p>a. Mengidentifikasi Benturan Kepentingan dalam Tugas dan Fungsi Utama</p> <p>b. Mensosialisasikan Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan</p> <p>c. Mengimplementasikan Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan</p> <p>d. Menyusun Laporan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan</p> <p>e. Menyusun Tindak Lanjut Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Identifikasi/Pemetaan Benturan Kepentingan - Dokumen Surat Pernyataan Bebas dari Benturan Kepentingan - Undangan, Notulen, Daftar Hadir, Foto / Dokumentasi Rapat - Dokumen Laporan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan - Dokumen Tindak Lanjut Hasil Laporan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan 	100 %
VI	PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	1. Standar Pelayanan Pengukuran Indikator	<p>a. Menyusun Standar Pelayanan Minimal</p> <p>b. Menyusun Maklumat Standar Pelayanan</p> <p>c. Menyusun Standar Operasional Prosedure (SOP) Standar Pelayanan</p> <p>d. Mereviu Standar Operasional Prosedure (SOP) Standar Pelayanan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Standar Pelayanan - Capture Maklumat Standar Pelayanan - Dokumen Standar Operasional Prosedure (SOP) Standar Pelayanan - Dokumen Reviu Standar Operasional Prosedure (SOP) Standar Pelayanan 	100 %

	<p>e. Melakukan Sosialisasi/Pelatihan Pelayanan Prima kepada Pegawai Pengadilan Negeri Faktak</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Undangan, Notulen, Daftar Hadir, Foto / Dokumentasi Rapat
	<p>f. Menyediakan Informasi yang Mudah Diakses Oleh Masyarakat Melalui Media Cetak, Papan Pengumuman, Media Sosial, Website dan lain-lain</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Capture Website Pengadilan Negeri Faktak - Capture Sistem Informasi Pelayanan Perkara (Sipp) - Capture Direktori Putusan - Capture Akun Instagram Resmi Pengadilan Negeri Faktak - Capture Channel Youtube Resmi Pengadilan Negeri Faktak - Capture Banner Dan Figura Pelayanan
	<p>g. Menyediakan Penghargaan (Reward) dan Saksi (Punishment)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Penghargaan Pegawai Teladan (Role Model) - Dokumen Sanksi (Punishment) Pegawai
	<p>h. Pemberian Kompensasi Bagi Pelaksana Layanan Bila Layanan Yang Diberikan Tidak Sesuai Standar</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Pemberian Kompensasi Bagi Pelaksana Layanan Bila Layanan Yang Diberikan Tidak Sesuai Standar
	<p>i. Menyediakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Capture Aplikasi Antrian Sidang - Capture Aplikasi Antrian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

BAB IV PENUTUP

Unit kerja berpredikat WBK/WBBM merupakan *outcome* dari upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan secara konkrit di dalam lingkup Zona Integritas.

Pengembangan WBK/WBBM secara bertahap sejalan dengan konsep *Island of Integrity*. Diharapkan, upaya ini akan menjadi bagian dari upaya yang dapat meningkatkan nilai IPK Indonesia. Untuk itu diperlukan upaya dan pendekatan yang proaktif dalam rangka memperlihatkan kepada dunia internasional/global, bahwa upaya pencegahan korupsi di Indonesia dilakukan secara kontinyu dan komprehensif.

Pedoman ini bersifat dinamis, dalam arti ketentuan-ketentuan di dalamnya dapat diubah sesuai kebutuhan berdasarkan perkembangan lingkungan strategis yang ada. Indikator dalam rangka penetapan predikat menuju WBK/WBBM diharapkan secara bertahap dapat diubah sehingga semakin mengarah kepada zero tolerance approach dalam pemberantasan korupsi.

CHEKLIST

NO. 3.b

**MONITORING DAN
EVALUASI
PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS**



PENGADILAN NEGERI FAKFAK KELAS II

JLN. YOS SUDARSO NO.92

TLP. (0956) 22413 FAKFAK

Website. www.pn-fakfak.go.id

Email : pengadilan_negeri_fakfak@yahoo.co.id

Fakfak, 11 Februari 2022

UNDANGAN

<u>AGENDA ACARA</u> RAPAT PENGECEKAN KELENGKAPAN DOKUMEN DAN TINDAK LANJUT PADA AREA I MANAJEMEN PERUBAHAN	<u>PIMPINAN RAPAT</u> IRANDA CARECA ANINDITYO, S.H.
<u>WAKTU PELAKSANAAN</u> HARI : SENIN TANGGAL : 14 FEBRUARI 2022 PUKUL : 10.00 WIT	<u>PETUGAS</u> NOTULIS : YENI ANGGRAINI, S.Sos. DOKUMENTASI : WINDI YUNITA SARI NAINGGOLAN, S.H.
<u>TEMPAT RAPAT</u> RUANG PIDANA PNF	
<u>PESERTA RAPAT</u> SELURUH APARATUR TIM AREA I MANAJEMEN PERUBAHAN	
<u>SIFAT</u> <ol style="list-style-type: none">1. Harus Diikuti Oleh Seluruh Peserta Rapat.2. Hadir Diruang Rapat 5 (lima) Menit Sebelum Acara di Mulai3. Mematuhi Protokol Kesehatan (3M)	
KOORDINATOR AREA I TTD <u>IRANDA CARECA ANINDITYO., S.H.</u> NIP. 19900311 201712 1 003	

**RAPAT PENGECEKAN KELENGKAPAN DOKUMEN DAN TINDAK LANJUT
PADA AREA I MANAJEMEN PERUBAHAN**

HARI / TANGGAL MONITORING	Senin, 14 Februari 2022			KETERANGAN LAMPIRAN	
LOKASI MONITORING	Ruang Pidana Pengadilan Negeri Fakfak			<input checked="" type="checkbox"/>	-
WAKTU MULAI	10.00 WIT	SELESAI	10.30 WIT	<input checked="" type="checkbox"/>	Pengumuman
POKOK BAHASAN	Rapat pengecekan kelengkapan dokumen dan tindak lanjut Pada area I manajemen perubahan			<input checked="" type="checkbox"/>	Daftar Hadir
PEMATERI	-			<input checked="" type="checkbox"/>	Dokumentasi
MODERATOR	Iranda Careca Anindityo., S.H				Internal Memo
NOTULEN	Yeni Anggraini, S.Sos			Beri tanda berikut	<input checked="" type="checkbox"/>
RAPAT PENGECEKAN KELENGKAPAN DOKUMEN DAN TINDAK LANJUT PADA AREA I MANAJEMEN PERUBAHAN					

A. PEMBUKAAN

Pada hari ini Senin tanggal 14 Februari 2022 pukul 10.00 WIT, bertempat di Ruang Pidana Pengadilan Negeri Fakfak dilaksanakan rapat pengecekan kelengkapan dokumen dan tindak lanjut pada Area I Manajemen Perubahan oleh Koordinator Area I Manajemen Perubahan (Bapak Iranda Careca Anindityo, SH)

B. PEMBAHASAN

Membahas tentang :

- Pungging box yang harus diperbaharui.
- Target prioritas.
- Dokumen apel dan rapat bulanan.
- Laporan monitoring dan evaluasi.
- Monitoring dan evaluasi tindak lanjut.
- Dokumen pelatihan.

C. PENUTUP

Demikian notulen rapat pada hari ini dibuat, dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notulen



YENI ANGGRAINI, S.Sos

Koordinator Zona Integritas Area I



IRANDA CARECA ANINDITYO., S.H.
NIP. 19900311 201712 1 003



PENGADILAN NEGERI FAKFAK KELAS II

Jalan Yos Sudarso No.92 Fakfak

Tlp : (0956) 22413 FAX : (0956) 22413

Website : www.pn-fakfak.go.id

Email : pengadilan_negeri_fakfak@yahoo.co.id

DAFTAR HADIR

RAPAT PENGECEKAN KELENGKAPAN DOKUMEN DAN TINDAK LANJUT

PADA AREA I MANAJEMEN PERUBAHAN FEBRUARI 2022

Senin, 14 Februari 2022

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Iranda Careca A	Koordinator	
2	JOHAKUS SIATAYA	SEKRETARIS	
3	Riando .T	Anggota	
4	Yeni A	Anggota	AM
5	Robertho - Tawirasaru	Anggota	

KOORDINATOR AREA I



IRANDA CARECA ANINDITYO., S.H.

NIP. 19900311 201712 1 003

DOKUMENTASI



[Handwritten signature]



PENGADILAN NEGERI FAKFAK KELAS II

JLN. YOS SUDARSO NO.92

TLP. (0956) 22413 FAKFAK

Website. www.pn-fakfak.go.id

Email : pengadilan_negeri_fakfak@yahoo.co.id

Fakfak, 10 Januari 2022

UNDANGAN

<u>AGENDA ACARA</u> MONITORING EVALUASI ZONA INTEGRITAS AREA I MANAJEMEN PERUBAHAN JANUARI 2022	<u>PIMPINAN RAPAT</u> IRANDA CARECA ANINDITYO, S.H.
<u>WAKTU PELAKSANAAN</u> HARI : SELASA TANGGAL : 11 JANUARI 2021 PUKUL : 15.00 WIT	<u>PETUGAS</u> NOTULIS : YENI ANGGRAINI, S.Sos. DOKUMENTASI : YULIAN RISKI ANANDA, A.md.AB
<u>TEMPAT RAPAT</u> RUANG MEDIASI PNF	
<u>PESERTA RAPAT</u> SELURUH APARATUR TIM AREA I MANAJEMEN PERUBAHAN	
<u>SIFAT</u> <ol style="list-style-type: none">1. Harus Diikuti Oleh Seluruh Peserta Rapat.2. Hadir Diruang Rapat 5 (lima) Menit Sebelum Acara di Mulai3. Mematuhi Protokol Kesehatan (3M)	
KOORDINATOR AREA I TTD <u>IRANDA CARECA ANINDITYO., S.H.</u> NIP. 19900311 201712 1 003	

HARI / TANGGAL MONITORING	Selasa, 11 Januari 2022			KETERANGAN LAMPIRAN	
LOKASI MONITORING	Ruang Mediasi Pengadilan Negeri Fakfak			<input checked="" type="checkbox"/>	-
WAKTU MULAI	10.00 WIT	SELESAI	10.30 WIT	<input checked="" type="checkbox"/>	Pengumuman
POKOK BAHASAN	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Rencana Kerja Zona Integritas PN Fakfak			<input checked="" type="checkbox"/>	Daftar Hadir
PEMATERI	-			<input checked="" type="checkbox"/>	Dokumentasi
MODERATOR	Iranda Careca Anindityo., S.H				Internal Memo
NOTULEN	Yeni Anggraini, S.Sos			Beri tanda berikut	<input checked="" type="checkbox"/>
RAPAT PENYUSUNAN RENCANA KERJA ZONA INTEGRITAS					

A. PEMBUKAAN

Pada hari ini Selasa tanggal 11 Januari 2022 pukul 10.00 WIT, bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Negeri Fakfak dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Rencana Kerja Zona Integritas oleh Koordinator Area I Manajemen Perubahan (Iranda Careca Anindityo, SH)

B. PEMBAHASAN

Membahas tentang rencana kerja area I manajemen perubahan sesuai dengan checklist serta rencana kerja untuk perubahan-perubahan pada area I manajemen perubahan.

C. PENUTUP

Demikian notulen rapat pada hari ini dibuat, dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notulen



YENI ANGGRAINI, S.Sos

Koordinator Zona Integritas Area I



IRANDA CARECA ANINDITYO., S.H.
NIP. 19900311 201712 1 003



PENGADILAN NEGERI FAKFAK KELAS II

Jalan Yos Sudarso No.92 Fakfak

Tlp : (0956) 22413 FAX : (0956) 22413

Website : www.pn-fakfak.go.id

Email : pengadilan_negeri_fakfak@yahoo.co.id

DAFTAR HADIR

MONITORING DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS AREA I

MANAJEMEN PERUBAHAN JANUARI 2022

Selasa, 11 Januari 2022

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1	IRANDA CARECA ANINDITYO	KOORDINATOR	
2	JOHANIS SIAHAYA	SEKRETARIS	
3	Yeni. A.	Anggota	
4	IRIANTO.T	Anggota	
5	Robertus. Tomipatum	Anggota	

KOORDINATOR AREA I

IRANDA CARECA ANINDITYO., S.H.

NIP. 19900311 201712 1 003

DOKUMENTASI





PENGADILAN NEGERI FAKFAK KELAS II

JLN. YOS SUDARSO NO.92

TLP. (0956) 22413 FAKFAK

Website. www.pn-fakfak.go.id

Email : pengadilan_negeri_fakfak@yahoo.co.id

Fakfak, 16 Desember 2021

UNDANGAN

<u>AGENDA ACARA</u> MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS	<u>PIMPINAN RAPAT</u> IRANDA CARECA ANINDITYO, S.H.
<u>WAKTU PELAKSANAAN</u> HARI : RABU TANGGAL : 17 DESEMBER 2021 PUKUL : 15.00 WIT	<u>PETUGAS</u> NOTULIS : YENI ANGGRAINI, S.Sos. DOKUMENTASI : WINDI YUNITA SARI NAINGGOLAN, S.H.
<u>TEMPAT RAPAT</u> RUANG MEDIASI PNF	
<u>PESERTA RAPAT</u> SELURUH APARATUR TIM AREA I MANAJEMEN PERUBAHAN	
<u>SIFAT</u> <ol style="list-style-type: none">1. Harus Diikuti Oleh Seluruh Peserta Rapat.2. Hadir Diruang Rapat 5 (lima) Menit Sebelum Acara di Mulai3. Mematuhi Protokol Kesehatan (3M) <p style="text-align: center;">KOORDINATOR AREA I</p> <p style="text-align: center;">TTD</p> <p style="text-align: center;"><u>IRANDA CARECA ANINDITYO., S.H.</u> NIP. 19900311 201712 1 003</p>	



PENGADILAN NEGERI FAKFAK KELAS II

Jalan Yos Sudarso No.92 Fakfak


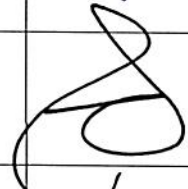


Tlp : (0956) 22413 FAX : (0956) 22413

Website : www.pn-fakfak.go.id

Email : pengadilan_negeri_fakfak@yahoo.co.id

DAFTAR HADIR
MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DESEMBER 2021

Jumat, 17 Desember 2021

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1	IRANDA CARECA A	KOORDINATOR	
2	IRIANTO . T	anggota	
3	Robertus . Tawirata	anggota	
4	Yeni . A.	anggota	
5			

KOORDINATOR AREA I



IRANDA CARECA ANINDITYO., S.H.

NIP. 19900311 201712 1 003

HARI / TANGGAL RAPAT	Jumat, 17 Desember 2021		KETERANGAN LAMPIRAN	
LOKASI RAPAT	Ruang Mediasi Pengadilan Negeri Fakfak		<input checked="" type="checkbox"/>	DAFTAR HADIR
MULAI WAKTU RAPAT	14.00 WIT	SELESAI	14.30 WIT	<input type="checkbox"/> INTERNAL MEMO
POKOK BAHASAN	1	Tindak lanjut		Beri Tanda berikut <input checked="" type="checkbox"/>
	2	Pengecekan Dokumen		
	3	-		
PEMIMPIN RAPAT	1	Iranda Careca Anindityo, S.H.		
MODERATOR	2	-		
NOTULEN	3	Irianto Tanggahma, S.H.		

**RAPAT TINDAK LANJUT DAN PENGECEKAN DOKUMEN
PADA AREA I MANAJEMEN PERUBAHAN**

Pada hari Jumat, tanggal 17 Desember 2021 bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Negeri Fakfak dilaksanakan Rapat Tindak Lanjut dan Pengecekan Dokumen Kerja pada Area I Manajemen Perubahan Pengadilan Negeri Fakfak atas monitoring dokumen yang belum lengkap oleh Koordinator Area I Manajemen Perubahan Bapak Iranda Careca Anindityo, S.H.

Berikut hasil rapat Rapat Tindak Lanjut dan Pembagian Tugas Kerja pada Area I Manajemen Perubahan:

1. Berdasarkan rapat yang dilaksanakan sebelumnya, telah dilengkapi beberapa dokumen yang belum ada;
2. Atas hasil tersebut, perlu adanya pemeliharaan dokumen lebih lanjut serta perlu adanya perencanaan yang matang untuk perubahan ditahun 2022 mendatang, selain itu koordinator mengingatkan agar tim dapat bekerja sama dan saling melengkapi.

Demikian notulen rapat pada hari ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Terimakasih.

NOTULEN

NAMA LENGKAP & TTD



IRIANTO TANGGAHMA, S.H.

**KOORDINATOR AREA I
MANAJEMEN PERUBAHAN**

NAMA LENGKAP & TTD



IRANDA CARECA ANINDITYO, S.H.

DOKUMENTASI



MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK DAN WBBM
PADA PENGADILAN NEGERI FAKFAK
BULAN: MARET 2022

PROGRAM: MANAJEMEN PERUBAHAN

NO	INDIKATOR	KEGIATAN	TARGET	PELAKSANAAN	REALISASI	KENDALA/HAMBATAN	KESIMPULAN/ REKOMENDASI
1	Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas	<ol style="list-style-type: none"> Membuat undangan tentang rapat pembentukan tim kerja pembangunan zona integritas Melaksanakan pemilihan tim kerja melalui mekanisme musyawarah yang dihadiri oleh seluruh aparat Membuat Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas 	100%	<ul style="list-style-type: none"> Telah dilaksanakan rapat pembentukan tim kerja pembangunan Zona Integritas yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 dengan diikuti oleh Seluruh Aparatur Pengadilan Negeri Fakfak. Dalam pelaksanaannya telah dilakukan pemilihan koordinator Area dan anggotanya sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimilikinya. Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung berupa: undangan, notulensi, daftar hadir dan dokumentasi. 	100%	Tidak ada kendala dan hambatan	<p>Rekomendasi: Penentuan anggota tim kerja seyogyanya berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh Pimpinan Pengadilan Negeri Fakfak lalu kemudian ditentukan siapa saja dari aparatur Pengadilan Negeri Fakfak yang kompeten untuk ditunjuk sebagai koordinator Area ZI berikut masing-masing anggota dengan data dukung: Undangan Rapat pembentukan Tim ZI, daftar hadir, notulen hasil rapat, dokumentasi kegiatan, checklist kriteria dan hasil penilaian serta SK Standar Kriteria Pemilihan Tim Pembangunan ZI</p>
2	Kelengkapan dokumen rencana pembangunan zona integritas	<ol style="list-style-type: none"> Membuat undangan tentang rapat penyusunan rencana kerja pembangunan zona integritas Pengadilan Negeri Fakfak Melaksanakan rapat membahas tentang rencana kerja pembangunan zona integritas Membuat rencana 	100%	<ul style="list-style-type: none"> Telah dilaksanakan rapat penyusunan rencana kerja pembangunan Zona Integritas pada bulan Januari 2022 yang diikuti oleh Koordinator Area I Manajemen Perubahan dan anggotanya. Dalam pelaksanaan tersebut 	90%	Tidak ada kendala dan hambatan	<p>Rekomendasi: Sosialisasi pembangunan Zona Integritas dapat melalui website Pengadilan, media sosial Pengadilan atau dengan media lain yang dapat didengarkan oleh masyarakat umum.</p>

		<p>aksi/rencana kerja pembangunan zona integritas</p> <ol style="list-style-type: none"> Membuat tabel skala prioritas dalam rencana kerja pembangunan Zona Integritas Membuat SK Ketua Pengadilan Negeri Faktak tentang Rencana Kerja Tim Pembangunan Zona Integritas Mensosialisasikan kegiatan pembangunan Zona Integritas melalui media 		<p>telah disetujui beberapa kegiatan yang akan dilakukan oleh Area I Manajemen Perubahan dari bulan Januari hingga Desember 2022. Kegiatan tersebut dilengkapi daya dukung berupa: undangan, notulensi, daftar hadir dan dokumentasi</p> <p>Telah dibuatkan SK mengenai Rencana Kerja Tim Pembangunan Zona Integritas</p>			
3	<p>Pemantauan dan evaluasi pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM</p>	<ol style="list-style-type: none"> Membuat dokumen rencana pembangunan zona integritas Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pembangunan zona integritas setiap bulan Membuat dokumen monitoring dan evaluasi pembangunan Zona Integritas Membuat laporan tindak lanjut atas kegiatan pembangunan zona integritas 	100%	<ul style="list-style-type: none"> Telah membuat dokumen rencana kerja tahun 2022 yang kemudian dilampirkan di Box Area I Manajemen Perubahan Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi atas pembangunan zona integritas secara berkala yaitu setiap bulannya yang diikuti oleh Koordinator Area dan anggota-anggotanya Telah membuat dokumen monitoring dan evaluasi pembangunan Zona Integritas 	60%	<p>Laporan tindak lanjut atas kegiatan pembangunan Zona Integritas belum dilampirkan</p>	<p>Rekomendasi:</p> <p>Agar laporan tindak lanjut dapat dilampirkan kedalam dokumen pemantauan dan evaluasi pembangunan Zona Integritas</p>
4	<p>Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja</p>	<ol style="list-style-type: none"> Membuat pimpinan sebagai <i>Role Model</i> dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Melaksanakan rapat untuk menetapkan agen perubahan, reward dan 	100%	<ul style="list-style-type: none"> Telah menetapkan pimpinan sebagai <i>role model</i> berdasarkan SK Ketua Pengadilan Negeri Faktak tentang Role Model Telah membuat program kerja untuk 	40%	<ul style="list-style-type: none"> Belum ditetapkan mengenai role model dan agen perubahan untuk tahun anggaran 2022 Pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> belum dilaksanakan 	<p>Rekomendasi:</p> <p>Agar dilengkapi dengan rencana aksi dari agen perubahan dan memedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia</p>

	<p>3. Membuat program kerja untuk membangun budaya kerja dan pola pikir organisasi</p> <p>4. Melibatkan seluruh anggota organisasi dalam pembangunan zona integritas</p>	membangun budaya kerja dan pola pikir organisasi				<p>Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah.</p> <p>Penetapan Agen Perubahan seharusnya tidak berhenti hanya dengan sebuah penetapan (SK), Berita Acara dsb. Perlu adanya proses kesinambungan akan pentingnya ditetapkan agen perubahan yang tercermin dengan adanya visi misi berupa beragam agenda rencana aksi dari sang agen perubahan tersebut dan juga diperlukan peranan pimpinan untuk memantau dan memastikan rencana aksi dari agen perubahan telah terlaksana dengan baik</p>
--	--	--	--	--	--	--

MENGETAHUI:
KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK


 Tri Margono, S.H.

**KOORDINATOR AREA 1 ZONA INTEGRITAS
 MANAJEMEN PERUBAHAN**


 Iranda Careca Anindityo, S.H.

FAKFAK, 8 MARET 2022

MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK DAN WBBM
PADA PENGADILAN NEGERI FAKFAK
BULAN: MARET 2022

PROGRAM: MANAJEMEN PERUBAHAN

NO	INDIKATOR	KEGIATAN	TARGET	PELAKSANAAN	REALISASI	KENDALA/HAMBATAN	KESIMPULAN/ REKOMENDASI
1	Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas	<ol style="list-style-type: none"> Membuat undangan tentang rapat pembentukan tim kerja pembangunan zona integritas Melaksanakan pemilihan tim kerja melalui mekanisme musyawarah yang dihadiri oleh seluruh aparat Membuat Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas 	100%	- Telah dilaksanakan rapat pembentukan tim kerja pembangunan Zona Integritas yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 dengan diikuti oleh Seluruh Aparatur Pengadilan Negeri Fakfak. Dalam pelaksanaannya telah dilakukan pemilihan koordinator Area dan anggotanya sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimilikinya. Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung berupa: undangan, notulensi, daftar hadir dan dokumentasi.	100%	Tidak ada kendala dan hambatan	<p>Rekomendasi: Penentuan anggota tim kerja seyogyanya berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh Pimpinan Pengadilan Negeri Fakfak lalu kemudian ditentukan siapa saja dari aparatur Pengadilan Negeri Fakfak yang kompeten untuk ditunjuk sebagai koordinator Area ZI berikut masing-masing anggota dengan data dukung: Undangan Rapat pembentukan Tim ZI, daftar hadir, notulen hasil rapat, dokumentasi kegiatan, checklist kriteria dan hasil penilaian serta SK Standar Kriteria Pemilihan Tim Pembangunan ZI</p>
2	Kelengkapan dokumen rencana pembangunan zona integritas	<ol style="list-style-type: none"> Membuat undangan tentang rapat penyusunan rencana kerja pembangunan zona integritas Pengadilan Negeri Fakfak Melaksanakan rapat membahas tentang rencana kerja pembangunan zona integritas Membuat rencana 	100%	- Telah dilaksanakan rapat penyusunan rencana kerja pembangunan Zona Integritas pada bulan Januari 2022 yang diikuti oleh Koordinator Area I Manajemen Perubahan dan anggotanya. Dalam pelaksanaan tersebut	90%	Tidak ada kendala dan hambatan	<p>Rekomendasi: Sosialisasi pembangunan Zona Integritas dapat melalui website Pengadilan, media sosial Pengadilan atau dengan media lain yang dapat didengarkan oleh masyarakat umum.</p>

		aksi/rencana kerja pembangunan zona integritas		telah disetujui beberapa kegiatan yang akan dilakukan oleh Area I Manajemen Perubahan dari bulan Januari hingga Desember 2022. Kegiatan tersebut dilengkapi daya dukung berupa: undangan, notulensi, daftar hadir dan dokumentasi			
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Membuat tabel skala prioritas dalam rencana kerja pembangunan Zona Integritas 5. Membuat SK Ketua Pengadlian Negeri Faktak tentang Rencana Kerja Tim Pembangunan Zona Integritas 6. Mensosialisasikan kegiatan pembangunan Zona Integritas melalui media 		<ul style="list-style-type: none"> - Telah dibuatkan SK mengenai Rencana Kerja Tim Pembangunan Zona Integritas 			
3	Pemantauan dan evaluasi pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat dokumen rencana pembangunan zona integritas 2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pembangunan zona integritas setiap bulan 3. Membuat dokumen monitoring dan evaluasi pembangunan Zona Integritas 4. Membuat laporan tindak lanjut atas kegiatan pembangunan zona integritas 	100%	<ul style="list-style-type: none"> - Telah membuat dokumen rencana kerja tahun 2022 yang kemudian dilampirkan di Box Area I Manajemen Perubahan - Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi atas pembangunan zona integritas secara berkala yaitu setiap bulannya yang diikuti oleh Koordinator Area dan anggota-anggotanya - Telah membuat dokumen monitoring dan evaluasi pembangunan Zona Integritas 	60%	Laporan tindak lanjut atas kegiatan pembangunan Zona Integritas belum dilampirkan	<p>Rekomendasi:</p> <p>Agar laporan tindak lanjut dapat dilampirkan kedalam dokumen pemantauan dan evaluasi pembangunan Zona Integritas</p>
4	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat pimpinan sebagai <i>Role Model</i> dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas 2. Melaksanakan rapat untuk menetapkan agen perubahan, reward dan 	100%	<ul style="list-style-type: none"> - Telah menetapkan pimpinan sebagai <i>role model</i> berdasarkan SK Ketua Pengadlian Negeri Faktak tentang Role Model - Telah membuat program kerja untuk 	40%	<ul style="list-style-type: none"> - Belum ditetapkan mengenai role model dan agen perubahan untuk tahun anggaran 2022 - Pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> belum dilaksanakan 	<p>Rekomendasi:</p> <p>Agar dilengkapi dengan rencana aksi dari agen perubahan dan memedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia</p>

	<p>punishment</p> <p>3. Membuat program kerja untuk membangun budaya kerja dan pola pikir organisasi</p> <p>4. Melibatkan seluruh anggota organisasi dalam pembangunan zona integritas</p>	membangun budaya kerja dan pola pikir organisasi			<p>Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah.</p> <p>Penetapan Agen Perubahan seharusnya tidak berhenti hanya dengan sebuah penetapan (SK), Berita Acara dsb. Perlu adanya proses kesinambungan akan pentingnya ditetapkan agen perubahan yang tercermin dengan adanya visi misi berupa beragam agenda rencana aksi dari sang agen perubahan tersebut dan juga diperlukan peranan pimpinan untuk memantau dan memastikan rencana aksi dari agen perubahan telah terlaksana dengan baik</p>
--	--	--	--	--	--

MENGETAHUI:
KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK



Tri Margono, S.H.

**KOORDINATOR AREA I ZONA INTEGRITAS
MANAJEMEN PERUBAHAN**



Iranda Careca Ahindityo, S.H.

FAKFAK, 8 MARET 2022

DOKUMEN TARGET PRIORITAS PROGRAM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

PENGADILAN NEGERI FAKFAK

No	Target Prioritas
1	2
1	Pembentukan Tim Zona Integritas
2	Menyusun dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
3	Sosialisasi Program Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
4	Penguatan komitmen pembangunan Zona Integritas.
5	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Zona Integritas melalui pemantauan kegiatan strategis Pengadilan Negeri Faktak, tindak lanjut hasil audit internal maupun eksternal Akreditasi Penjaminan Mutu pelaksanaan pembinaan Sistem Manajemen Mutu, serta penerapan standar pelayanan public.
6	Pelaksanaan Pelatihan peningkatan SDM
7	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi SOP kegiatan
8	Peningkatan disiplin dan profesionalisme pegawai.
9	Menyusun kegiatan dan penganggaran kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.
10	Peningkatan akuntabilitas kinerja
11	Pelaksanaan pengawasan internal melalui Sistem Pengendalian Intern
12	Peningkatan kepatuhan pengelolaan Keuangan Negara melalui laporan keuangan
13	Menetapkan Agen Perubahan dan Role Model pada Pengadilan Negeri Faktak
14	Melaksanakan pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> kepada Aparatur Pengadilan
15	Meningkatkan partisipasi pegawai agar terlibat dalam Program Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
16	Pelaporan kegiatan TIM ZI.

MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK DAN WBBM
PADA PENGADILAN NEGERI FAKFAK
BULAN: FEBRUARI 2022

PROGRAM: MANAJEMEN PERUBAHAN

NO	INDIKATOR	KEGIATAN	TARGET	PELAKSANAAN	REALISASI	KENDALA/HAMBATAN	KESIMPULAN/ REKOMENDASI
1	Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas	<ol style="list-style-type: none"> Membuat undangan tentang rapat pembentukan tim kerja pembangunan zona integritas Melaksanakan pemilihan tim kerja melalui mekanisme musyawarah yang dihadiri oleh seluruh aparat Membuat SK Ketua Pengadilan Negeri Fakfak tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas 	100%	<p>- Untuk sementara ini dokumen mengenai pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas masih menggunakan dokumen tahun 2021 dikarenakan sejauh ini belum terdapat arahan atau imbauan dari Pimpinan mengenai pembentukan tim kerja zona integritas tahun 2022</p>	100%	Tidak ada kendala dan hambatan	<p>Kesimpulan: Pelaksanaan pembentukan tim kerja pembangunan zona integritas pada tahun sebelumnya telah dilaksanakan dengan menggunakan metode musyawarah mufakat yang diikuti oleh seluruh anggota organisasi dan telah disepakati koordinator tiap area dan anggotanya serta telah dikuatkan dengan dibuatkannya SK Ketua Pengadilan Negeri Fakfak tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas</p> <p>Rekomendasi: Agar proses pembentukan dengan metode musyawarah mufakat dapat dipertahankan dengan diikuti oleh seluruh anggota organisasi dan dilakukan <i>eviden</i> pelaksanaannya</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat undangan tenta rapat rencana kerja pembangunan zona integritas 2. Melaksanakan rapat membahas tentang rencana kerja pembangunan zona integritas 3. Membuat rencana aksi pembangunan zona integritas 4. Membuat laporan rencana kerja pembangunan zona integritas 5. Membuat SK Ketua Pengadlian Negeri Faktak tentang Rencana Kerja Tim Pembangunan Zona Integritas 	100%	<ul style="list-style-type: none"> - Telah dilaksanakan rapat penyusunan rencana pembangunan zona integritas oleh Area I Manajemen Perubahan 	60%	<p>Belum diterbitkan mengenai SK tentang Rencana Kerja Tim Pembangunan Zona Integritas</p>	<p>Kesimpulan: Rapat penyusunan rencana kerja belum dilaksanakan, namun demikian pada saat pelaksanaan penyusunan rencana kerja nantinya agar fokus pada Manajemen Perubahan mengenai perubahan pola pikir dan budaya kerja saja.</p> <p>Rekomendasi: Untuk memperlancar kegiatan pembangunan zona integritas perlu dibuat target prioritas.</p>
3	<p>Pemantauan dan evaluasi pembangunan zona integritas menuju WBKWBMM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat dokumen rencana pembangunan zona integritas 2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pembangunan zona integritas setiap bulan 3. Membuat laporan tindak lanjut atas kegiatan pembangunan zona integritas 	100%	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen rencana kerja tahun 2022 telah dilampirkan di Box Area I Manajemen Perubahan - Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi atas pembangunan zona integritas 	60%	<p>Tidak ada kendala dan hambatan</p>	<p>Kesimpulan: Pemantauan dan evaluasi pembangunan zona integritas telah dilaksanakan dengan baik</p> <p>Rekomendasi: Agar anggota Area I dapat membuat laporan tindak lanjut setiap bulannya</p>
4	<p>Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat pimpinan sebagai <i>Role Model</i> dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas 2. Melaksanakan rapat untuk menetapkan agen 	100%	<ul style="list-style-type: none"> - Masih menggunakan dokumen lama pada tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya 	40%	<p>Sering adanya keterlambatan dalam pelaksanaan pemilihan role model, agen perubahan dan pelaksanaan reward dan punishment</p>	<p>Rekomendasi: Ketua Pengadlian Negeri Faktak agar bergerak untuk melaksanakan rapat pemilihan role model, reward punishment dan agen peruban melalui Baperjaket dengan diikuti oleh Koordinator</p>

--	--	--	--	--	--

- perubahan, reward dan punishment
- 3. Membuat program kerja untuk membangun budaya kerja dan pola pikir organisasi
- 4. Melibatkan seluruh anggota organisasi dalam pembangunan zona integritas

MENGETAHUI:

KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK

Iranda Careca Anindityo, S.H.

FAKFAK, 14 FEBRUARI 2021

**KOORDINATOR AREA I ZONA INTEGRITAS
MANAJEMEN PERUBAHAN**


Iranda Careca Anindityo, S.H.

MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK DAN WBBM
PADA PENGADILAN NEGERI FAKFAK
BULAN: JANUARI 2022

PROGRAM: MANAJEMEN PERUBAHAN

NO	INDIKATOR	KEGIATAN	TARGET	PELAKSANAAN	REALISASI	KENDALA/HAMBATAN	KESIMPULAN/ REKOMENDASI
1	Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat undangan tentang rapat pembentukan tim kerja pembangunan zona integritas 2. Melaksanakan pemilihan tim kerja melalui mekanisme musyawarah yang dihadiri oleh seluruh aparat 3. Membuat SK Ketua Pengadilan Negeri Fakfak tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas 	100%	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk sementara ini dokumen mengenai pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas masih menggunakan dokumen tahun 2021 dikarenakan sejauh ini belum terdapat arahan atau imbauan dari Pimpinan mengenai pembentukan tim kerja zona integritas tahun 2022 	100%	Tidak ada kendala dan hambatan	<p>Kesimpulan: Pelaksanaan pembentukan tim kerja pembangunan zona integritas pada tahun sebelumnya telah dilaksanakan dengan menggunakan metode musyawarah mufakat yang diikuti oleh seluruh anggota organisasi dan telah disepakati koordinator tiap area dan anggotanya serta telah dikuatkan dengan dibuatkannya SK Ketua Pengadilan Negeri Fakfak tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas</p> <p>Rekomendasi: Agar proses pembentukan dengan metode musyawarah mufakat dapat dipertahankan dengan diikuti oleh seluruh anggota organisasi dan dilakukan <i>eviden</i> pelaksanaannya</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat undangan tentor rapat rencana kerja pembangunan zona integritas 2. Melaksanakan rapat membahas tentang rencana kerja pembangunan zona integritas 3. Membuat rencana aksi pembangunan zona integritas 4. Membuat laporan rencana kerja pembangunan zona integritas 5. Membuat SK Ketua Pengadilan Negeri Faktak tentang Rencana Kerja Tim Pembangunan Zona Integritas 	100%	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen rencana kerja masih menggunakan dokumen pada tahun 2021 - Penyusunan rencana kerja untuk tahun 2022 belum dapat dilaksanakan pada bulan ini dan diharapkan dapat dilaksanakan segera dengan mengundang anggota Area I Manajemen Perubahan 	50%	<p>Masih terdapat beberapa anggota yang belum masuk kerja karena sakit</p>	<p>Kesimpulan: Rapat penyusunan rencana kerja belum dilaksanakan, namun demikian pada saat pelaksanaan penyusunan rencana kerja nantinya agar fokus pada Manajemen Perubahan mengenai perubahan pola pikir dan budaya kerja saja.</p> <p>Rekomendasi: Untuk memperlancar kegiatan pembangunan zona integritas perlu dibuat target prioritas.</p>
3	<p>Pemantauan dan evaluasi pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat dokumen rencana pembangunan zona integritas 2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pembangunan zona integritas setiap bulan 3. Membuat laporan tindak lanjut atas kegiatan pembangunan zona integritas 	100%	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen rencana kerja masih menggunakan dokumen tahun 2021 - Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi atas pembangunan zona integritas 	60%	<p>Tidak ada kendala dan hambatan</p>	<p>Kesimpulan: Pemantauan dan evaluasi pembangunan zona integritas telah dilaksanakan dengan baik</p> <p>Rekomendasi: Agar anggota Area I dapat membuat laporan tindak lanjut setiap bulannya</p>
4	<p>Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat pimpinan sebagai <i>Role Model</i> dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas 2. Melaksanakan rapat untuk menetapkan agen 	100%	<ul style="list-style-type: none"> - Masih menggunakan dokumen lama pada tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya 	40%	<p>Sering adanya keterlambatan dalam pelaksanaan pemilihan role model, agen perubahan dan pelaksanaan reward dan punishment</p>	<p>Rekomendasi: Ketua Pengadilan Negeri Faktak agar bergerak untuk melaksanakan rapat pemilihan role model, reward punishment dan agen peruban melalui Baperjakat dengan diikuti oleh Koordinator</p>

	<p>perubahan, reward dan punishment</p> <p>3. Membuat program kerja untuk membangun budaya kerja dan pola pikir organisasi</p> <p>4. Melibatkan seluruh anggota organisasi dalam pembangunan zona integritas</p>				Area 1
--	--	--	--	--	--------

MENGENAHUI:
KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK



Ir. M. B. L. S. H.

FAKFAK, 13 JANUARI 2021
**KOORDINATOR AREA I ZONA INTEGRITAS
 MANAJEMEN PERUBAHAN**



Iranda Careca Anindityo, S.H.

MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WKB DAN WBBM
PADA PENGADILAN NEGERI FAKFAK
BULAN: DESEMBER 2021

PROGRAM: MANAJEMEN PERUBAHAN

NO	INDIKATOR	KEGIATAN	TARGET	PELAKSANAAN	REALISASI	KENDALA/HAMBATAN	KESIMPULAN/ REKOMENDASI
1	Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas	<ol style="list-style-type: none"> Membuat undangan tentang rapat pembentukan tim kerja pembangunan zona integritas Melaksanakan pemilihan tim kerja melalui mekanisme musyawarah yang dihadiri oleh seluruh aparat 	100%	<ul style="list-style-type: none"> Telah dibuat undangan, daftar hadir, notulensi dan dokumentasi atas pelaksanaan pembentukan tim zona integritas Telah dibuatkan SK Ketua Pengadilan Negeri Fakfak tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas 	100%	Tidak ada kendala dan hambatan, pembentukan tim telah melalui mekanisme musyawarah dan pembagian antar area sudah seimbang	Pelaksanaan pembentukan tim kerja pembangunan zona integritas telah dilaksanakan dengan menggunakan metode musyawarah mutakat dan telah disepakati koordinator tiap area dan anggotanya serta telah dikuatkan dengan dibuatkannya SK Ketua Pengadilan Negeri Fakfak tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas
2	Kelengkapan dokumen rencana pembangunan zona integritas	<ol style="list-style-type: none"> Membuat undangan tentang rapat rencana kerja pembangunan zona integritas Melaksanakan rapat membahas tentang rencana kerja pembangunan zona integritas Membuat rencana aksi pembangunan zona integritas Membuat laporan rencana kerja pembangunan zona integritas 	100%	<ul style="list-style-type: none"> Telah dilaksanakan rapat dan dilampirkan undangan, daftar hadir, notulensi dan dokumentasi atas pelaksanaan rapat rencana kerja pembangunan zona integritas Telah dilaksanakan pembuatan rencana aksi dalam pembangunan zona integritas 	90%	Telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja namun demikian terdapat bebrapa rencana kerja yang tidak dapat dikerjakan karena kurangnya dana dan Sumber Daya Masyarakat (SDM)	Perlu dirapatkan kembali mengenai perencanaan anggaran untuk tahun depan khususnya DIPA 01 dan DIPA 03 agar rencana kerja tersebut dapat dilaksanakan.

NO	INDIKATOR	KEGIATAN	TARGET	PELAKSANAAN	REALISASI	KENDALA/HAMBATAN	KESIMPULAN/REKOMENDASI
3	Pemantauan dan evaluasi pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM	<ol style="list-style-type: none"> Membuat dokumen rencana pembangunan zona integritas Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pembangunan zona integritas setiap bulan Membuat laporan tindak lanjut atas kegiatan pembangunan zona integritas 	100%	<ul style="list-style-type: none"> Telah membuat dokumen rencana kerja/aksi pembangunan zona integritas Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi atas pembangunan zona integritas setiap bulannya Telah menugaskan anggota tim untuk membuat laporan tindak lanjut atas kegiatan pembangunan zona integritas 	100%	Tidak ada kendala dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan zona integritas	Telah dilaksanakan pemantauan pembangunan zona integritas dengan hasil bahwa sebagian besar kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana
4	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	<ol style="list-style-type: none"> Membuat pimpinan sebagai <i>Role Model</i> dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Melaksanakan rapat untuk menetapkan agen perubahan Membuat program kerja untuk membangun budaya kerja dan pola pikir organisasi Melibatkan seluruh anggota organisasi dalam pembangunan zona integritas 	100%	<ul style="list-style-type: none"> Telah membuat SK Ketua Pengadlan Negeri Faktak tentang Role Model Telah melaksanakan rapat untuk menetapkan agen perubahan dan telah membuat SK Agen Perubahan Telah dilaksanakan pelatihan budaya kerja yaitu Pelatihan Pelayanan Prima dari Bank BRI Cabang Faktak Telah melibatkan seluruh anggota organisasi dalam upaya pembangunan zona integritas 	80%	Terdapat beberapa agenda yang tidak dapat dilaksanakan seperti <i>reward</i> dan <i>punishment</i>	Agar dapat dilaksanakan ditahun 2022 dan kegagalan ini menjadi pemicu semangat kedepan lebih baik



KETUA TIM
PEMBINA GURU ZONA INTEGRITAS

Dedy Heriyanto, S.H.

FAKTA, DESEMBER 2021

KOORDINATOR AREA I ZONA INTEGRITAS
MANAJEMEN PERUBAHAN

Iranda Careca Anindityo, S.H.

MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WKB DAN WBBM
PADA PENGADILAN NEGERI FAKFAK
BULAN: NOVEMBER 2021

PROGRAM: MANAJEMEN PERUBAHAN

NO	INDIKATOR	KEGIATAN	TARGET	PELAKSANAAN	REALISASI	KENDALA/HAMBATAN	KESIMPULAN/ REKOMENDASI
1	Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas	<ol style="list-style-type: none"> Membuat undangan tentang rapat pembentukan tim kerja pembangunan zona integritas Melaksanakan pemilihan tim kerja melalui mekanisme musyawarah yang dihadiri oleh seluruh aparat 	100%	<ul style="list-style-type: none"> Telah dibuat undangan, daftar hadir, notulensi dan dokumentasi atas pelaksanaan pembentukan tim zona integritas Telah dibuatkan SK Ketua Pengadilan Negeri Faktak tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas 	100%	Tidak ada kendala dan hambatan, pembentukan tim telah melalui mekanisme musyawarah dan pembagian antar area sudah seimbang	Pelaksanaan pembentukan tim kerja pembangunan zona integritas telah dilaksanakan dengan menggunakan metode musyawarah mutakat dan telah disepakati koordinator tiap area dan anggotanya serta telah dikuatkan dengan dibuatkannya SK Ketua Pengadilan Negeri Faktak tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas
2	Kelengkapan dokumen rencana pembangunan zona Integritas	<ol style="list-style-type: none"> Membuat undangan tentang rapat rencana kerja pembangunan zona integritas Melaksanakan rapat membahas tentang rencana kerja pembangunan zona integritas Membuat rencana aksi pembangunan zona integritas Membuat laporan rencana kerja pembangunan zona integritas 	90%	<ul style="list-style-type: none"> Telah dilaksanakan rapat dan dilampirkan undangan, daftar hadir, notulensi dan dokumentasi atas pelaksanaan rapat rencana kerja pembangunan zona integritas Telah dilaksanakan pembuatan rencana aksi dalam pembangunan zona integritas 	90%	Keterbatasan dana sehingga beberapa rencana kerja belum dapat terealisasi	Masih terdapat beberapa rencana aksi/kerja yang masih dalam proses pelaksanaan dan sebagian besar telah dilaksanakan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Perlu dirapatkan kembali mengenai perencanaan anggaran untuk tahun depan khususnya DIPA 01 dan DIPA 03 agar rencana kerja tersebut dapat dilaksanakan.

NO	INDIKATOR	KEGIATAN	TARGET	PELAKSANAAN	REALISASI	KENDALA/HAMBATAN	KESIMPULAN/REKOMENDASI
3	Pemantauan dan evaluasi pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat dokumen rencana pembangunan zona integritas 2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pembangunan zona integritas setiap bulan 3. Membuat laporan tindak lanjut atas kegiatan pembangunan zona integritas 	90%	<ul style="list-style-type: none"> - Telah membuat dokumen rencana kerja/aksi pembangunan zona integritas - Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi atas pembangunan zona integritas setiap bulannya - Telah menugaskan anggota tim untuk membuat laporan tindak lanjut atas kegiatan pembangunan zona integritas - Telah membuat SK Ketua Pengadilan Negeri Faktak tentang Role Model - Telah melaksanakan rapat untuk menetapkan agen perubahan dan telah membuat SK Agen Perubahan - Telah dilaksanakan pelatihan budaya kerja yaitu Pelatihan Pelayanan Prima dari Bank BRI Cabang Faktak - Telah melibatkan seluruh anggota organisasi dalam upaya pembangunan zona integritas 	90%	Laporan tindak lanjut belum dilampirkan oleh tim dikarenakan terdapat salah satu anggota yang sedang cuti	<p>Telah dilaksanakan pemantauan pembangunan zona Integritas dengan hasil bahwa sebagian besar kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana</p> <p>Namun demikian, terdapat beberapa rencana aksi yang tidak dapat terlaksana karena beberapa kendala oleh karena itu perlu kembali didiskusikan dengan pimpinan mengenai solusi yang dapat ditempuh</p>
4	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat pimpinan sebagai <i>Role Model</i> dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas 2. Melaksanakan rapat untuk menetapkan agen perubahan 3. Membuat program kerja untuk membangun budaya kerja dan pola pikir organisasi 4. Melibatkan seluruh anggota organisasi dalam pembangunan zona integritas 	80%	<ul style="list-style-type: none"> - Telah dilaksanakan pelatihan budaya kerja yaitu Pelatihan Pelayanan Prima dari Bank BRI Cabang Faktak - Telah melibatkan seluruh anggota organisasi dalam upaya pembangunan zona integritas 	80%	<i>Reward</i> dan <i>Punishment</i> belum dilaksanakan	<p>Agar dilampirkan mengenai laporan before dan after dalam setiap kegiatan perubahan pola pikir dan budaya kerja</p> <p>Mengenai <i>reward</i> dan <i>punishment</i> agar segera dilaporkan kepada Pimpinan Pengadilan Negeri Faktak</p>

MENGETAHUI:
KEDUKAATM
PENGADILAN
PENGADILAN ZONA INTEGRITAS


Dedy Herwanto, S.H.

FAKFAK, NOVEMBER 2021

KOORDINATOR AREA I ZONA INTEGRITAS
MANAJEMEN PERUBAHAN


Irandia Careca Anindityo, S.H.

MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WKB DAN WBBM
PADA PENGADILAN NEGERI FAKFAK
BULAN: OKTOBER 2021

PROGRAM: MANAJEMEN PERUBAHAN

NO	INDIKATOR	KEGIATAN	TARGET	PELAKSANAAN	REALISASI	KENDALA/HAMBATAN	KESIMPULAN/ REKOMENDASI
1	Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas	<ol style="list-style-type: none"> Membuat undangan tentang rapat pembentukan tim kerja pembangunan zona integritas Melaksanakan pemilihan tim kerja melalui mekanisme musyawarah yang dihadiri oleh seluruh aparat 	100%	<ul style="list-style-type: none"> Telah dibuat undangan, daftar hadir, notulensi dan dokumentasi atas pelaksanaan pembentukan tim zona integritas Telah dibuatkan SK Ketua Pengadilan Negeri Faktak tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas 	100%	Tidak ada kendala dan hambatan, pembentukan tim telah melalui mekanisme musyawarah dan pembagian antar area sudah seimbang	Pelaksanaan pembentukan tim kerja pembangunan zona integritas telah dilaksanakan dengan menggunakan metode musyawarah mufakat dan telah disepakati koordinator tiap area dan anggotanya serta telah dikuatkan dengan dibuatkannya SK Ketua Pengadilan Negeri Faktak tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas
2	Kelengkapan dokumen rencana pembangunan zona Integritas	<ol style="list-style-type: none"> Membuat undangan tentang rapat rencana kerja pembangunan zona integritas Melaksanakan rapat membahas tentang rencana kerja pembangunan zona integritas Membuat rencana aksi pembangunan zona integritas Membuat laporan rencana kerja pembangunan zona integritas 	90%	<ul style="list-style-type: none"> Telah dilaksanakan rapat dan dilampirkan undangan, daftar hadir, notulensi dan dokumentasi atas pelaksanaan rapat rencana kerja pembangunan zona integritas Telah dilaksanakan pembuatan rencana aksi dalam pembangunan zona integritas 	90%	Keterbatasan dana sehingga beberapa rencana kerja belum dapat terealisasi	Masih terdapat beberapa rencana aksi/kerja yang masih dalam proses pelaksanaan dan sebagian besar telah dilaksanakan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Perlu dirapatkan kembali mengenai perencanaan anggaran untuk tahun depan khususnya DIPPA 01 dan DIPPA 03 agar rencana kerja tersebut dapat dilaksanakan.

NO	INDIKATOR	KEGIATAN	TARGET	PELAKSANAAN	REALISASI	KENDALA/HAMBATAN	KESIMPULAN/REKOMENDASI
3	Pemantauan dan evaluasi pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat dokumen rencana pembangunan zona integritas 2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pembangunan zona integritas setiap bulan 3. Membuat laporan tindak lanjut atas kegiatan pembangunan zona integritas 	80%	<ul style="list-style-type: none"> - Telah membuat dokumen rencana kerja/aksi pembangunan zona integritas - Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi atas pembangunan zona integritas setiap bulannya - Telah mengugaskan anggota tim untuk membuat laporan tindak lanjut atas kegiatan pembangunan zona integritas 	80%	Laporan tindak lanjut belum dilampirkan oleh tim dikarenakan terdapat salah satu anggota yang sedang cuti	<p>Telah dilaksanakan pemantauan pembangunan zona integritas dengan hasil bahwa sebagian besar kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana</p> <p>Namun demikian, terdapat beberapa rencana aksi yang tidak dapat terlaksanakan karena beberapa kendala oleh karena itu perlu kembali didiskusikan dengan pimpinan mengenai solusi yang dapat ditempuh</p>
4	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat pimpinan sebagai <i>Role Model</i> dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas 2. Melaksanakan rapat untuk menetapkan agen perubahan 3. Membuat program kerja untuk membangun budaya kerja dan pola pikir organisasi 4. Melibatkan seluruh anggota organisasi dalam pembangunan zona integritas 	80%	<ul style="list-style-type: none"> - Telah membuat SK Ketua Pengadlian Negeri Faktak tentang Role Model - Telah melaksanakan rapat untuk menetapkan agen perubahan dan telah membuat SK Agen Perubahan - Telah dilaksanakan pelatihan budaya kerja yaitu Pelatihan Pelayanan Prima dari Bank BRI Cabang Faktak - Telah melibatkan seluruh anggota organisasi dalam upaya 	80%		<p>Agar dilampirkan mengenai laporan before dan after dalam seliap kegiatan perubahan pola pikir dan budaya kerja</p>

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

perubahan zona
integritas

MENGSAHUI:
KETUA TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS



Dedy Heriyanto, S.H.

KOORDINATOR AREA I ZONA INTEGRITAS
MANAJEMEN PERUBAHAN

Iranda Careca Anindityo, S.H.

FAKFAK, OKTOBER 2021

CHEKLIST

NO. 3.c

**TINDAK LANJUT ATAS
MONITORING DAN
EVALUASI
PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS**



PENGADILAN NEGERI FAKFAK

JALAN. YOS SUDARSO NO. 92. Tlp/Fax (0956) 22413.

Website. www.pn-fakfak.go.id

Email : pengadilan_negeri_fakfak@yahoo.co.id

FAKFAK.PAPUA BARAT

Fakfak, 28 Maret 2022

TINDAK LANJUT MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS AREA I MANAJEMEN PERUBAHAN

Dari hasil rapat monitoring dan evaluasi Pembangunan Zona Integritas pada Area I Manajemen Perubahan pada bulan Februari 2022 bahwa terdapat temuan antara lain:

- a. Belum ditetapkan agen perubahan pada Pengadilan Negeri Fakfak tahun 2022
- b. *Role Model* Pengadilan Negeri Fakfak belum diperbaharui
- c. Reward dan Punishment belum dilaksanakan

Atas temuan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Fakfak telah memerintahkan kepada Tim pelaksana pemilihan Role Model dan Agen Perubahan agar segera melaksanakan rapat dan memiliki Role Model dan Agen Perubahan. Selanjutnya tim tersebut juga telah menentukan salah satu aparatur Pengadilan Negeri Fakfak untuk mendapatkan reward pada periode bulan Maret 2022 atas kinerjanya yang dinilai baik.

Selanjutnya Tim telah meminta dokumen-dokumen tersebut untuk kemudian dikumpulkan ke dalam Box Area I Manajemen Perubahan.

Demikian tindak lanjut kami atas laporan monitoring dan evaluasi Pembangunan Zona Integritas pada Area I Manajemen Perubahan pada bulan Maret 2022 yang divalidasi oleh Koordinator Area I Manajemen Perubahan.

Koordinator Area I Manajemen Perubahan,

Iranda Careca Anindityo, S.H.

NIP. 19900311 201712 1 003



PENGADILAN NEGERI FAKFAK

JALAN. YOS SUDARSO NO. 92. Tlp/Fax (0956) 22413.
Website. www.pn-fakfak.go.id
Email : pengadilan_negeri_fakfak@yahoo.co.id
FAKFAK.PAPUA BARAT

Fakfak, 25 Februari 2022

TINDAK LANJUT MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS AREA I MANAJEMEN PERUBAHAN

Dari hasil rapat monitoring dan evaluasi Pembangunan Zona Integritas pada Area I Manajemen Perubahan pada bulan Januari 2022 bahwa terdapat temuan antara lain:

- a. Sosialisasi pembangunan Zona Integritas pada tahun 2022
- b. Tim Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Fakfak belum diperbaharui

Atas temuan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Fakfak telah melaksanakan rapat pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas pada bulan Februari 2022 dengan dilaksanakan dengan mekanisme yang tepat. Dalam kesempatan yang sama telah pula dilaksanakan sosialisasi pembangunan Zona Integritas pada tahun 2022. Selanjutnya Tim telah meminta dokumen-dokumen tersebut untuk kemudian dikumpulkan ke dalam Box Area I Manajemen Perubahan.

Demikian tindak lanjut kami atas laporan monitoring dan evaluasi Pembangunan Zona Integritas pada Area I Manajemen Perubahan pada bulan Februari 2022 yang divalidai oleh Koordinator Area I Manajemen Perubahan.

Koordinator Area I Manajemen Perubahan,

Iranda Careca Anindityo, S.H.
NIP. 19900311 201712 1 003



PENGADILAN NEGERI FAKFAK

JALAN. YOS SUDARSO NO. 92. Tlp/Fax (0956) 22413.

Website. www.pn-fakfak.go.id

Email : pengadilan_negeri_fakfak@yahoo.co.id

FAKFAK.PAPUA BARAT

Fakfak, 31 Januari 2022

TINDAK LANJUT MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS AREA I MANAJEMEN PERUBAHAN

Dari hasil rapat monitoring dan evaluasi Pembangunan Zona Integritas pada Area I Manajemen Perubahan pada bulan Desember 2021 bahwa terdapat temuan yaitu belum adanya Laporan Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Fakfak tahun 2021. Atas temuan tersebut, Koordinator Area I Manajemen Perubahan beserta Tim telah melakukan tindak lanjut dengan menyusun Laporan Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Fakfak pada Tahun 2021 yang kemudian telah dicetak dan dimasukkan ke dalam Box Area I Manajemen Perubahan.

Demikian tindak lanjut kami atas laporan monitoring dan evaluasi Pembangunan Zona Integritas pada Area I Manajemen Perubahan pada bulan Januari 2022 yang divalidasi oleh Koordinator Area I Manajemen Perubahan.

Koordinator Area I Manajemen Perubahan,

Iranda Careca Anindityo, S.H.

NIP. 19900311 201712 1 003

CHEKLIST

NO. 4.a

**PIMPINAN BERPERAN
SEBAGAI ROLE MODEL
DALAM PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS**



PENGADILAN NEGERI FAKFAK KELAS II

Jl. Yos Sudarso No 92

Telp / Fax. (0956) 22413 Email: pengadilan_negeri_fakfak@yahoo.co.id

Web : <http://www.pn-fakfak.go.id>

ROLE MODEL

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor : 1233-UB/07/KP/19/01/2022
Semester I Tahun 2022



TRI MARGONO, S.H

KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK

"Integritas, Komitmen, Disiplin, Kerjasama, Inovatif"

DOKUMENTASI ROLE MODEL



PENGADILAN NEGERI FAKFAK KELAS II

Jalan Yos Sudarso No.92 Wagom

Tlp : (0956) 22413 FAX : (0956) 22413

Website : www.pn-fakfak.go.id

Email : pengadilan_negeri_fakfak@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK KELAS II
W30.U6/ 87/KPN/SK/III/2022

TENTANG
PENUNJUKAN ROLE MODEL
PADA PENGADILAN NEGERI FAKFAK KELAS II
TAHUN 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK KELAS II

- Membaca : 1. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II Nomor:W30.U6/62/KPN/SK/II/2022, tanggal 03 Februari 2022, tentang Penunjukan Tim Penilai Role Model pada Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II
- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan Zona Integritas Pengadilan Negeri Fakfak, maka perlu ditunjuk Role Model dari Unsur Hakim, Pejabat Struktural, dan Pejabat Teknis yang bisa dipercaya dan bisa dijadikan contoh atau dapat diteladani pada Pengadilan Negeri Fakfak;
2. Bahwa dari hasil musyawarah Rapat Tim Penilai Role Model pada hari Kamis 10 Maret 2022, telah terpilih Role Model Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II untuk periode 6(enam) Bulan;
3. Bahwa Pegawai yang terpilih dinilai cakap dan mampu serta memenuhi Standar kriteria yang terdapat dalam Keputusan Dirjen Badan Perdailan Umum MARI No. 1163/DJU/SK/KP02.1/4/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MARI No. 1467a/DJU/SK/KP.02.1/6/2018 tentang Pedoman Pemilihan Agen Perubahan sebagai Role Model pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor: 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- c. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- d. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/1/2011, tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
- e. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 012.A/SEK/SK/111/2010 tentang Pembentukan Tim Pengembangan Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI;

- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
- g. Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MARI No. 1163/DJU/SK/KP02.1/4/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MARI No. 1467a/DJU/SK/KP.02.1/6/2018 tentang Pedoman Pemilihan Agen Perubahan sebagai Role Model pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK KELAS II TENTANG PENUNJUKAN ROLE MODEL PADA PENGADILAN NEGERI FAKFAK KELAS II TAHUN 2022
- Pertama : Menunjuk saudara:
1. **TRI MARGONO, S.H.** NIP: 19760211 200212 1 004. Jabatan: **Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II** sebagai Role Model pada Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II
 2. **YURICE J.C. REMBET, S.T.** NIP: 19870712 201101 2 022. Jabatan: Sekretaris Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II sebagai Role Model pada Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II
- Kedua : Role Model adalah individu terpilih yang menjadi panutan dalam berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi pada Pengadilan Tingkat Pertama;
- Ketiga : Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 03 Januari 2022 sampai dengan 31 Juli 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Fakfak

Tanggal : 10 Maret 2022



Peraturan Mahkamah Agung No.7 tahun 2016
Tentang penegakan Disiplin Kerja Hakim pada
Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang
berada di bawahnya



PENGADILAN NEGERI FAKFAK KELAS II

JLN. YOS SUDARSO NO. 92 TELP. (0956) 22413

Tlp. (0956) 22413 FAX (0956) 22413

Website : www.pn_fakfak.go.id

Email : pengadilan_negeri_fakfak@yahoo.co.id

DAFTAR HADIR HAKIM

HARI : Rabu

TANGGAL : 02 Februari 2022

NO	JAM	N A M A DAN NIP	UNIT KERJA	TANDA TANGAN	KET
1	07.06	IRANDA CAPECA A. NIP. 1960021120121003	PN. FAKFAK		
2	07.08	Benny Prima Anasoro NIP. 198207272017121005	PN. FAKFAK		
3	07.40	Reynold Kibin NIP. 198604082017121002	PN. FAKFAK		
4	07.42	IWAN BHAKTI -Y NIP. 199511212017111004	PN. FAKFAK		
5	07.53	TKI Nagano NIP. 1975021120121004	PN. FAKFAK		
6		NIP.	PN. FAKFAK		

Mengetahui :

Wakil Ketua

DEDY HERIYANTO, SH

NIP. 19780330 200212 1 004

Petugas Absensi

LA IDU

NIP. 19650815 199303 1 003

Peraturan Mahkamah Agung No.7 tahun 2016
Tentang penegakan Disiplin Kerja Hakim pada
Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang
berada di bawahnya



PENGADILAN NEGERI FAKFAK
JLN. YOS SUDARSO NO. 92 TELP. (0956) 22413
Tlp. (0956) 22413 FAX (0956) 22413
Website : www.pn_fakfak.go.id
Email : pengadilan_negeri_fakfak@yahoo.co.id

DAFTAR PULANG HAKIM

HARI : Rabu

TANGGAL : 02 Februari 2022

NO	JAM	NAMA DAN NIP	UNIT KERJA	TANDA TANGAN	KET
1	16.34	P. Nibitun NIP. 19604082017121002	PN. FAKFAK		
2	16.35	Kanda Careca A NIP. 1000081120170805	PN. FAKFAK		
3	16.35	Tri Nagaw NIP. 91602112017121004	PN. FAKFAK		
4	16.40	Golfer Anna A NIP. 19720727201712008	PN. FAKFAK		
5	16.43	IVAN BHAKTI - Y NIP. 199511242017111004	PN. FAKFAK		
6		NIP.	PN. FAKFAK		

Mengetahui :

Wakil Ketua

DEDY HERIYANTO, SH

NIP. 19780330 200212 1 004

Petugas Absensi

LA IDU

NIP. 19650815 199303 1 003

Peraturan Mahkamah Agung No.7 tahun 2016
Tentang penegakan Disiplin Kerja Hakim pada
Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang
berada di bawahnya



PENGADILAN NEGERI FAKFAK KELAS II

JLN. YOS SUDARSO NO. 92 TELP. (0956) 22413

Tlp. (0956) 22413 FAX (0956) 22413

Website : www.pn_fakfak.go.id

Email : pengadilan_negeri_fakfak@yahoo.co.id

DAFTAR HADIR HAKIM

HARI : Senin

TANGGAL : 31 Januari 2022

NO	JAM	N A M A DAN NIP	UNIT KERJA	TANDA TANGAN	KET
1	07.05	Ganjar Prima A NIP. 1972572729712005	PN. FAKFAK		
2	07.09	Iranda Careca Amindityo NIP. 1980021201701003	PN. FAKFAK		
3	07.20	TRI Nazario NIP. 197602112012004	PN. FAKFAK		
4	07.34	IWAN BIARTI Y NIP. 198511211701004	PN. FAKFAK		
5	07.43	R. Nabila NIP. 1986040820171002	PN. FAKFAK		
6		NIP.	PN. FAKFAK		

Mengetahui :

Wakil Ketua

DEDY HERIYANTO, SH

NIP. 19780330 200212 1 004

Petugas Absensi

LA IDU

NIP. 19650815 199303 1 003

Peraturan Mahkamah Agung No.7 tahun 2016
Tentang penegakan Disiplin Kerja Hakim pada
Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang
berada di bawahnya



PENGADILAN NEGERI FAKFAK
JLN. YOS SUDARSO NO. 92 TELP. (0956) 22413
Tlp. (0956) 22413 FAX (0956) 22413
Website : www.pn_fakfak.go.id
Email : pengadilan_negeri_fakfak@yahoo.co.id

DAFTAR PULANG HAKIM

HARI : Senin

TANGGAL : 31 Januari 2022

NO	JAM	N A M A DAN NIP	UNIT KERJA	TANDA TANGAN	KET
1	16.40	Reynold Nabtan NIP. 1964082017121002	PN. FAKFAK		
2	17.29	Garijan Prima A NIP. 199207272017121005	PN. FAKFAK		
3	17.38	Dedy H NIP. 197803302002121004	PN. FAKFAK		
4	18.15	Iri Karyono NIP. 197502112001121004	PN. FAKFAK		
5	18.20	Iranda Careca A NIP. 198003112017121003	PN. FAKFAK		
6	18.28	Ivan Bhakti Y NIP. 199511242017121004	PN. FAKFAK		

Mengetahui :

Wakil Ketua

DEDY HERIYANTO, SH
NIP. 19780330 200212 1 004

Petugas Absensi

LA IDU
NIP. 19650815 199303 1 003

Peraturan Mahkamah Agung No.7 tahun 2016
Tentang penegakan Disiplin Kerja Hakim pada
Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang
berada di bawahnya



PENGADILAN NEGERI FAKFAK KELAS II

JLN. YOS SUDARSO NO. 92 TELP. (0956) 22413

Tlp. (0956) 22413 FAX (0956) 22413

Website : www.pn_fakfak.go.id

Email : pengadilan_negeri_fakfak@yahoo.co.id

DAFTAR HADIR HAKIM

HARI : Jumat

TANGGAL : 25 Februari 2022

NO	JAM	N A M A DAN NIP	UNIT KERJA	TANDA TANGAN	KET
1	07.06	IRANDA CARECA ANINDIYO NIP. 19300311201721003	PN. FAKFAK		
2	07.20	GANJAR PRIMA ANGGARA NIP. 19920727201121005	PN. FAKFAK		
3	07.38	IVAN BHAKTI Y NIP. 199511241017111004	PN. FAKFAK		
4	07.32	Reynold Nator NIP. 198608201721002	PN. FAKFAK		
5	07.40	TRI MARGONO NIP. 19760211200212004	PN. FAKFAK		

Mengetahui :
Ketua

TRI MARGONO, SH
NIP. 19760211 200212 004

Petugas Absensi

LA IDU
NIP. 19650815 199303 1 003

Peraturan Mahkamah Agung No.7 tahun 2016
Tentang penegakan Disiplin Kerja Hakim pada
Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang
berada di bawahnya



PENGADILAN NEGERI FAKFAK
JLN. YOS SUDARSO NO. 92 TELP. (0956) 22413
Tlp. (0956) 22413 FAX (0956) 22413
Website : www.pn_fakfak.go.id
Email : pengadilan_negeri_fakfak@yahoo.co.id

DAFTAR PULANG HAKIM

HARI : Jumat

TANGGAL : 25 Februari 2022

NO	JAM	NAMA DAN NIP	UNIT KERJA	TANDA TANGAN	KET
1	17.05	TRI MAGGONO NIP. 19760211 200212 004	PN. FAKFAK		
2	17.04	Peguyus Ist Nabbas NIP. 19860408 201712 002	PN. FAKFAK		
3	18.31	IVAN BHAKTI Y NIP. 199511 24 201712 004	PN. FAKFAK		
4	18.35	KRANDA CAHYA A NIP. 19800311 201712 005	PN. FAKFAK		
5	18.40	Ganjar D. A NIP. 19920727 201712 005	PN. FAKFAK		

Mengetahui :
Ketua

TRI MAGGONO, SH
NIP. 19760211 200212 004

Petugas Absensi

LA IDU
NIP. 19650815 199303 1 003

Peraturan Mahkamah Agung No.7 tahun 2016
Tentang penegakan Disiplin Kerja Hakim pada
Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang
berada di bawahnya



PENGADILAN NEGERI FAKFAK
JLN. YOS SUDARSO NO. 92 TELP. (0956) 22413
Tlp. (0956) 22413 FAX (0956) 22413
Website : www.pn_fakfak.go.id
Email : pengadilan_negeri_fakfak@yahoo.co.id

DAFTAR PULANG HAKIM

HARI : Selasa
TANGGAL : 04 Januari 2022

NO	JAM	N A M A DAN NIP	UNIT KERJA	TANDA TANGAN	KET
1	16.52	Dedy H NIP. 197803302002121004	PN. FAKFAK		
2	16.59	Ganjar Prima A NIP. 199207272017121605	PN. FAKFAK		
3	17.00	Tri Margono NIP.	PN. FAKFAK		
4		 NIP.	PN. FAKFAK		
5		 NIP.	PN. FAKFAK		
6		 NIP.	PN. FAKFAK		

Mengetahui :

Wakil Ketua

DEDY HERIYANTO, SH

NIP. 19780330 200212 1 004

Petugas Absensi

LA IDU

NIP. 19650815 199303 1 003

Peraturan Mahkamah Agung No.7 tahun 2016
Tentang penegakan Disiplin Kerja Hakim pada
Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang
berada di bawahnya



PENGADILAN NEGERI FAKFAK KELAS II

JLN. YOS SUDARSO NO. 92 TELP. (0956) 22413

Tlp. (0956) 22413 FAX (0956) 22413

Website : www.pn_fakfak.go.id

Email : pengadilan_negeri_fakfak@yahoo.co.id

DAFTAR HADIR HAKIM

HARI : Jumat

TANGGAL : 07 Januari 2022

NO	JAM	N A M A DAN NIP	UNIT KERJA	TANDA TANGAN	KET
1	07-16	IRANDA CARECA ANINDATYB NIP. 1990031227121003	PN. FAKFAK		
2	07-34	Dedy H NIP. 197803302002121004	PN. FAKFAK		
3	07-52	TRI Margaw NIP.	PN. FAKFAK		
4	07-53	Ganjar Prima A NIP. 19920927201724003	PN. FAKFAK		
5		 NIP.	PN. FAKFAK		
6		 NIP.	PN. FAKFAK		

Mengetahui :

Wakil Ketua

DEDY HERIYANTO, SH

NIP. 19780330 200212 1 004

Petugas Absensi

LA IDU

NIP. 19650815 199303 1 003

PETA KEHADIRAN

INSTANSI : PENGADILAN NEGERI FAK
 PERIODE : 01 JANUARI s.d 31 JANUARI 2022
 TOTAL HARI KERJA : 21
 JUMLAH PEGAWAI : 19

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANGGAL																															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	TRI MARGONO, SH	197602112002121804	Ketua																																
2	DEDY HERIANTO, SH	197603302002121804	Wakil Ketua																																
3	REYNOLD SUPRIADY E.M.P. NABABAN, SH.	198604082017121802	Hakim			cs1	cs1	cs1	cs1																										
4	IRANDA CARECA ANINDITYO, SH.	199003112017121803	Hakim																																
5	GAMJIAR PRIMA ANGGARA, SH.	199207272017121805	Hakim																																
6	IWAN BHAKTI YUDISTIRA, S.H	199511242017121804	Hakim			cs1	cs1	cs1	cs1	cs1																									
7	SANDAR SITANGGANG, SH	196608101991031801	Panitera PN II																																

TUJUAN KEHADIRAN

STASIUN : PENGADILAN NEGARA FAK FAK
PERIODE : 01 JANUARI s.d. 31 JANUARI 2022
TOTAL HARI KERJA : 21
JUMLAH PECAWAN : 19

Table with columns: NO, NAMA, NIP, JABATAN, and various attendance codes (v, thd, t1, t2, t3, t4, t5, t6, t7, t8, t9, t10, t11, t12, t13, t14, t15, t16, t17, t18, t19, t20, t21, t22, t23, t24, t25, t26, t27, t28, t29, t30, t31, t32, t33, t34, t35, t36, t37, t38, t39, t40, t41, t42, t43, t44, t45, t46, t47, t48, t49, t50) and columns for days of the week (hr).

Mengetahui, Ketua



TRIANWONGONG SH
196508151993031003

Kasubag Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana II
LA IDU
196508151993031003

fakfak, 1 Februari 2022
Petugas pencatat absensi
LA IDU
196508151993031003

APEL PAGI

HARI / TANGGAL APEL	Senin, 14 Maret 2022		KETERANGAN LAMPIRAN	
LOKASI APEL	Lapangan Pengadilan Negeri Fakfak		<input checked="" type="checkbox"/>	DAFTAR HADIR
MULAI WAKTU APEL	08.00 WIT	SELESAI	08.20 WIT	<input type="checkbox"/> INTERNAL MEMO
POKOK BAHASAN	1	Rekrutmen POSBAKUM		Beri Tanda berikut <input checked="" type="checkbox"/>
	2	Perma 7, 8 dan 9		
	3	Monev PTSP		
PEMBINA APEL	1	TRI MARGONO, SH		
PEMIMPIN APEL	1	IRIYANTO TANGGAHMA, SH		
MC	1	JUNIAR PATIMBANG, A.Md		
DOKUMENTASI	1	Agung Irvan Billi, S.Kom		
PESERTA APEL		Seluruh Aparatur		
NOTULEN	1	Ratna Keley, A.Md.T		

I. Pembukaan

1. Ketua Pengadilan Negeri Fakfak selaku pembina apel pagi mengucapkan Salam pembuka dan ucapan terima kasih kepada seluruh aparatur baik dari, Hakim – Hakim, Panitera, Sekretaris, Panmud, Kasubbag, PP, Jurusita, Staf dan Honorer.
2. Ketua memimpin Yel yel Pengadilan Negeri Fakfak untuk penyemangat Apel pagi

II. Pembahasan

1. Perma 7, 8 dan 9 Tahun 2016 s

saya mengingatkan kembali tentang kedisiplinan yang bagaimana ditekankan dalam perma 7, 8 dan pengawasan perma 9 tahun 2016 ditanamkan pada dirikita masing-masing bahwa kita sudah berkomitmen untuk membangun Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Fakfak jangan hanya peraturan itu pada tataran aturan sajatapi tidak ada pada aturan prifasinya yang terpenting aturan itu kita bias resapi, jiwai Insya Allah apa yang ada didalam aturan tersebut apabila kita sudah tau maknanya maka tidak berat untuk kita jalankan. Negara sudah memberikan kita penghasilan yang cukup itu yang kita sukuri sehingga kita tidak perlu macam-macam, Negara juga memperhatikan kesejahteraan kita

sehingga apabila oknum yang masih melakukan perbuatan diluar itu maka dia akan menerima konsekuensinya kita perlu tau bagaimana ketegasan saat ini baik dari internal kita badan pengawasan maupun eksternal kita Fungsi Yudisial, KPK terhadap penyelewengan-penyelewengan yang terjadi sekarang tidak pandang bulu bahkan kita tau bahwa pada Esalon I A pun di Mahkamah Agung apabila melakukan penyelewengan tetap di proses secara hukum, kita perlu tau semua bahwa Mantan Sekretaris Mahkamah

APEL PAGI

Agung kita sekarang ini sudah diproses secara hukum buktinya apa pejabat teras Mahkamah Agung boleh kita bilang dalam ring satu saja Mahkamah Agung tidak akan memberi perlindungan hukum apalagi kita seperti kita yang ada di bawa ini, untuk itu saya harapkan kepada kita apa yang terjadi dimasalalu tidak diulangi lagi kedepan kita perbaiki Insya Allah kalau kita sudah bekerja dengan baik Negara akan melihat dan akan memperhatikan kesejahteraan kita. Sala satu contoh perhatian dari Mahkama Agung kepada kita adalah Remunerasi para ASN sudah mencapai 100% oleh Negara, Hakim juga dulu tunjangan kita begitu memperhatikan ahirnya sekarang kita sudah bisa merasakan jauh lebih baik. Semoga kedepan Negara bisa lebih memperhatikan lagi.

2. Seperti yang disampaikan oleh Bpk. Ketua pada kesempatan rapat bulan bahwa kita lebih efektifkan Monev terhadap bagian PTSP dan Meja Informasi. (setelah apel pagi ini untuk bagian petugas PTSP dan pejabat pengelola kita brifing sejenak untuk melakukan Monev)
3. Apa yang kita kerjakan selama ini semoga kedepan lebih baik lagi dan dipertahankan.



APEL PAGI



III. Penutup

Demikian Apel pagi hari ini yang telah di pimpin oleh Bapak. Dedy Hariyanto, SH

TERIMA KASIH

PENGADILAN NEGERI FAKFAK BISA TERBINA

DIBUAT NOTULEN

RATNA KELEY, A.Md.T

DIPERIKSA (TM)

TRI MARGONO, SH



PENGADILAN NEGERI FAKFAK KELAS II

JLN. YOS SUDARSO NO. 92 TELP. (0956) 22413

Tlp. (0956) 22413 FAX (0956) 22413

Website : www.pn_fakfak.go.id

Email : pengadilan_negeri_fakfak@yahoo.co.id

DAFTAR HADIR APEL PAGI


NO	N A M A	PARAF	KET
1	TRI Mayous		
2	Reynold Nsbiban		
3	IVAN Bhatti . Y		
4	Iwanda Careca Anindityo		
5	Sanjar Prima Anggara		
6	Ulianto . T		
7	Agung Inran B		
8	Rizal Alor		
9	ESKOT Wulipug		
10	Ylan R-A		
11	Windi Yunita		
12	J M Rahadat		
13	Oboviana . T, wafoto		
14	Yurice J.C. N.		
15	Juniar Pambans		
16	Robothu. Tawarzon		
17	Yeni A.		

18	Rafna	PH	
19	Rika	PH	
20	Jawah	J	
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			

Mengetahui :
Ketua


TRI MARGONO, SH
NIP. 19760211 200212 004

Petugas Absensi


LA IDU
NIP. 19650815 199303 1 003

APEL SORE

HARI / TANGGAL APEL	Jumat, 11 Maret 2022		KETERANGAN LAMPIRAN	
LOKASI APEL	Lapangan Pengadilan Negeri Fakfak		<input checked="" type="checkbox"/>	DAFTAR HADIR
MULAI WAKTU APEL	17.00 WIT	SELESAI	17.20 WIT	<input type="checkbox"/> INTERNAL MEMO
POKOK BAHASAN	1			Beri Tanda berikut <input checked="" type="checkbox"/>
	2			
	3			
PEMBINA APEL	1	Bpk. Tri Margono, SH		
PEMIMPIN APEL	1	Yulian Riski Ananda, A,Md.A.B		
MC	1	Juiar Patimbang, A.Md		
DOKUMENTASI	1	Agung Irvan Bili, S.Kom		
PESERTA APEL		Seluruh Aparatur		
NOTULEN	1	Ratna Keley, A.Md.T		

I. Pembukaan

1. Ketua Pengadilan Negeri Fakfak memimpin Yel yel Pengadilan Negeri Fakfak untuk penyemangat Apel Sore
2. Ketua Pengadilan Negeri Fakfak selaku pembina apel sore mengucapkan Salam pembuka dan ucapan terima kasih kepada seluruh aparatur baik dari, Hakim – Hakim, Panitera, Sekretaris, Panmud, Kasubbag, PP, Jurusita, Staf dan Honoror.

II. Pembahasan

Pada apel sore ini ketua tidak menyampaikan banyak hal karena sudah disampaikan pada saat rapat bulanan tadi di ruang rapat lantai 2 sehingga pada apel kali ini saya hanya berpesan kepada seluruh aparatur PNF agar tetap menjaga kesehatan dan selamat berlibur bersama keluarga. Selamat berlibur .

APEL SORE



III. Penutup

Demikian Apel sore hari ini yang telah di pimpin oleh Bapak Ketua Pengadilan Negeri Fakfak

TERIMA KASIH

PENGADILAN NEGERI FAKFAK BISA TERBINA

DIBUAT NOTULEN

Ratna Keley, A.Md.T

DIPERIKSA (TM)

Tri Margono, SH



PENGADILAN NEGERI FAKFAK KELAS II

JLN. YOS SUDARSO NO. 92 TELP. (0956) 22413




Tlp. (0956) 22413 FAX (0956) 22413

Website : www.pn_fakfak.go.id

Email : pengadilan_negeri_fakfak@yahoo.co.id

DAFTAR HADIR APEL SORE

NO	N A M A	PARAF	KET
1	TRI Magauo		
2	Corryar P A		
3	Peyuold Nibirun		
4	IVAN BHAKTI Y		
5	Adiwin		
6	Engelberthun T		
7	Fred Adis		
8	IRLANTO T		
9	ISMAEL LOARON		
10	Yeni A.		
11	Windi Y -		
12	Yulian P A		
13	Juniar - P		
14	Rika M Sari		
15	Robertus Tawinasuru		
16	J. Sihaya		
17	Agung		

18	Johannis M Rahadat		
19	Juani DC K		
20	T. K. K. K.		
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			

Mengetahui :
Ketua



TRI MARGONO, SH
NIP. 19760211 200212 004

Petugas Absensi



LA IDU
NIP. 19650815 199303 1 003

APEL SORE

HARI / TANGGAL APEL	Jumat, 4 Maret 2022		KETERANGAN LAMPIRAN
LOKASI APEL	Lapangan Pengadilan Negeri Fakfak		<input checked="" type="checkbox"/> DAFTAR HADIR
MULAI WAKTU APEL	17.00 WIT	SELESAI 17.20 WIT	<input type="checkbox"/> INTERNAL MEMO
POKOK BAHASAN	1	SIPP	Beri Tanda berikut <input checked="" type="checkbox"/>
	2		
	3		
PEMBINA APEL	1	Bpk. Tri Margono, SH	
PEMIMPIN APEL	1	Yulian Riski Ananda, A,Md.A.B	
MC	1	Juiar Patimbang, A.Md	
DOKUMENTASI	1	Agung Irvan Bili, S.Kom	
PESERTA APEL		Seluruh Aparatur	
NOTULEN	1	Ratna Keley, A.Md.T	

I. Pembukaan

1. Ketua Pengadilan Negeri Fakfak memimpin Yel yel Pengadilan Negeri Fakfak untuk penyemangat Apel Sore
2. Ketua Pengadilan Negeri Fakfak selaku pembina apel sore mengucapkan Salam pembuka dan ucapan terima kasih kepada seluruh aparatur baik dari, Hakim – Hakim, Panitera, Sekretaris, Panmud, Kasubbag, PP, Jurusita, Staf dan Honoror.

II. Pembahasan

1. SIPP

Seperti yang sudah di bagikan ke grup dan sudah di sosialisasikan secara terbatas untuk rekan rekan Hakim, Panitera, Panmud Pidana dan Panmud Perdata ada tugas untuk membuat Evaluasi misalnya ada yang belum menguasai atau memahami tentang SIPP bisa ditanyakan kepada bapak hakim-hakim, bapak wakil atau langsung kepada ketua dan untuk satgas SIPP untuk segerah membuat laporan tentang hambatan-hambatan yang dihadapi.

APEL SORE

2. Zona Integritas

Pembangunan zona integritas kita bahwa kemarin sudah kita laksanakan evaluasi, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki atau perlu ditindak lanjut dari hasil evaluasi langsung oleh Bawas yang sudah dikirimkan kepada ketua Tim ZI. Kepada Ketua Tim perlu disampaikan hasil evaluasi atau dirapatkan khusus bersama TIM ZI kira kira apa yang perlu di penuhi

3. Penyerapan Anggaran 01 dan 03

Kepada Pak Sekretaris, PPK dan juga Bendahara mengenai penyerapan anggaran 01 dan 03 tolong dipercepat jangan sampai kita ada teguran karena pada semester pertama kita belum mencapai yang diharapkan.



III. Penutup

Demikian Apel sore hari ini yang telah di pimpin oleh Bapak Ketua Pengadilan Negeri Fakfak

TERIMA KASIH

PENGADILAN NEGERI FAKFAK BISA TERBINA

DIBUAT NOTULEN

Dafan. Keley, A.Md.T

DIPERIKSA (TM)

Tri Margono, SH



PENGADILAN NEGERI FAKFAK KELAS II

JLN. YOS SUDARSO NO. 92 TELP. (0956) 22413




Tlp. (0956) 22413 FAX (0956) 22413

Website : www.pn_fakfak.go.id

Email : pengadilan_negeri_fakfak@yahoo.co.id

DAFTAR HADIR APEL SORE

NO	N A M A	PARAF	KET
1	TRI Murguo		
2	Corryan P. A		
3	Peyuold Nibirin		
4	IVAN BHAKTI .Y		
5	Adi fird		
6	Engelberthn .T		
7	Fredal Adla		
8	IRLANTO .T		
9	ISKRET LOARON		
10	Yeni .A.		
11	Windi Y -		
12	Yulan P. H		
13	Juniar - P		
14	Rika m Sari		
15	Roberta. Tawinasuru		
16	J. Siahaya		
17	Agnus		

18	Johanes M Rahadat		
19	Yuni DC K		
20	T. Wiratrar		
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			

Mengetahui :
Ketua



TRI MARGONO, SH
NIP. 19760211 200212 004

Petugas Absensi



LA IDU
NIP. 19650815 199303 1 003



PENGADILAN NEGERI FAKFAK

JALAN YOS SUDARSO NO. 92. Tlp/Fax (0956) 22413

Website : www.pn-fakfak.go.id

Email : pengadilan_negeri_fakfak@yahoo.co.id

FAKFAK PAPUA BARAT

Fakfak, 10 Maret 2022

UNDANGAN RAPAT

<u>AGENDA ACARA</u> Rapat Penjaringan Awal Penunjukan Role Model pada Pengadilan Negeri Fakfak	<u>PIMPINAN RAPAT</u> Reynold S.E.M.P. Nababan, S.H.
<u>WAKTU PELAKSANAAN</u> HARI : Kamis TANGGAL : 10 Maret 2022 PUKUL : 13.00 WIT - Selesai	<u>PETUGAS</u> NOTULIS : Windi Y.S Nainggolan, S.H. DOKUMENTASI : Juniar Patimbang, A.md.
	<u>TEMPAT</u> Ruang Rapat
<u>PESERTA RAPAT</u> 1. Panitera; 2. Sekretaris; 3. Hakim Senior; 4. Kasubag Kepegawaian dan Ortala.	
<u>SIFAT</u> 1. Harus Diikuti Oleh Seluruh Peserta Rapat; 2. Hadir Di Ruang Rapat 5 Menit Sebelum Acara Dimulai; 3. Mematuhi Protokol Kesehatan (3M).	
<p>Mengetahui Ketua Tim</p> <p>TTD</p> <p><u>REYNOLD S.E.M.P. NABABAN, S.H.</u> NIP. 19860408 201712 1 002</p>	



PENGADILAN NEGERI FAKFAK

Jalan Yos Sudarso No. 92. Tlp/Fax (0956) 22413

Website:www.pn-fakfak.go.id

Email : pengadilan_negeri_fakfak@yahoo.co.id

FAKFAK-PAPUA BARAT

**BERITA ACARA HASIL RAPAT
PENJARINGAN AWAL PENUNJUKAN ROLE MODEL
PADA PENGADILAN NEGERI FAKFAK
Nomor : 1 /BA/PN.FFK/III/2022**

Pada hari ini, Kamis tanggal Sepuluh, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, Pimpinan unit/bagian menyampaikan hasil seleksi Penjaringan Awal Penunjukan Role Model kepada Tim Penunjukan Role Model Pengadilan Negeri fakfak, bertempat di Ruang Rapat Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II.

Dalam Rapat Tim Penilaian Role Model tersebut yang hadir adalah :

1. REYNOLD S.E.M.P. NABABAN, S.H.
KETUA
2. IRANDA CARECA ANINDITYO, S.H.
ANGGOTA
3. YURICE J.C. REMBET, S.T.
ANGGOTA
4. LA IDU
SEKRETARIS

TandaTangan

Dengan hasil sebagaimana tertera dalam daftar hasil Rapat Penilaian Role Model yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Fakfak, 10 Maret 2022

Ketua Tim


REYNOLD S.E.M.P. NABABAN, S.H.
NIP. 19860408 201712 1 002

Sekretaris Tim


LA IDU
NIP. 19652815 199303 1 003

**NOTULENSI
RAPAT TIM PENJARINGAN AWAL PENUNJUKAN ROLE MODEL
PADA PENGADILAN NEGERI FAKFAK**

HARI / TANGGAL RAPAT	Kamis, 10 Maret 2022	KETERANGAN LAMPIRAN	
LOKASI RAPAT	Ruang Rapat Pengadilan Negeri Fakfak	<input checked="" type="checkbox"/>	Pengumuman
WAKTU MULAI	10.00 WIT SELESAI 11.00 WIT	<input checked="" type="checkbox"/>	Daftar Hadir
POKOK BAHASAN	Rapat Penjaringan Awal Penunjukan Role Model	<input checked="" type="checkbox"/>	Dokumentasi
PIMPINAN RAPAT	: Reynold S.E.M.P. Nababan, S.H	<input checked="" type="checkbox"/>	Notulen
NOTULEN	: Windi Yunita Sari Nainggolan, S.H.	Beri tanda berikut	<input checked="" type="checkbox"/>

PENJARINGAN AWAL PENUNJUKAN ROLE MODEL

Pada hari ini, Kamis tanggal 10 Maret 2022, Pimpinan unit/bagian menyampaikan hasil seleksi Penjaringan Awal Penunjukan Role Model kepada Tim Penunjukan Role Model Pengadilan Negeri fakfak, bertempat di Ruang Rapat Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II.

A. PENGANTAR:

Salam pembuka oleh pimpinan rapat :

Assalamualaikum Wr.Wb.

Syaloom,

Salam sejahtera untuk kita semua.

B. PEMBUKAAN:

Rapat Tim Penjaringan Awal Penunjukan Role Model, dibuka dan dipimpin oleh Bapak Reynold S.E.M.P. Nababan, S.H selaku Ketua Tim. Rapat Penjaringan Penunjukan Role Model adalah factor penting dalam hal perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Satuan Kerja di bawahnya. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan adanya individu-individu atau kelompok anggota organisasi dari tingkat pimpinan sampai dengan pegawai untuk dapat menggerakkan perubahan pada lingkungan kerjanya sesuai dengan nilai-nilai yang dianut organisasi, sebagai contoh dalam berperilaku (Role Model) bagi seluruh individu anggota organisasi yang ada di lingkungan organisasinya.

C. PEMBAHASAN:

Setelah rapat dibuka oleh Ketua Tim, selanjutnya dilakukan musyawarah oleh semua pimpinan unit/bagian yang hadir, maka pimpinan unit/bagian memutuskan berdasarkan Surat

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1389/DJU/SK/KP.02.1/6/2021 tanggal 9 Juni Tahun 2021 tentang Pembaruan Pedoman Penetapan Role Model dan Pemilihan Agen Perubahan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Satuan Kerja Yang Berada Di Bawahnya, dan Hasil dari Pengambilan Suara, maka pimpinan bagian/unit, yang terdiri dari :

1. Reynold S.E.M.P Nababan, S.H sebagai Ketua Tim Penunjukan Role Model.
2. Iranda Careca Anindityo, S.H sebagai Anggota Tim Penunjukan Role Model.
3. Yurice J.C. Rembet, S.T sebagai Anggota Tim Penunjukan Role Model.
4. La Idu sebagai Sekretaris Tim Penunjukan Role Model.

Masukan-masukan dan pertimbangan-pertimbangan :

- Bapak La Idu sebagai Kasubag Kepegawaian dan Ortala Pengadilan Negeri Fakfak : Untuk Role Model sebaiknya 1 (satu) saja, melihat dari Pengadilan Negeri yang lainnya juga hanya ada 1 (satu) Role Model. Selain itu, melihat kondisi di Pengadilan Negeri Fakfak sendiri terdapat kekurangan pegawai serta rata-rata pegawai sudah pernah ditunjuk sebagai Role Model. Yang belum pernah dipilih menjadi Role Model yaitu Bapak Rizal Asbar sebagai Kasubag Umum-Keluarga dan Bapak Sandar Sitanggung sebagai Panitera Pengadilan Negeri Fakfak.
- Ibu Yurice J.C. Rembet sebagai Sekretaris Pengadilan Negeri Fakfak : Jikalau memang harus memilih 2 (dua) kandidat, lebih menitik beratkan kepada Bapak Panitera. Tetapi alangkah baiknya untuk Role Model kali ini dipilih 1 (satu) saja dulu yaitu Bapak Ketua Pengadilan Negeri Fakfak, kecuali untuk pemilihan Agen Perubahan boleh menunjuk kandidat lebih dari 2 (dua) orang.
- Bapak Iranda Careca Anindityo sebagai Hakim Pengadilan Negeri Fakfak : Menurut saya kandidat untuk Role Model lebih baik 2 (dua) orang. Untuk Bapak Ketua memang otomatis menjadi Role Model dan memilih 1 (satu) dari pejabat baik dari bagian kesekretariatan atau kepaniteraan untuk menjadi Role Model.
- Ibu Yurice J.C. Rembet sebagai Sekretaris Pengadilan Negeri Fakfak : Kalau memilih 2 (dua) kandidat saya memilih Bapak Ketua dan Bapak Panitera.
- Bapak Iranda Careca Anindityo sebagai Hakim Pengadilan Negeri Fakfak : Menurut saya, kita jangan melihat dari apakah mereka sudah atau belum pernah menjadi Role Model. Karena pada dasarnya Role Model ini adalah sebagai cerminan pengadilan, kecuali diluar dari pada Role Model (*Reward and Punishment*).
- Bapak Reynold S.E.M.P Nababan : Jadi hasil dari rapat ini disetujui 2 (dua) kandidat sebagai Role Model pada Pengadilan Negeri Fakfak yaitu Bapak Tri Margono sebagai Ketua Pengadilan Negeri Fakfak dan Ibu Yurice J.C Rembet sebagai Sekretaris Pengadilan Negeri Fakfak.

Dari Masukan-masukan serta pertimbangan-pertimbangan untuk kemajuan Pengadilan Negeri Fakfak dan peningkatan karir bagi para pegawai pada Pengadilan Negeri Fakfak maka Tim Penjaringan memilih Ketua dan Sekretaris Pengadilan Negeri Fakfak karena sesuai dengan Kriteria Penilaian Role Model.

**HASIL RAPAT
TIM PENJARINGAN AWAL PENUNJUKAN ROLE MODEL
Fakfak, 10 Maret 2022**

1. NAMA : **TRI MARGONO, S.H.**
NIP : 19760211 200212 1 004
PANGKAT/GOL.RUANG : Pembina (IV/a)
JABATAN : Ketua
SATUAN KERJA : Pengadilan Negeri Fakfak

2. NAMA : **YURICE J.C. REMBET, S.T.**
NIP : 19870712 201101 2 022
PANGKAT/GOL.RUANG : Penata (III/c)
JABATAN : Sekretaris
SATUAN KERJA : Pengadilan Negeri fakfak

Role Model yang dipilih diatas melalui seleksi internal yang dilakukan oleh Tim Penjaringan Penunjukan Role Model pada Pengadilan Negeri Fakfak.

D. PENUTUP:

Demikian Hasil Rapat Penjaringan Awal Penunjukan Role Model pada Pengadilan Negeri Fakfak yang ditandatangani oleh Bapak Reynold S.E.M.P Nababan, S.H selaku Ketua Tim Penjaringan.

Notulen

**Mengetahui
Ketua Tim**



WINDI YUNITA SARI NAINGGOLAN, S.H



REYNOLD S.E.M.P. NABABAN, S.H.
NIP. 19860408 201712 1 002



PENGADILAN NEGERI FAKFAK KELAS II

JLN. YOS SUDARSO NO. 92 TELP. (0956) 22413

Tlp. (0956) 22413 FAX (0956) 22413

Website :www.pn_fakfak.go.id

Email : pengadilan_negeri_fakfak@yahoo.co.id

DAFTAR HADIR

RAPAT PENJARINGAN AWAL PENUNJUKA ROLE MODEL

HARI : Kamis

TANGGAL : 10 Maret 2022

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Reynold Nababan	Hakim	
2	Iranda Careca A	Hakim	
3	Yurice J.C. Rembet	Sekretaris	
4	LA Ibu.	KASABAG. Kepeg. OR	
5	Windi Yunita.	Staf Hukum	
6	Juniar. P	Staf (CLP) ORTALA	
7			

Mengetahui
Pimpinan Rapat

REYNOLD S.E.M.P. NABABAN, S.H.
NIP. 19860408 201712 1 002

DOKUMENTASI





PENGADILAN NEGERI FAKFAK

Jalan Yos Sudarso No. 92. Tlp/Fax (0956) 22413

Website :www.pn-fakfak.go.id

Email : pengadilan_negeri_fakfak@yahoo.co.id

FAKFAK PAPUA BARAT

Fakfak, 10 Maret 2022

UNDANGAN

<u>AGENDA ACARA</u> Rapat Assessment Penunjukan Role Model Pengadilan Negeri Fakfak	<u>PIMPINAN RAPAT</u> Reynold S.E.M.P Nababan, S.H
<u>WAKTU PELAKSANAAN</u> HARI : Kamis TANGGAL : 10 Maret 2022 PUKUL : 13.00WIT - Selesai	<u>PETUGAS</u> NOTULIS : Windi Y.S Nainggolan, S.H. DOKUMENTASI : Juniar Patimbang, A.md.
	<u>TEMPAT</u> Ruang Rapat Lantai II
<u>PESERTA RAPAT</u> 1. Panitera; 2. Sekretaris; 3. Hakim Senior; 4. Kasubag Kepegawaian dan Ortala.	
<u>SIFAT</u> 1. Harus Diikuti Oleh Seluruh Peserta Rapat; 2. Hadir Di Ruang Rapat 5 Menit Sebelum Acara Dimulai; 3. Mematuhi Protokol Kesehatan (3M).	
<p>Mengetahui Ketua Tim,</p> <p>TTD</p> <p><u>REYNOLD S.E.M.P. NABABAN, S.H.</u> NIP. 19860408 201712 1 002</p>	



PENGADILAN NEGERI FAKFAK

Jalan Yos Sudarso No. 92. Tlp/Fax (0956) 22413

Website: www.pn-fakfak.go.id

Email : pengadilan_negeri_fakfak@yahoo.co.id
FAKFAK-PAPUA BARAT

BERITA ACARA HASIL RAPAT ASSESSMENT PENUNJUKAN ROLE MODEL PADA PENGADILAN NEGERI FAKFAK

Pada hari ini, Kamis tanggal 10 Maret 2022, Tim Penunjukan Role Model Pengadilan Negeri Fakfak mengadakan Rapat Assesment Penunjukan Role Model pada Pengadilan Negeri Fakfak. Pada rapat ini dipimpin oleh Bapak Reynold S.E.M.P. Nababan, S.H selaku Ketua Tim.

Dalam Rapat Tim Penilai Role Model tersebut dihadiri oleh :

1. Reynold S.E.M.P Nababan, S.H sebagai Ketua Tim Penilai.
2. Iranda Careca Anindityo, S.H sebagai Anggota Tim Penilai.
3. Yurice J.C. Rembet, S.T sebagai Anggota Tim Penilai.
4. La Idu sebagai Sekretaris Tim Penilai.

Setelah rapat dibuka oleh Ketua Tim Penilai, selanjutnya dilakukan musyawarah oleh semua anggota tim yang hadir, maka Tim Penilaian memutuskan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1389/DJU/SK/KP.02.1/6/2021 tanggal 9 Juni Tahun 2021 tentang Pembaruan Pedoman Penetapan Role Model dan Pemilihan Agen Perubahan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Satuan Kerja Yang Berada Di Bawahnya dan Hasil dari pengambilan suara, maka adapun tahap uraian kegiatan Assesment Penunjukan Role Model adalah sebagai berikut :

1. Assesment oleh Tim Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Negeri Fakfak

Assesment dilakukan pada Kamis, 10 Maret 2022 oleh Tim Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Negeri Fakfak, dengan memilih 2 (dua) Role Model yang terpilih, yaitu :

- | | |
|-------------------|----------------------------|
| 1) NAMA | : TRI MARGONO, S.H. |
| NIP | : 19760211 200212 1 004 |
| PANGKAT/GOL.RUANG | : Pembina (IV/a) |
| JABATAN | : Ketua |
| SATUAN KERJA | : Pengadilan Negeri Fakfak |

2) NAMA : YURICE J.C. REMBET, S.T.
NIP : 19870712 201101 2 022
PANGKAT/GOL.RUANG : Penata (III/c)
JABATAN : Sekretaris
SATUAN KERJA : Pengadilan Negeri fakfak

Assessment ini dilakukan untuk mengetahui kepribadian potensi dan kemampuan seorang individu sebagai role model dan dilakukan secara sederhana. Hasilnya digunakan sebagai pertimbangan role model dan program pengembangan peningkatan integritas dan kapabilitas.

2. Rekomendasi dari Ketua Tim Penunjukan Role Model


Ketua Tim Penunjukan Role Model memberikan rekomendasi sesuai dengan hasil assessment dan dilakukan penetapan Role Model, yang terdiri dari :

- a) Tri Margono, S.H. sebagai Role Model.
- b) Yurice J.C. Rembet, S.T. sebagai Role Model.

Demikian Hasil Rapat Assessment Penunjukan Role Model pada Pengadilan Negeri Fakfak yang ditandatangani oleh Bapak Renynold S.E.M.P Nababan, S.H selaku Ketua Tim Penjaringan.

Fakfak, 10 Maret 2022


Ketua Tim Penunjukan Role Model
Pengadilan Negeri Fakfak


REYNOLD S.E.M.P. NABABAN, S.H.
NIP. 19860408 201712 1 002

Sekretaris Tim Penunjukan Role Model
Pengadilan Negeri Fakfak


LA IDU
NIP. 19652815 199303 1 003

Anggota Tim Penunjukan Role Model
Pengadilan Negeri Fakfak


YURICE J.C. REMBET, S.T.
NIP. 19870712 201101 2 022

Anggota Tim Penunjukan Role Model
Pengadilan Negeri Fakfak


IRANDA CARECA ANINDITYO, S.H.
NIP. 19900311 201712 1 003

Notulis



Windi Yunita Sari Nainggolan, S.H.



PENGADILAN NEGERI FAKFAK KELAS II

JLN. YOS SUDARSO NO. 92 TELP. (0956) 22413

Tlp. (0956) 22413 FAX (0956) 22413

Website : www.pn_fakfak.go.id

Email : pengadilan_negeri_fakfak@yahoo.co.id

DAFTAR HADIR

RAPAT ASSESMENT PENUNJUKAN ROLE MODEL

HARI : Kamis

TANGGAL : 10 Maret 2022

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Reynold Nababan	Hakim	
2	Iranda Careca Anindhyo	Hakim	
3	Ut Ibu.	KAPAGAS kepeg.	
4	Rurice J.C. Pembel	sekretaris	
5	Windi Yunita	Staf Hukum	
6	Juniar - PRAKUSMAN	Staf kepeg.	
7			

Mengetahui
Pimpinan Rapat

REYNOLD S..E.M.P. NABABAN, S.H.
NIP. 19860408201712 1 002

DOKUMENTASI



DOKUMENTASI MENTOR

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN NEGERI FAKFAK KELAS II

Host_Vero
Muhammad Basri...
Rizki Pradipta Aji...
Anissa Mujaetho...
Erlina Mustika...

www.pn-fakfak.go.id | Facebook: Pengadilan Negeri Fakfak | Instagram: pn_fakfak | YouTube: Pengadilan Negeri Fakfak

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN NEGERI FAKFAK KELAS II


Mentoro USUH MAMPU
Rizki Pradipta Aji...
Anissa Mujaetho...
Rizki Pradipta Aji...
Erlina Mustika...
Abd. Hamid Sanjwing...
Hendryan Agus...
Daud Yusuf Priatnada...

www.pn-fakfak.go.id | Facebook: Pengadilan Negeri Fakfak | Instagram: pn_fakfak | YouTube: Pengadilan Negeri Fakfak

CHEKLIST


NO. 4.b

**PENETAPAN AGEN
PERUBAHAN**

 **PENGADILAN NEGERI FAKFAK KELAS II**
Jl. Yos Sudarso No.92
Telp / Fax : (0956) 22413 Email: pengadilan_negeri_fakfak@yahoo.co.id
Web : http://www.pn-fakfak.go.id

AGEN PERUBAHAN

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor : W30-UG/BS/KPN/SK/II/2022
Semester I Tahun 2022



YULIAN RISKI ANANDA, A.Md.A.B
STAF PERDATA
Profesional, Ramah, Informatif, Melayani,
Akuntabel, Solid, Objektif, Legal, Andal, Transparan, Adil

DOKUMENTASI AGEN PERUBAHAN PADA PENGADILAN NEGERI FAKFAK



PENGADILAN NEGERI FAKFAK KELAS II

Jalan Yos Sudarso No.92 Wagom

Tlp : (0956) 22413 FAX : (0956) 22413

Website : www.pn-fakfak.go.id

Email : pengadilan_negeri_fakfak@yahoo.co.id

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK KELAS II

NOMOR : W30.U6/61/KPN/SK/II/2022

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENILAI AGEN PERUBAHAN
PADA PENGADILAN NEGERI FAKFAK TAHUN 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK KELAS II

- MENIMBANG :
- Bahwa dalam rangka Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Negeri Fakfak diperlukan komitmen pimpinan sebagai Agen Perubahan untuk merubah pola pikir dan budaya kerja para pegawai di instansinya;
 - Bahwa perubahan pola pikir dan budaya kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terwujud apabila ada Agen Perubahan yang menggerakkan pegawai kearah professional;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b dipandang perlu dipilih Agen Perubahan dari unsur pegawai yang memenuhi kriteria untuk diangkat menjadi Agen Perubahan di Pengadilan Negeri Fakfak;
 - Bahwa demi kelancaran kegiatan pemilihan Agen Perubahan perlu menetapkan Tim Penilai Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Fakfak.

- MENINGGAT :
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 - Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 - Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/01/M.PAN/01/2007, tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
 - Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
 - Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor : 2189/DJU/SK/KP001/12/2017 tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan Pengembangan Perilaku dan Budaya Kerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Tahun 2017;

8. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor : 1467a/DJU/SK/KP02.1/6/2018 tentang Pedoman Pemilihan Agen Perubahan Sebagai Role Model pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK KELAS II TENTANG PENUNJUKAN TIM AGEN PERUBAHAN PADA PENGADILAN NEGERI FAKFAK KELAS II.
- PERTAMA : Menetapkan nama-nama yang ada di dalam Tim Penilai Agen Perubahan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan Tim untuk melakukan penilaian dan seleksi internal kepada pimpinan yang dianggap memenuhi kriteria untuk diangkat menjadi Agen Perubahan.
- KETIGA : Tim Penilai Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Fakfak bertugas untuk memilih agen perubahan berdasarkan kriteria penilaian sebagai berikut :
1. Berstatus sebagai Aparatur Negeri Fakfak;
 2. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai;
 3. Bertanggungjawab atas setiap tugas yang diberikan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 4. Taat aturan disiplin dan kode etik pegawai serta konsisten terhadap penegakan aturan disiplin dan kode etik;
 5. Mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan organisasinya;
 6. Inovatif dan proaktif terkait dengan pelaksanaan tugas fungsi dan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal yang telah ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Fakfak
Pada tanggal : 3 Februari 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK



ZRI MARGONO, SH
NIP. 19760211 200212 1 004

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK
NOMOR : W30-U6/ 61 /KPN/SK/ II/2022
TANGGAL : 2 Februari 2022
TENTANG : PENUNJUKAN TIM AGEN PERUBAHAN
PADA PENGADILAN NEGERI FAKFAK KELAS II

**TIM AGEN PERUBAHAN
PADA PENGADILAN NEGERI FAKFAK TAHUN 2022**

No	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Reynold S.E.M.P. Nababan, S.H NIP. 19860408 201712 1 002	Penata Muda (III/a)	Hakim	Ketua Tim
2.	Sandar Sitanggang, S.H NIP. 19660810 199103 1 001	Penata Tk. I (III/d)	Panitera	Anggota
3.	Yurice J.C. Rembet, S.T NIP. 19870712 201101 2 022	Penata (III/c)	Sekretaris	Anggota
4.	La Idu NIP. 19650815 199303 1 003	Penata Muda Tk.I (III/b)	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Sekretaris

Ditetapkan di : Fakfak
Tanggal : 3 Februari 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK


TRIMARGONO, SH
NIP. 19760211 200212 1 004



PENGADILAN NEGERI FAKFAK

JALAN YOS SUDARSO NO. 92. Tlp/Fax (0956) 22413

Website : www.pn-fakfak.go.id

Email : pengadilan_negeri_fakfak@yahoo.co.id

FAKFAK, PATAJA BARAT

Fakfak, 10 Maret 2022

UNDANGAN RAPAT

<u>AGENDA ACARA</u> Rapat Perencanaan Awal Penunjukan Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Fakfak	<u>PIMPINAN RAPAT</u> Reynold S.E.M.P. Nababan, S.H.
<u>WAKTU PELAKSANAAN</u> HARI : Kamis TANGGAL : 10 Maret 2022 PUKUL : 13.00 WIT - Selesai	<u>PETUGAS</u> NOTULIS : Windi Y.S Nainggolan, S.H. DOKUMENTASI : Juniar Patimbang, A.md.
	<u>TEMPAT</u> Ruang Rapat
<u>PESERTA RAPAT</u> 1. Panitera; 2. Sekretaris; 3. Hakim Senior; 4. Kasubag Kepegawaian dan Ortala.	
<u>SIFAT</u> 1. Harus diikuti Oleh Seluruh Peserta Rapat; 2. Hadir Di Ruang Rapat 5 Menit Sebelum Acara Dimulai; 3. Mematuhi Protokol Kesehatan (3M).	
Mengetahui Ketua Tim TTD <u>REYNOLD S.E.M.P. NABABAN, S.H.</u> NIP. 19860408 201712 1 002	



PENGADILAN NEGERI FAKFAK

Jalan Yos Sudarso No. 92. Tlp/Fax (0956) 22413

Website: www.pn-fakfak.go.id

Email : pengadilan_negeri_fakfak@yahoo.co.id
FAKFAK-PAPUA BARAT

BERITA ACARA HASIL RAPAT PENJARINGAN AWAL PENUNJUKAN AGEN PERUBAHAN PADA PENGADILAN NEGERI FAKFAK Nomor : /EA/PN.FEK/III/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal Sepuluh, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, Pimpinan unit/bagian menyampaikan hasil seleksi Penjaringan Awal Penunjukan Agen Perubahan kepada Tim Penunjukan Agen Perubahan Pengadilan Negeri fakfak, bertempat di Ruang Rapat Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II.

Dalam Rapat Seleksi Penjaringan Awal Penunjukan Agen Perubahan tersebut yang hadir adalah :

TandaTangan

1. REYNOLD S.E.M.P. NABABAN, S.H.
KETUA
2. IRANDA CARECA ANINDITKO, S.H.
ANGGOTA
3. YURICE L.C. REMBET, S.T.
ANGGOTA
4. LAIJU
SEKRETARIS

Dengan hasil sebagaimana tertera dalam daftar hasil Rapat Seleksi Penjaringan Awal Penunjukan Agen Perubahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Fakfak, 10 Maret 2022

Ketua Tim

REYNOLD S.E.M.P. NABABAN, S.H.
NIP. 198604082007121002

Sekretaris Tim

LAIJU
NIP. 196528151993031003

**NOTULENSI
RAPAT PENJARINGAN AWAL PENUNJUKAN AGEN PERUBAHAN
PADA PENGADILAN NEGERI FAKFAK**

HARI / TANGGAL RAPAT	Kamis, 10 Maret 2022	KETERANGAN LAMPIRAN	
LOKASI RAPAT	Ruang Rapat Pengadilan Negeri Fakfak	√	Pengumuman
WAKTU MULAI	10.00 WIT	SELESAI	11.00 WIT
POKOK BAHASAN	Rapat Penjaringan Awal Penunjukan Agen Perubahan Pengadilan Negeri Fakfak	√	Daftar Hadir
PIMPINAN RAPAT	: Reynold S.E.M.P. Nababan, S.H	√	Dokumentasi
NOTULEN	: Windi Yunita Sari Nainggolan, S.H.	√	Notulen
		Deri tanda berikut	√

PENJARINGAN AWAL PENUNJUKAN AGEN PERUBAHAN

Pada hari ini, Kamis tanggal 10 Maret 2022, Pimpinan unit/bagian menyampaikan hasil seleksi Penjaringan Awal Penunjukan Agen Perubahan Pengadilan Negeri Fakfak bertempat di Ruang Rapat Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II.

A. PENGANTAR:

Salam pembuka oleh pimpinan rapat :

Assalamualaikum Wr.Wb.

Syaloom,

Salam sejahtera untuk kita semua.

B. PEMBUKAAN:

Rapat Tim Penjaringan Awal Penunjukan Agen Perubahan, dibuka dan dipimpin oleh Bapak Reynold S.E.M.P. Nababan, S.H selaku Ketua Tim. Rapat Penjaringan Awal Penunjukan Agen Perubahan adalah faktor penting dalam hal perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Satuan Kerja di bawahnya. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan adanya individu-individu atau kelompok anggota organisasi dari tingkat pimpinan sampai dengan pegawai untuk dapat menggerakkan perubahan pada lingkungan kerjanya sesuai dengan nilai-nilai yang dianut organisasi. Individu atau kelompok anggota ini disebut dengan Agen Perubahan.

C. PEMBAYASAN:

Setelah rapat dibuka oleh Ketua Tim, selanjutnya dilakukan musyawarah oleh semua pimpinan unit/bagian yang hadir, maka pimpinan unit/bagian memutuskan berdasarkan Surat

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1389/DJU/SK/KP.02.1/6/2021 tanggal 9 Juni Tahun 2021 tentang Pembaruan Pedoman Penetapan Role Model dan Pemilihan Agen Perubahan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Satuan Kerja Yang Berada Di Bawahnya, dan Hasil dari Pengambilan Suara, maka pimpinan bagian/unit, yang terdiri dari :

1. Reynold S.E.M.P Nababan, S.H sebagai Ketua Tim Penunjukan Agen Perubahan.
2. Iranda Careca Anindityo, S.H sebagai Anggota Tim Penunjukan Agen Perubahan.
3. Yurice J.C. Pembet, S.T sebagai Anggota Tim Penunjukan Agen Perubahan.
4. La Ida sebagai Sekretaris Tim Penunjukan Agen Perubahan.

Memilih beberapa staf sebagai berikut karena sesuai dengan Kriteria Penilaian Agen Perubahan :

1. Yulian Riski Ananda, A.md.A.B. sebagai Pengadministrasian Penanganan Perkara.
2. Sandar Sitanggang, S.H. sebagai Panitera.
3. Rizal Asbar, S.H. sebagai Kasubag Umum dan Keuangan.

Adapun tahapan uraian kegiatan Penjaringan Awal Penunjukan Agen Perubahan adalah sebagai berikut :

- a) Seleksi internal oleh pimpinan unit/bagian masing-masing sesuai kriteria agen perubahan.

Agen Perubahan dipilih melalui seleksi internal dengan melihat dari 6 (enam) kriteria. Adapun kandidat penunjukan Agen Perubahan terdiri dari :

No.	Nama Pegawai	Bagian
1.	Yulian Riski Ananda, A.md.A.B.	Pengadministrasian Penanganan Perkara
2.	Sandar Sitanggang, S.H.	Panitera
3.	Rizal Asbar, S.H.	Kasubag Umum dan Keuangan

- b) Pimpinan unit/bagian menyampaikan hasil seleksi kepada Tim Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Negeri Paljak.

Adapun 6 (enam) Kriteria Agen Perubahan yang dipilih melalui seleksi internal terdiri dari:

No.	Nama Pegawai	1	2	3	4	5	Nilai Akhir
1.	Yulian Riski Ananda, A.md.A.B.	16	16	16	12	16	76
2.	Sandar Sitanggang, S.H.	10	13	12	14	12	61
3.	Rizal Asbar, S.H.	16	12	16	13	11	68

Keterangan :

1. Disiplin;
2. Tanggung jawab;

3. Perilaku;
4. Komunikasi;
5. Inovasi.

Kategori nilai :

Kurang	C	1
Cukup	B-	2
Baik	B	3
Sangat baik	A	4

c) Penelaahan oleh Tim Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Negeri Fakfak :

No.	Nama Pegawai	Bagian	Skor	Peringkat
1.	Yulian Riski Ananda, A.md.A.B.	Pengadministrasian Penanganan Perkara	76	1
2.	Dizel Asbar, S.H.	Kasubag Umum dan Keuangan	68	2
3.	Flender Sitanggang, S.H.	Panitera	61	3

Dari Hasil seleksi Penjaringan Awal Penunjukan Agen Perubahan, maka Tim Penjaringan memilih 1 (satu) orang dari ketiga kandidat penunjukan agen perubahan untuk ditetapkan sebagai Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Fakfak karena sesuai dengan Kriteria Penilaian Agen Perubahan.

HASIL RAPAT
TIM PENJARINGAN AWAL PENUNJUKAN AGEN PERUBAHAN
Fakfak, 10 Maret 2022

1. NAMA : YULIAN RISKI ANANDA, A.MD.A.B.
 NIP : 19980701 202012 1 005
 PANGKAT/GOLONGAN : Pengatur (IV/c)
 JABATAN : Pengadministrasian Penanganan Perkara
 SATUAN KERJA : Pengadilan Negeri Fakfak

Agan Perubahan yang dipilih diatas melalui seleksi internal yang dilakukan oleh Tim Penjaringan Penunjukan Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Fakfak.

D. PENUTUP:

Demikian Hasil Rapat Penjaringan Awal Penunjukan Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Fakfak yang ditandatangani oleh Bapak Reynold S.E.M.P Nababan, S.H selaku Ketua Tim Penjaringan.

Natulen

Mengetahui
Ketua Tim



WINDI YUNITA SARI NAINGGOLAN, S.H



REYNOLD S.E.M.P. NABABAN, S.H.
NIP. 19860403 201712 1 002



PENGADILAN NEGERI FAKFAK KELAS II

JLN. YUS SUDARSO NO. 92 TELP. (0956) 22413

Tlp. (0956) 22413 FAX (0956) 22413

Website: www.pn_fakfak.go.id

Email: pengadilan_negeri_fakfak@yahoo.co.id

DAFTAR HADIR

REPAT PENJARINGAN AWAL PENUNJUKAN AGEN PERUBAHAN

HARI : Kamis

TANGGAL : 31 Maret 2022

NO	N.A.M.A.	JABATAN	PARAF
1	Reynold Nababan	Hakim	
2	Iranda Careca Anindhyo	Hakim	
3	Yurice J.C. Rembet	Sekretaris	
4	Uf m.	RASBAG Repet. IT	
5	Winda Yunita	Staf Hukum	
6	Juniar Pakianqas	Staf per. ortaga	
7			

Mengetahui
Pimpinan Rapat

REYNOLD S.E.M.P. NABABAN, S.H.
NIP. 19860403201712 1 002

DOKUMENTASI





PENGADILAN NEGERI FAKFAK KELAS II

Jalan Yos Sudarso No.92 Wagom

Tlp : (0956) 22413 FAX : (0956) 22413

Website : www.pn-fakfak.go.id

Email : pengadilan_negeri_fakfak@yahoo..co.id

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK KELAS II
W30.U6/ 03/KPN/SK/III/2022

TENTANG
PENUNJUKAN AGEN PERUBAHAN
PADA PENGADILAN NEGERI FAKFAK KELAS II
TAHUN 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK KELAS II

- Membaca : 1. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II Nomor:W30.U6/61/KPN/SK/II/2022, tanggal 03 Februari 2022, tentang Penunjukan Tim Penilai Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II
- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan Zona Integritas Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II, maka perlu ditunjuk Agen Perubahan dari Unsur Hakim, Pejabat Struktural, dan Pejabat Teknis yang bisa dipercaya dan bisa dijadikan contoh atau dapat diteladani pada Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II;
2. Bahwa dari hasil musyawarah Rapat Tim Penilai Agen Perubahan pada hari Kamis 10 Maret 2022, telah terpilih Agen Perubahan Pengadilan Negeri Fakfak untuk periode 6(enam) Bulan;
3. Bahwa Pegawai yang terpilih dinilai cakap dan mampu serta memenuhi Standar kriteria yang terdapat dalam Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MARI No. 1163/DJU/SK/KP02.1/4/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MARI No. 1467a/DJU/SK/KP.02.1/6/2018 tentang Pedoman Pemilihan Agen Perubahan sebagai Role Model pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor: 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- c. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- d. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: I-144/KMA/SK/I/2011, tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
- e. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 012.A/SK/SK/III/2010 tentang Pembentukan Tim Pengembangan Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil;

- g. Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MARI No. 1163/DJU/SK/KF02.1/4/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MARI No. 1467a/DJU/SK/KP.02.1/6/2018 tentang Pedoman Pemilihan Agen Perubahan sebagai Role Model pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK KELAS II TENTANG PENUNJUKAN AGEN PERUBAHAN PADA PENGADILAN NEGERI FAKFAK KELAS II TAHUN 2022;
- Pertama : Menunjuk saudara:
1. NULIAN RISKI NIANDA, A.Md.A.P. NIP: 199807012020121005.
Jabatan: Pengadministrasi Registrasi Perkara Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II sebagai Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II.
- Kedua : 1. Peran dan Tugas Agen Perubahan:
- a. Sebagai katalis, dapat meyakinkan dan menggerakkan seluruh pegawai di Pengadilan Tingkat Pertama akan pentingnya perubahan;
 - b. Sebagai pemberi solusi, memberikan solusi terhadap kendala/permasalahan unit kerja dalam melaksanakan perubahan;
 - c. Sebagai mediator yang membantu proses perubahan dan penyebaran inovasi;
 - d. Sebagai penghubung dengan sumber-sumber yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi;
2. Mekanisme Kerja:
- a. Agen perubahan bertanggung jawab langsung kepada pimpinan organisasi;
 - b. Agen perubahan menyusun rencana kerja individu dengan persetujuan pimpinan organisasi;
 - c. Agen perubahan melaksanakan rencana kerja dan melaporkan hasilnya kepada pimpinan organisasi (secara berkala) dengan tembusan kepada Tim RB Pengadilan tingkat Pertama;
 - d. Pimpinan unit kerja memberikan dukungan dan memonitor secara berkala pelaksanaan rencana kerja agen perubahan;
 - e. Tim RB Pengadilan Tingkat Pertama mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja agen perubahan;
 - f. Tim RB Pengadilan Tingkat Pertama memfasilitasi pertemuan antara agen perubahan/forum agen perubahan.
3. Rencana Kerja Agen Perubahan:
- a. Meliputi rencana kerja agen perubahan;
 - b. Disampaikan kepada pimpinan organisasi dengan tembusan Tim RB Kemen PP RB Pengadilan Tingkat Pertama (melalui ketua);
 - c. Sesuai kebutuhan unit kerja, selaras dengan nilai-nilai organisasi, isu strategis, Road Map RB Pengadilan tingkat Pertama;
 - d. Penyusunannya memperhatikan unsur spesifik, terukur, logis, periode waktu;

- e. Rencana kerja agen perubahan dapat dituangkan dalam formulir ini:

Formulir Rencana Kerja Agen Perubahan

No.	Kegiatan	Sasaran	Target	Waktu	keterangan

4. Pembinaan dan Penghargaan:

- a. Pembinaan bagi agen perubahan dapat dilakukan melalui pelatihan antara lain tentang pencegahan korupsi, integritas, teknik, dan strategis komunikasi;
- b. Penghargaan bagi agen perubahan dapat diberikan berupa sertifikat/piagam penghargaan dari Ketua Pengadilan Tingkat Pertama. Selanjutnya sertifikat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bahan kenaikan pangkat/jabatan, pemberian fasilitas kerja, studi banding ke dalam/luar negeri atau tugas belajar;

Ketiga

: Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Keempat

: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 03 Januari 2022 sampai dengan 31 Juli 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Fakfak

Tanggal : 10 Maret 2022



PENGADILAN NEGERI FAKFAK

[Signature]
K. MARGONO, S.H.

NID. 19750211 200212 1 004



PENGADILAN NEGERI FAKFAK

Jalan Yos Sudarso No. 02. Tlp/Fax : (0956) 22413

Website : www.pn-fakfak.go.id

Email : pengadilan_negeri_fakfak@yahoo.co.id

FAKFAK PAPUA PARAT

Fakfak, 10 Maret 2022

UNDANGAN

<u>AGENDA ACARA</u>	<u>EMPINAN RAPAT</u>
Rapat Assesment Penunjukan Agen Perubahan Pengadilan Negeri Fakfak	Reynold S.E.M.P Nababan, S.H
<u>WAKTU PELAKSANAAN</u>	<u>PETUGAS</u>
HARI : Kamis TANGGAL : 10 Maret 2022 WAKTU : 13.00 WIT - Selesai	NOTULIS : Windi Y.S Nainggolan, S.H. DOKUMENTASI : Juniar Patimbang, A.md.
	<u>TEMPAT</u> Ruang Rapat Lantai II
<u>PESERTA RAPAT</u>	
1. Panitera; 2. Sekretaris; 3. Hakim Senior; 4. Kasubag Kepegawaian dan Organisasi.	
<u>SURAT</u>	
1. Harus Dilauti Oleh Seluruh Peserta Rapat; 2. Hadir Di Ruang Rapat 5 Menit Sebelum Acara Dimulai; 3. Mematuhi Protokol Kesehatan (3M).	
Mengetahui Ketua Tim, TTD <u>REYNOLD S.E.M.P. NABABAN, S.H.</u> NIP. 19860408 201712 1 002	



PENGADILAN NEGERI FAKFAK

Jalan Yos Sudarso No. 92. Tlp/Tax (0956) 22413

Website: www.pn-fakfak.go.id

Email : pengadilan_negeri_fakfak@yahoo.co.id

FAKFAK-PAPUA BARAT

BERITA ACARA HASIL RAPAT ASSESSMENT PENUNJUKAN AGEN PERUBAHAN PADA PENGADILAN NEGERI FAKFAK

Pada hari ini, Kamis tanggal 10 Maret 2022, Tim Penunjukan Agen Perubahan Pengadilan Negeri Fakfak mengadakan Rapat Assesment Penunjukan Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Fakfak. Pada rapat ini dipimpin oleh Bapak Reynold S.E.M.P. Nababan, S.H selaku Ketua Tim.

Dalam Rapat Tim Penilai Agen Perubahan tersebut dihadiri oleh :

1. Reynold S.E.M.P Nababan, S.H sebagai Ketua Tim Penilai.
2. Pranda Careca Anindityo, S.H sebagai Anggota Tim Penilai.
3. Yoice J.C. Rembet, S.T sebagai Anggota Tim Penilai.
4. Jo Ida sebagai Sekretaris Tim Penilai.

Setelah rapat dibuka oleh Ketua Tim Penilai, selanjutnya dilakukan musyawarah oleh semua anggota tim yang hadir, maka Tim Penilaian memutuskan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1339/DJU/SK/KP.02.1/6/2021 tanggal 9 Juni Tahun 2021 tentang Pemberuan Pedoman Penetapan Role Model dan Pemilihan Agen Perubahan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Satuan Kerja Yang Berada Di Negerinya dan Hasil dari pengumpulan suara, maka adapun tahapan uraian kegiatan Assesment Penunjukan Agen Perubahan adalah sebagai berikut :

1. Assesment oleh Tim Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Negeri Fakfak

Assesment dilakukan pada Kamis, 10 Maret 2022 oleh Tim Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Negeri Fakfak, dengan memilih 1 (satu) Agen Perubahan yang terpilih, yaitu :

No.	Nama Pegawai	Bagian	Keterangan Assesment
1	2	3	4
1.	Yulion Riski Ananda, A.Md.A.E.	Pengadministrasian Penganganan Perkara	- 6 (enam) kriteria Agen Perubahan dengan skor 76. - Komunikasi baik, yang bersangkutan dapat berinteraksi dengan pegawai lain dengan baik. - Yang bersangkutan

			<p>mempunyai tanggungjawab dan disiplin waktu yang baik dalam setiap pekerjaannya.</p> <p>- Yang bersangkutan mempunyai inisiatif dan kreativitas yang sangat bagus dalam segala hal.</p>
--	--	--	---

Assesment ini dilakukan untuk mengetahui kepribadian potensi dan kemampuan seorang individu sebagai Agen Perubahan dan dilakukan secara sederhana. Hasilnya digunakan sebagai pertimbangan Agen Perubahan dan program pengembangan peningkatan integritas dan kapabilitas.

2. Rekomendasi dari Ketua Tim Penunjukan Agen Perubahan


Ketua Tim Penunjukan Agen Perubahan memberikan rekomendasi sesuai dengan hasil assesment dan dilakukan penetapan Agen Perubahan, yang terdiri dari :

- a) Yulian Riski Ananda, A.md.A.B. sebagai Agen Perubahan.

Demikian Hasil Rapat Assesment Penunjukan Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Fakfak yang ditandatangani oleh Bapak Reynold S.E.M.P Nababan, S.H selaku Ketua Tim Penjaringan.

Fakfak, 10 Maret 2022


Ketua Tim Penunjukan Agen Perubahan
Pengadilan Negeri Fakfak


REYNOLD S.E.M.P. NABABAN, S.H.
NIP. 193604082017121002

Sekretaris Tim Penunjukan Agen Perubahan
Pengadilan Negeri Fakfak


Laidu
NIP. 196528151993031003


Anggota Tim Penunjukan Agen Perubahan
Pengadilan Negeri Fakfak


YULIAN RISKI ANANDA, S.T.
NIP. 199707122011012022

Anggota Tim Penunjukan Agen Perubahan
Pengadilan Negeri Fakfak


PRANDA CARECA ANINDITYO, S.H.
NIP. 199903112017121003

Notulis


Windi Yunita Sari Nainggolan, S.H.



PENGADILAN NEGERI FAKFAK KELAS II

JLN. MOS SUDARCO NO. 92 TELP. (0956) 22413

Tlp. (0956) 22413 FAX (0956) 22413

Website : www.pn_fakfak.go.id

Email : pengadilan_negeri_fakfak@yahoo.co.id

DAFTAR HADIR

RAPAT ASSESMENT PENUNJUKAN AGEN PERUBAHAN

HARI : Kamis

TANGGAL : 10 Maret 2022

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Reynold Nababan	Hakim	
2	Iranda Careca Aindhys	Hakim	
3	La. Hn.	Kasabng. Kepes. OT	
4	Yurice J.C. Rambel	Sekretaris	
5	Winda Junita	Staf Hukum	
6	Junior. Ratri Lubang	Staf kep. ortals	
7			

Mengetahui
Pimpinan Rapat

REYNOLD E.M.F. NABABAN, S.H.
NIP. 198604082017121002

DOKUMENTASI



CHEKLIST

NO. 4.c

**PEMBANGUNAN BUDAYA
KERJA DAN PERUBAHAN
POLA PIKIR DI LINGKUNGAN
ORGANISASI**

**PROGRAM KERJA UNTUK PERUBAHAN POLA PIKIR DAN BUDAYA
KERJA PENGADILAN NEGERI FAKFAK KELAS II
AREA I MANAJEMEN PERUBAHAN TAHUN 2022**

NO	TARGET PRIORITAS	RENCANA AKSI	WAKTU	POLA PIKIR DAN BUDAYA KERJA YANG DIHARAPKAN
1 .	Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	Rapat Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	Januari-Februari 2022	Melaksanakan kegiatan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan jabatan yang telah ditentukan dalam SK Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
2.	Pelaksanaan sosialisasi budaya kerja	Menyiapkan bahan dan rencana program kerja perubahan pola pikir dan budaya kerja untuk kemudian disosialisasikan	Januari 2022	Merubah mekanisme kerja seluruh aparatur secara sistematis dan konsisten agar tercipta pola pikir dan budaya kerja yang baik dan sesuai dengan tujuan pembangunan zona integritas
3.	Pelaksanaan Sosialisasi DIPA 2022 PN Fakfak	Koordinasi dengan Sekretaris Pengadilan Negeri Fakfak untuk melaksanakan sosialisasi DIPA 2022	Januari 2022	Agar penyerapan anggaran dapat diketahui dan diawasi oleh setiap aparatur Pengadilan Negeri Fakfak dan demi melaksanakan keterbukaan dan transparansi dalam organisasi
4.	Pelaksanaan penandatanganan pakta integritas dan perjanjian kinerja oleh seluruh Aparatur Pengadilan Negeri Fakfak	Menyiapkan dokumen-dokumen dan melaksanakan penandatanganan pakta integritas dan perjanjian kinerja	Januari 2022	Agar dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai apatur Pengadilan, setiap Pegawai dapat berkomitmen bekerja bersih, tanpa adanya pungli dan KKN.

5.	Pelaksanaan <i>briefing</i> pagi pada bagian PTSP	Koordinasi dengan Hakim Pengawas PTSP	Januari-Desember 2022	Melaksanakan tugas dengan mengedepankan Senyum, Salam dan Sapa untuk meningkatkan pelayanan publik pada masyarakat Fakfak.
6.	Pemilihan <i>Role Model</i> dan Agen Perubahan	Koordinasi dengan Tim Baperjakat Pengadilan Negeri Fakfak	Januari 2022	Melaksanakan budaya profesional dalam bekerja agar setiap role model dan agen perubahan dapat menjadi contoh dan teladan bagi aparatur Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II
7.	Pelaksanaan siraman rohani yang diikuti oleh seluruh aparatur Pengadilan	Koordinasi dengan Ketua Pengadilan untuk melaksanakan kegiatan tersebut	April 2022	Pembangunan mental spiritual untuk mengokohkan semangat melayani dan integritas setiap aparatur Pengadilan
8.	Pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> kepada aparatur Pengadilan	Membuat tim penyusun reward dan punishment sekaligus melaksanakan penilaian terhadap aparatur Pengadilan	Januari 2022 dan Juli 2022	Dilakukan dalam rangka memotivasi aparatur untuk melakukan pekerjaan yang baik dan meningkatkan prestasinya demi menunjang pelayanan kepada masyarakat

Fakfak, 25 Februari 2022
Ketua Pengadilan Negeri Fakfak

TTD

TRI MARGONO, S.H.
NIP. 197602112002121004



PENGADILAN NEGERI FAKFAK KELAS II

JALAN. YOS SUDARSO NO. 92. Tlp/Fax (0956) 22413

Website. www.pn-fakfak.go.id

Email : pengadilan_negeri_fakfak@yahoo.co.id

FAKFAK PAPUA BARAT

9 Maret 2022

UNDANGAN RAPAT

<u>AGENDA ACARA</u> RAPAT PEMILIHAN REWARD DAN PUNISHMENT UNTUK PETUGAS PTSP PADA PENGADILAN NEGERI FAKFAK	<u>PEMIMPIN RAPAT</u> GANJAR PRIMA ANGGARA, S.H.
<u>WAKTU PELAKSANAAN</u> HARI : Kamis TANGGAL : 10 Maret 2022 PUKUL : 14.30 WIT	<u>PETUGAS</u> NOTULIS : JUNIAR PATIMBANG, A.Md DOKUMENTASI : IRIANTO TANGGAHMA, S.H.
	<u>TEMPAT</u> RUANG RAPAT PENGADILAN NEGERI FAKFAK
<u>PESERTA RAPAT</u> SELURUH TIM PENILAI PEMBERIAN REWARD DAN PUNISHMENT BAGI PETUGAS PTSP	
<u>SIFAT</u> <ol style="list-style-type: none">1. Harus Diikuti Oleh Seluruh Peserta Rapat;2. Bagian Umum untuk Mempersiapkan Ruang Rapat dan Kelengkapannya;3. Hadir Di Ruangan 5 Menit Sebelum Acara Dimulai;4. Wajib Melaksanakan Protokol Kesehatan. <p style="text-align: right;">KETUA</p> <p style="text-align: right;">TTD</p> <p style="text-align: right;"><u>GANJAR PRIMA ANGGARA, S.H.</u> NIP. 19920727 201712 1 005</p>	



PENGADILAN NEGERI FAKFAK

Jalan Yos Sudarso No. 92. Tlp/Fax (0956) 22413

Website:www.pn-fakfak.go.id

Email : pengadilan_negeri_fakfak@yahoo.co.id

FAKFAK-PAPUA BARAT

**BERITA ACARA HASIL RAPAT
PEMILIHAN REWARD DAN PUNISHMENT UNTUK PETUGAS PTSP
PADA PENGADILAN NEGERI FAKFAK
Nomor : 1 /BA/PN.FFK/III/2022**

Pada hari ini, Kamis tanggal Sepuluh, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, Pimpinan unit/bagian menyampaikan hasil Pemilihan Reward Dan Punishment Untuk Petugas PTSP Pada Pengadilan Negeri Fakfak, bertempat di Ruang Rapat Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II.

Dalam Rapat Pemilihan Reward Dan Punishment Untuk Petugas PTSP Pada Pengadilan Negeri Fakfak tersebut yang hadir adalah :

Tanda Tangan

1. GANJAR PRIMA ANGGARA, S.H.
KETUA
2. SANDAR SITANGGANG, S.H.
ANGGOTA
3. YURICE J.C. REMBET, S.T.
SEKRETARIS
4. LA IDU
ANGGOTA

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Fakfak, 10 Maret 2022

Ketua Tim

GANJAR PRIMA ANGGARA, S.H.
NIP. 119920727 201712 1 005

Sekretaris Tim

YURICE J.C. REMBET, S.T.
NIP. 19870712 201101 2 022



PENGADILAN NEGERI FAKFAK KELAS II

JLN. YOS SUDARSO NO. 92 TELP. (0956) 22413

Tlp. (0956) 22413 FAX (0956) 22413

Website : www.pn_fakfak.go.id

Email : pengadilan_negeri_fakfak@yahoo.co.id

DAFTAR HADIR

HARI : Kamis

TANGGAL: 10 Maret 2022

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1	GANJAR PRIMA A	Ketua Tim	
2	PUNICE J. C. REMBET	Secretaris	
3	Laibu	kasubag kep.ortala	
4	Saudan Sitampung	Panitera	

Mengetahui

Ketua Tim

GANJAR PRIMA ANGGARA, S.H.

NIP. 119920727 201712 1 005

**NOTULEN PEMILIHAN REWARD DAN PUNISHMENT UNTUK PETUGAS PTSP
PADA PENGADILAN NEGERI FAKFAK**

HARI / TANGGAL	Kamis, 10 Maret 2022			KETERANGAN LAMPIRAN	
LOKASI RAPAT	Ruang Rapat Pengadilan Negeri Fakfak			<input checked="" type="checkbox"/>	Pengumuman
WAKTU MULAI	14.30 WIT	SELESAI	15.00 WIT	<input checked="" type="checkbox"/>	Daftar Hadir
POKOK BAHASAN	Pemilihan Reward Dan Punishment Untuk Petugas PTSP Pada Pengadilan Negeri Fakfak			<input checked="" type="checkbox"/>	Dokumentasi
PIMPINAN RAPAT	: Ganjar Prima Anggara, S.H.			<input checked="" type="checkbox"/>	Notulen
NOTULEN	: Juniar Patimbang, A.Md			Beri tanda berikut	<input checked="" type="checkbox"/>

**NOTULEN PEMILIHAN REWARD DAN PUNISHMENT UNTUK PETUGAS PTSP PADA
PENGADILAN NEGERI FAKFAK**

PEMBUKAAN:

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Syaloom,

Salam Sejahtera untuk kita semua.

A. PEMBAHASAN :

Rapat Pemilihan Reward Dan Punishment Untuk Petugas PTSP dibuka dan dipimpin oleh Bapak Ganjar Prima Anggara, S.H. selaku Ketua Tim. Rapat pemilihan reward dan punishment dilaksanakan sebagai salah satu bentuk apresiasi kepada petugas PTSP yang telah memberikan pelayanan dan menjalankan tugas dengan baik kepada para pencari keadilan. Pemberian reward bisa berupa sertifikat penghargaan ataupun souvenir. Adapun tahap-tahap pemilihan Reward dan Punishment sebagai berikut :

1. Tahap Seleksi Petugas.

Yang menjadi kandidat dalam pemilihan Reward dan Punishment adalah sebagai berikut :

No	Nama	Bagian
1.	Ratna Keley, A.Md	Petugas PTSP Umum dan Keuangan
2.	Robertho R. Tawirasaru,S.H	Petugas PTSP Pidana
3.	Windi Y.S. Nainggolan, S.H	Petugas PTSP Hukum
4.	Yeni Anggraini, S.Sos	Petugas PTSP Perdata
5.	Yulian Riski Ananda, A.Md.A.B	Petugas Meja E-Court
6.	Oktoviana T. Watto, S.H	Petugas Meja Informasi

**NOTULEN PEMILIHAN REWARD DAN PUNISHMENT UNTUK PETUGAS PTSP
PADA PENGADILAN NEGERI FAKFAK**

2. Kriteria Penilaian Petugas

Adapun yang menjadi kriteria penilaian dalam pemberian reward dan punishment adalah sebagai berikut :

- a) Kedisiplinan;
- b) Sikap perilaku;
- c) Pelaksanaan;
- d) Hubungan sesama pelayan;
- e) Kebersihan dan kerapian;
- f) Kepuasan pelanggan.

3. Perhitungan Penilaian

Berdasarkan kriteria yang ada, didapatkan hasil perhitungan sebagai berikut :

	Ratna Keley, A.Md	Robertho R. Tawirasaru, S.H	Windi Y.S. Nainggolan, S.H.	Yeni Anggraini, S.Sos	Yulian Riski Ananda, A.Md.A.B	Oktoviana T. Watto, S.H.
Kedisiplinan			✓		✓	
Sikap Perilaku		✓	✓		✓	✓
Pelaksanaan	✓		✓			
Hubungan Sesama Pelayan			✓	✓	✓	
Kebersihan dan Kerapian	✓					✓
Kepuasan Pelanggan	✓	✓	✓			
Jumlah	3	2	5	1	3	2

Or


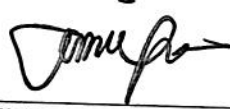
**NOTULEN PEMILIHAN REWARD DAN PUNISHMENT UNTUK PETUGAS PTSP
PADA PENGADILAN NEGERI FAKFAK**

4. Hasil Pemilihan

Berdasarkan hasil Pemilihan Reward Dan Punishment Untuk Petugas PTSP Pada Pengadilan Negeri Fakfak, yang mendapatkan Reward adalah Windi Yunita Sari Nainggolan, S.H sebagai Petugas Meja Hukum dengan nilai 5.

B. PENUTUP

Demikian hasil rapat Pemilihan Reward Dan Punishment Untuk Petugas PTSP Pada Pengadilan Negeri Fakfak yang ditandatangani oleh Bapak Ganjar Prima Anggara, S.H. selaku Ketua Tim.

NOTULEN	MENGETAHUI Ketua Tim
	
<u>JUNIAR PATIMBANG, A.Md</u>	<u>GANJAR PRIMA ANGGARA, S.H.</u> NIP. 119920727 201712 1 005

**NOTULEN PEMILIHAN REWARD DAN PUNISHMENT UNTUK PETUGAS PTSP
PADA PENGADILAN NEGERI FAKFAK**

DOKUMENTASI



DOKUMENTASI REWARD





SERTIFIKAT

Diberikan Kepada :

WINDI YUNITA SARI NAINGGOLAN, S.H

sebagai

Pelaksana Layanan Pengadilan "TERBAIK"

Periode Oktober-Desember 2021

Di Pengadilan Negeri Fakfak- Papua Barat

Fakfak, 10 Maret 2022

Ketua Pengadilan Negeri


Iri Margono, S.H



NIP. 197602112002121004



PENGADILAN NEGERI FAKFAK KELAS II

Jalan Yos Sudarso No.92 Wagom

Tlp : (0956) 22413 FAX : (0956) 22413

Website : www.pn-fakfak.go.id

Email : pengadilan_negeri_fakfak@yahoo.co.id

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN FAKFAK KELAS II

Nomor : W30.U6/84/KPN/SK/II/2022

TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI/*GIVE AWAY* ATAS KETERLAMBATAN DALAM PEMBERIAN LAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI FAKFAK KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK KELAS II

- Menimbang : 1. Bahwa untuk menyelenggarakan Pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan pelayanan publik terhadap para pencari keadilan/pengunjung/masyarakat/stakeholder yang menerima layanan di Pengadilan Negeri Fakfak untuk mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Negeri Fakfak tentang Pemberian Kompensasi/ Giftaway kepada pengguna layanan (masyarakat/ stakeholder yang menerima layanan) apabila dalam hal pelayanan dari para Petugas Pelayanan di Pengadilan Negeri Fakfak tidak memuaskan atau tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Peradilan;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- c. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
- d. Keputusan Ketua Mahkamah Agung republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
- e. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor : 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor :77/DJU/SK/HM.02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI ATAU *GIVE AWAY* ATAS KETERLAMBATAN DALAM PEMBERIAN LAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI FAKFAK KELAS II.
- Pertama : Menetapkan pemberian Kompensasi / *Giveaway* kepada Pengguna Layanan (masyarakat /*stakeholder* yang menerima layanan apabila dalam hal pemberian layanan dari para Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Negeri Fakfak tidak menerapkan 3S (Senyum, Salam, Sapa) dan dan pelayanan oleh petugas dilakukan lebih dari satu jam atau melebihi dari ketentuan yang telah ditentukan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP), berupa Permohonan Maaf serta pemberian kompensasi /*give away* berupa souvenir;
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di : F A K F A K
Pada tanggal : 08 Februari 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK



TRI MARGONO, S.H.
NIP. 19760211 200212 1 004



pn_fakfak



pn_fakfak



Keterangan : Pengadilan Negeri Fakfak bekerja sama dengan bank BRI cabang Fakfak untuk melaksanakan pelatihan pelayanan prima. Hal tersebut berfungsi sebagai tempat pelatihan bagi aparaturnya, agar dalam memberikan pelayanan dapat mengedepankan 3S demi Pelayanan Prima yang lebih baik.



pn_fakfak
Pengadilan Negeri Fakfak



pn_fakfak
Pengadilan Negeri Fakfak



Keterangan : Yulian Riski Ananda, Amd. Melakukan persentasi atas inivasi si Aktif pada Pengdilan Negeri Fakfak. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk perubahan budaya kerja yang lebih modern, akuntabel dan mempermudah masyarakat pencari keadilan untuk mengakses informasi terhadap pelayanan Penghadilan Negeri Fakfak.



pn_fakfak



pn_fakfak



Keterangan : Ketua Pengadilan Negeri Fakfak secara konsisten membengun budaya kerja dan perubahan pola pikir pada seluruh Aparatur Pengadilan Negerin Fakfak salah satunya dengan melaksanakan briefing PTSP dengan selalu mengingatkan budaya 5R dan 3S demi dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.



DOKUMENTASI BUDAYA MALU PADA PENGADILAN NEGERI FAKFAK

CHEKLIST

NO. 4.d

**KETERLIBATAN SEMUA
ANGGOTA DALAM
PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS**



PENGADILAN NEGERI FAKFAK KELAS II

Jalan Yos Sudarso No.92 Fakfak

Tlp : (0956) 22413 FAX : (0956) 22413

Website : www.pn-fakfak.go.id

Email pengadilan_negeri_fakfak@yahoo.co.id

07 Januari 2022

UNDANGAN RAPAT

<p><u>AGENDA ACARA</u></p> <p>Penandatanganan Pakta Integritas Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II)</p>	<p><u>PIMPINAN RAPAT</u></p> <p>TRI MARGONO, S.H.</p>
<p><u>WAKTU PELAKSANAAN</u></p> <p>HARI : Senin TANGGAL : 10 Januari 2022 PUKUL : 09.00 WIT</p>	<p><u>PETUGAS</u></p> <p>MC : RATNA KELEY, A.Md.T. DOKUMENTASI : Agung Irvan Bili, S.Kom.</p>
	<p><u>TEMPAT</u></p> <p>RUANG SIDANG UTAMA. PENGADILAN NEGERI FAKFAK</p>
<p><u>PESERTA RAPAT</u></p> <p>1. SELURUH APARATUR PENGADILAN NEGERI FAKFAK</p>	
<p><u>SIFAT</u></p> <p>1. Harus Diikuti oleh Seluruh Peserta Rapat 2. Hadir diruang rapat 5 menit sebelum acara dimulai</p>	
<p>KETUA</p> <p>TTD</p> <p>TRI MARGONO, S.H. NIP. 19760211 200212 1 004</p>	



PENGADILAN NEGERI FAKFAK

JLN. YOS SUDARSO NO. 92 TELP. (0956) 22413

Tlp. (0956) 22413 FAX (0956) 22413

Website : www.pn_fakfak.go.id

Email : pengadilan_negeri_fakfak@yahoo.co.id

SUSUNAN ACARA PENANDATANGAN PAKTA INTEGRITAS TAHUN 2022

- 1. Pembukaan**
 - 2. menyanyikan lagu Indonesia Raya**
 - 3. sambutan dari kpn**
 - 4. pengucapan dan penandatanganan pakta integritas**
 - wakil ketua
 - Hakim- Hakim
 - Panitera dan Sekretaris
 - Para Panmud
 - Para Kasubbag
 - Para Juru sita
 - Para Staf
 - 5. penyerahan SK tenaga Pramubakti tahun 2022**
 - 6. Doa/ yang dibawakan oleh**
 - 7. menyanyikan lagu hymne mahkamah agung**
 - 8. pengucapan yel-yel/ Tomas Wiratraur S.H**
 - 9. penutup**
-

DOKUMENTASI



PENGADILAN NEGERI FAKFAK KELAS II
Jln. Yos Sudarso No.92 Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat





PENGADILAN NEGERI FAKFAK KELAS II

JALAN. YOS SUDARSO NO. 92. Tlp/Fax (0956) 22413

Website. www.pn-fakfak.go.id

Email : pengadilan_negeri_fakfak@yahoo.co.id

FAKFAK PAPUA BARAT

13 Januari 2022

UNDANGAN RAPAT

<u>AGENDA ACARA</u> RAPAT EVALUASI BULANAN	<u>PEMIMPIN</u> TRI MARGONO, SH
<u>WAKTU PELAKSANAAN</u> HARI : Jumat TANGGAL : 14 Januari 2022 PUKUL : 14.00 WIT	<u>PETUGAS</u> MC : OKTOVIANA T. WATTO, SH NOTULIS : ENGELBERTHA TUROT, SH DOKUMENTASI : AGUNG IRVAN BILI, S.Kom
	<u>TEMPAT</u> RUANG MEETING
<u>PESERTA RAPAT</u> SELURUH APARATUR PN.FAKFAK	
<u>SIFAT</u> <ol style="list-style-type: none">1. Harus Diikuti Oleh Seluruh Peserta Rapat2. Hadir Di Ruang 5 Menit Sebelum Acara Dimulai3. Wajib Melaksanakan Protokoler Kesehatan	
KETUA TTD <u>TRI MARGONO, SH</u> NIP. 197602112002121004	

NOTULENSI RAPAT BULANAN (14 JANUARI 2022)

HARI / TANGGAL RAPAT Jumat/14 Januari 2022
LOKASI RAPAT Ruang Meeting PN. Fakfak
WAKTU RAPAT 14.00 WIT SELESAI 16.00 WIT

KETERANGAN LAMPIRAN

DAFTAR HADIR
 INTERNAL MEMO

Beri Tanda berikut

POKOK BAHASAN 1 Evaluasi Tupoksi tahun 2021

PEMATERI 1 Tri Margono, S.H

MODERATOR 1 Oktoviana T Watto, S.H

NOTULEN 1 Engelbertha Turot, S.H

PESERTA RAPAT 1 Seluruh Aparatur Pengadilan
Negeri Fakfak

EVALUASI TUPOKSI TAHUN 2021

PEMBUKAAN:

Salam pembuka oleh MC :
Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Syaloom,

Salam Sejahtera untuk kita semua.

❖ **Susunan Acara Rapat Bulanan Sebagai Berikut :**

1. Salam Pembuka oleh MC;
2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh semua aparatur Pengadilan Negeri Fakfak;
3. Sambutan pembukaan rapat oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak;
4. Pembahasan Laporan pelaksanaan tupoksi bulan September 2021 oleh masing-masing bagian;
5. Doa;
6. Menyanyikan Lagu Hymne Mahkamah Agung;
7. Yel-yel;
8. Penutup.

PEMBAHASAN :

❖ **Agenda rapat pada rapat bulanan tanggal 14 Januari 2022 adalah**

- Laporan Pelaksanaan tupoksi Tahun 2021 masing-masing bagian yaitu, bagian kesekretariatan dan bagian kepaniteraan serta laporan Pengawasan Bidang oleh Hakim Pengawas Bidang.

Adapun beberapa arahan dari Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II, yaitu :

Rapat evaluasi bulanan, dibuka oleh Ketua pengadilan Negeri Fakfak Kelas II.
Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Syaloom,

Salam Sejahtera untuk kita semua.

NOTULENSI RAPAT BULANAN (14 JANUARI 2022)

Untuk rapat bulanan tahun 2022, akan diagendakan sebelum tanggal 10 setiap bulannya dan harus ditetapkan oleh Ketua Pengadilan. dan untuk pengawas bidang harus mempunyai agenda tersendiri dan setiap Hakim pengawas bidang bisa melakukan pengawasan bidang sesuai dengan tanggal yang telah diagendakan, sehingga akan diikuti oleh bagian-bagian baik kesekretariatan maupun kepaniteraan untuk mengadakan rapat internal sebelum dilaksanakan rapat bulanan, masing-masing bidang sudah harus mengadakan rapat berjenjang. Notulen rapat dapat dibuat sebaik-baiknya dan untuk pimpinan rapat harus memastikan bahwa point-point penting yang disampaikan dalam rapat tersebut telah termuat di dalam notulen, sehingga menjadi evidence dalam pengawasan baik internal maupun eksternal pengawasan yang membuktikan bahwa kegiatan itu ada dan telah dilaksanakan.

Untuk tim Akselerasi media harus memastikan peningkatan kualitas dalam penguploadan pada media social, misalnya tema pengawasan bidang dapat dilakukan penguploadan sekali dalam sebulan baik bagian Kesekretariatan maupun kepaniteraan, begitupun dengan kegiatan olahraga maupun apel dapat dikelompokkan menjadi 1 (satu) bagian dan tidak dilakukan tersendiri dan berulang-ulang dalam sebulan, sehingga dapat dilihat dan dibaca dalam 1 (satu) tema.

Untuk SK diharapkan bagian Kepegawaian mendata kembali SK yang perlu diperbaharui pada tahun 2022, dan juga untuk tim ZI dan APM segera memperhatikan SK yang perlu diperbaharui awal tahun, sehingga segera diperbaharui oleh bagian Kepegawaian.

Sosislisasi terkait DIPA tahun anggaran 2022 akan didakan setelah rapat bulanan hari ini dan segera diperbanyak laporanya sebagai pegangan bagi Ketua, Wakil, Hakim-Hakim, Panmud dan Kasubbag, sehingga bisa diperhatikan kegiatan apa saja yang berhubungan dngan bagiannya.

Diingatkan kembali untuk seluruh Apratur Pengadilan Negeri Fakfak, agar membaca dan melaksanakan Perma Nomor 7,8 dan 9 Tahun 2016. Dan diingatkan juga kepada seluruh Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Aparatur lainnya dan PPNPN untuk menghindari Praktik Suap, Pungli dan Hadiah dari pihak pencari keadilan atau layanan. Begitu juga diingatkan kepada Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara, agar dalam penggunaan dan pengelolaan Anggaran DIPA, untuk tidak bermain anggaran untuk menguntungkan diri sendiri atau pribadi, melainkan harus dipergunakan dan direalisasikan sesuai dengan kegiatan yang telah ditentukan

Evaluasi Bagian Kepaniteraan :

Adapun beberapa hal yang disampaikan oleh Bapak Panitera (Bapak Sandar Sitanggang, S.H)

❖ Bagian Pidana

- Jumlah perkara Pidana tahun 2021 sebanyak 77 Perkara
- Perkara yang sudah putus sebanyak 75 perkara dan sisa 2 Perkara
- Perkara anak Nihil
- Praperadilan 1 Perkara
- Perkara Tipiring Nihil
- Perkara Tilang 3 Perkara
- Perkara banding 8 Perkara
- Kasasi 2 Perkara
- Register induk sudah tidak diisi lagi kerana sudah menyatu dengan aplikasi SIPP

NOTULENSI RAPAT BULANAN (14 JANUARI 2022)

- ❖ Bagian Perdata
 - Perkara gugatan tahun 2021 masuk sebanyak 15 perkara
 - Perkara permohonan tahun 2021 masuk sebanyak 21 perkara
 - Perkara gugatan, Putus 10 perkara dan sisa 5 perkara yang masih berjalan
 - Perkara permohonan sudah putus semua
 - Perkara banding E-court salinan putusannya tidak bisa ditanda tangani.
- ❖ Bagian Hukum
 - Tidak ada kendala, semua berkas yang diminutasi sudah diarsipkan
- ❖ Bagian Jurusita
 - untuk bagian jurusita sampai saat ini tidak ada kendala
 - terkait dengan barang-barang eksekusi yang alat-alatnya hilang sudah kami laporkan ke Reskrim, namun sampai saat ini belum ditindaklanjuti.

Evaluasi bagian Kesekretariatan :

Adapun beberapa hal yang disampaikan oleh Plt. Sekretaris (Ibu. Yurice J.C.Rembet, S.T)

Sesuai dengan Rapat bagian Kesekretariatan tanggal 13 Januari 2022, adapun pembahasannya yaitu, terkait Evaluasi Tupoksi tahun 2021, kendala-kendala dan rencana kerja.

- ❖ Bagian Umum dan Keuangan :
 - Untuk Realisasi Anggaran Januari sampai dengan Desember 2021
 - DIPA 01 : 87.02
 - DIPA 03 : 98.68
 - Piagam Penghargaan Peringkatan Pertama Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Semester I Tahun Anggaran 2021 kategori Pagu diatas 2 miliar s.d. 10 milyar;
 - Piagam Penghargaan satuan Kerja Mitra KPPN Fakfak yang paling akurat dalam penyampaian SPM periode Agustus 2021;
 - Piagam capaian output 400082 periode Agustus 2021;
 - Piagam Capaian Output 400081 Oktober 2021
 - Kendala-kendala yaitu, menunggu PPK untuk menandatangani kuitansi yang belum ditanda tangani periode tahun 2021
 - Kendala DIPA 01 menurun yaitu, Belanja Pegawai dan sisa anggarannya melebihi target yaitu Rp.600.000.000; (Enam Ratus Juta Rupiah)
 - Rencana kerja tahun 2022 yaitu pembangunan Pos security dan sertifikat securitynya
- ❖ Kepegawaian dan Ortala :
 - Telah membuat kenaikan gaji pegawai periode tahun 2021, 1 Pegawai dan 4 orang hakim tepat waktu;
 - Telah mengusulkan kenaikan pangkat pegawai periode tahun 2021 atas nama Rizal Asbar,SH, tepat waktu;
 - Telah memperbarui file pegawai sesuai urutan jabatan;
 - Telah memperbaharui data DUK dan Bezeting periode tahun 2021;
 - Telah membuat pengusulan pensiun periode tahun 2021 tepat waktu;
 - Telah mengusulkan pembuatan Karpeg dan Karis 3 Pegawai dan 4 Hakim
 - Membuat rencana kebutuhan pegawai pada pengadilan negeri fakfak periode tahun 2022;
 - Memperbaharui data DUK dan Bezeting periode tahun 2022;
 - Mengusulkan kenaikan pangkat pegawai dan hakim periode tahun 2022;
 - Memperbaharui file kepegawaian, namun masih membutuhkan box file terbaru untuk diseragamkan;
 - Pembaharuan data Sikep dengan Pas Photo terbaru lengkap dengan berpakaian korpri bagi Hakim dan Pegawai
- ❖ Bagian Perencanaan, Teknologi, Informasi dan Pelaporan:
 - Sudah menyelesaikan laporan tahunan dan sudah terkirim ke Pengadilan Tinggi jayapura sebelum tanggal yang ditentukan dan Pengadilan Negeri Fakfak sebagai peserta Satker nomor urut 2 yang sudah sampai pada Pengadilan tinggi;

NOTULENSI RAPAT BULANAN (14 JANUARI 2022)

- Masih menyusun LAKIP yang akan disatukan dengan SAKIP dan akan membutuhkan beberapa dokumen yang akan ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan dan Ketua Pengadilan Tinggi.

Untuk rencana-rencana kerja tahun 2022 pada bagian Kesekretariatan akan dibahas dalam setiap Rapat berjenjang Kesekretariatan setiap bulan.

Pengawasan Bidang :

- ❖ Koordinator Pengawas Bidang (Bapak Wakil Ketua)

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Syaloom,

Salam Sejahtera untuk kita semua

Untuk laporan pengawas bidang akan dilaporkan langsung oleh masing-masing Hakim pengawas bidang terkait hasil pengawasannya di tiap-tiap bagian.

- ❖ **Pengawasan bidang Bagian Perdata & PTSP (Bapak Reynold Nababan, S.H)**

(Tidak ada)

- ❖ **Pengawasan Bidang Bagian Pidana dan Kepegawaian (Bapak Iranda Careca Anindityo, S.H)**

- ✓ Untuk perkara pidana tahun 2021 yang sisa 4 perkara , sudah putus 2 perkara per Januari dan sisa 2 perkara tahun 2021;
- ✓ 1 (Satu) Perkara Banding yang sudah putus dalam bulan Januari dari 2 perkara pidana;
- ✓ Mengenai buku register pada bagian pidana, belum di paraf dan ditandatangani oleh Bapak Ketua Pengadilan;
- ✓ Mengenai buku register, apakah akan tetap ditulis untuk tahun 2022 sebagai back up apabila sewaktu-waktu terdapat error pada SIPP;
- ✓ Diingatkan kepada Pegawai yang belum membuat SKP, agar segera diselesaikan;
- ✓ Diingatkan kepada seluruh Pegawai yang belum melapor LHKPN dan LHKASN, agar segera melaporkan;
- ✓ Diingatkan juga kepada seluruh pegawai yang belum melapor SPT Tahunan agar segera dilaporkan

- ❖ **Pengawas bidang bagian PTIP dan Kepaniteraan Hukum (Bapak Ganjar Prima Anggara, S.H)**

(tidak ada)

- ❖ **Pengawas Bidang Umum keuangan dan Perpustakaan (Bapak Ivan Bhakti Yudistira, S.H)**

- ✓ Untuk pengawasan bidang pada bagian umum dan keuangan tidak ada temuan;
- ✓ Usulan terkait agenda pada hari jumat yang biasanya kita isi dengan olahraga bola volley bersama, mengingat tahun sebelumnya tidak pernah ada kegiatan yang kita lakukan secara bersama-sama yang melibatkan seluruh keluarga besar Pengadilan Negeri Fakfak, misalnya seperti kegiatan kerja bakti bersama, karena ketika waktu olahraga bola volley hanya melibatkan sebagian pegawai, maka saran kami apabila diperkenankan kita adakan kegiatan kerja bakti yang mana bisa kita adakan sebulan sekali untuk melibatkan keluarga besar Pengadilan Negeri Fakfak

Tanggapan Wakil Ketua (Koordinator Pengawas Bidang):

- ✓ Terkait dengan capaian-capaian yang diperoleh oleh bagian kesekretariatan dan kepaniteraan pada tahun 2021, agar tetap dipertahankan, dan diharapkan lebih baik lagi pada tahun 2022;
- ✓ Terkait dengan tanda tangan elektronik dari bagian kepaniteraan sebelumnya tidak muncul kolom tanda tangan elektronik panitera, sudah di selesaikan, yaitu harus ada verifikasi Hakim sehingga akan muncul tanda tangan elektroniknya, namun belum bisa tempelkan

NOTULENSI RAPAT BULANAN (14 JANUARI 2022)

- ✓ Untuk DIPA 01 ada belanja pegawai yang tidak terserap, karena ada jumlah pegawai yang keluar dan masuk pada Pengadilan Negeri Fakfak;
- ✓ Untuk pengusulan Karpeg yang belum terealisasi, maka diharapkan untuk pengusulan kembali ke BKN, melalui Pengadilan Tinggi Jayapura;
- ✓ Untuk Pengadaan seragam security bisa menunggu informasi dan edaran terbaru, dikarenakan seragam security sekarang seusia dengan informasi yang beredar akan diganti, karena seragam yang sekarang hampir sama dengan seragam polisi, sehingga menyebabkan kebingungan pada masyarakat untuk membedakan Polisi dan Security;
- ✓ Kewajiban Pegawai dalam melaporkan LHKPN dan LHKASN, paling lambat 31 Maret, namun jika dibuat lebih cepat, maka lebih baik lagi kepatuhan pelaporannya;
- ✓ Kita sudah diberikan ijin secara penuh untuk menggunakan register elektronik, namun untuk mengantisipasi terjadinya gangguan teknis, maka sebaiknya register manual yang masih dikirimkan ke kita sedapat mungkin untuk diisi dan dilengkapi;
- ✓ Untuk penandatanganan dan paraf buku register, karena mengingat kesibukan bapak Ketua Pengadilan, maka tidak semua halaman harus ditandatangani, karena akan mengganggu kesibukan Bapak Ketua, untuk itu bisa ditanda tangan satu per satu buku register;
- ✓ Untuk kegiatan kerja bakti, sebaiknya secara teknis dapat dilaksanakan sebelum olahraga, baik kebersihan di dalam maupun diluar lingkungan kantor.

Kesimpulan/Tanggapan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak :

- ✓ Untuk register induk maupun manualnya, sebenarnya sudah ada petunjuk mengenai bagaimana penggunaan register induk, untuk itu selama pengadilan diberikan ijin selama 1 (satu) tahun, maka harus nya sudah mendapatkan evaluasi dari Pengadilan Tinggi, dan untuk melepaskan register manual itu sesuai dengan Penetapan Pengadilan Tinggi, dan karena Pengadilan Negeri Fakfak belum dievaluasi oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dan juga belum ada ijin, maka untuk penggunaan register induk manual ini tetap diisi, karena peraturannya baru dikeluarkan bulan Desember 2021, sehingga untuk 1 (satu) tahun ini tetap harus diisi;
- ✓ Mengenai penandatanganan buku register oleh Ketua Pengadilan, akan disiapkan di ruang Pidana dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan di ruang Pidana;
- ✓ Mengenai usulan kegiatan kerja bakti pada hari jumat dapat kita simpulkan bahwa untuk kebersihan lingkungan kantor kita belum maksimal, sehingga dapat diusulkan untuk diadakan kerja bakti bersama, dengan demikian kita akan melaksanakan kerja bakti bersama, dan jika membutuhkan biaya, maka dapat digunakan biaya pemeliharaan lingkungan;

Penutup :

Demikian rapat evaluasi bulanan tanggal 14 Januari 2022 yang telah dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak, Bapak TRI MARGONO, S.H

NOTULIS

ENGELBERTHA TUROT, S.H
NIP. 19860126 201903 2 005

MENGETAHUI

Ketua Pengadilan Negeri Fakfak



TRI MARGONO, S.H
NIP. 19760211 200212 1 004

NOTULENSI RAPAT BULANAN (14 JANUARI 2022)





PENGADILAN NEGERI FAKFAK KELAS II

JLN. YOS SUDARSO NO. 92 TELP. (0956) 22413

Tlp. (0956) 22413 FAX (0956) 22413

Website : www.pn_fakfak.go.id

Email : pengadilan_negeri_fakfak@yahoo.co.id

DAFTAR HADIR RAPAT BULANAN

HARI : Jumat

TANGGAL : 14 Januari 2022

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1	TRI Mangala	Ketua	
2	Dedy H	Wakil	
3	Iranda Careea Anindityo	Hakim	
4	IVAN BHAkti YUDISTIRA	Hakim	
5	YURICE T.C. REMBET	Kaubag PTIP	
6	Rinal Abr	beskras UK	
7	LA Ida	Kasubag. Kepeg ortala	
8	Agung Irvan . B	staf PTIP	
9	ISMET WIRAOY	Akru sika	
10	Salmunz.	Panmud Hukum	
11	Salmunz	Panmud Perdata	
12	J. siahaya	Panmud Pidana	
13	S. Sitanggang	Panitera	
14	Indarto Punggalma	Staf. Pidana	
15	Rika M Sari	Staf. Umkes	

16	Oreboulama . W .	Staf Onbala	attetaj
17	YULIAN Riski A.	Staf Perdata	
18	Pandy	Jurunta	af
19	Robertus. Jawirawan	Staf Perdata	
20	Pelna.	Staf Umum	
21	Juniar Pahmbang	Staf Hukum	
22	Windi Junita	Staf Hukum	
23	Teni. A.	Staf Perdata	Am
24	Asri Wani	Staf Keuangan	
25	TITANAS NIRATRACIT	Staf Umum	
26	Engelbertha. T	Staf. kepegawain	
27			
28			
29			
30			
31			

Mengetahui,
Ketua,

TRI MARGONO, SH
NIP. 19760211 200212 1 004



PENGADILAN NEGERI FAKFAK

JALAN. YOS SUDARSO NO. 92. Tlp/Fax (0956) 22413

Website. www.pn-fakfak.go.id

Email : pengadilan_negeri_fakfak@yahoo.co.id

FAKFAK PAPUA BARAT

13 Januari 2022

UNDANGAN RAPAT

<u>AGENDA ACARA</u> SOSIALISASI DIPA TAHUN ANGGARAN 2022	<u>PIMPINAN RAPAT</u> TRI MARGONO, SH
<u>WAKTU PELAKSANAAN</u> HARI : Jumat TANGGAL : 14 Januari 2022 PUKUL : 16.00 WIT	<u>PETUGAS</u> MC : OKTOVIANA T. WATTO, SH NOTULIS : ENGELBERTHA TUROT, SH DOKUMENTASI : AGUNG IRFAN BILI, S.Kom
	<u>TEMPAT</u> RUANG MEETING PN.FAKFAK
<u>PESERTA RAPAT</u> SELURUH APARATUR PENGADILAN NEGERI FAKFAK	
<u>SIFAT</u> <ol style="list-style-type: none">1. Harus Diikuti Oleh Seluruh Peserta Rapat.2. Hadir Di Ruang Rapat 5 Menit Sebelum Acara Dimulai3. Mematuhi Protokol Kesehatan <p style="text-align: right;">KETUA TTD <u>TRI MARGONO, SH</u> Nip. 197602112002121004</p>	

**NOTULENSI SOSIALISASI DIPA TAHUN ANGGARAN 2022
(14 JANUARI 2022)**

HARI / TANGGAL RAPAT	Jumat/14 Januari 2022	KETERANGAN LAMPIRAN
LOKASI RAPAT	Ruang Meeting PN. Fakfak	<input checked="" type="checkbox"/> DAFTAR HADIR
WAKTU RAPAT	16.30 WIT SELESAI 17.00 WIT	<input type="checkbox"/> INTERNAL MEMO
POKOK BAHASAN	1 Sosialisasi DIPA tahun Anggaran 2022	Beri Tanda berikut <input checked="" type="checkbox"/>
PEMATERI	1 Tri Margono, S.H 2 Yurice.J.C.Rembet,S.T	
MODERATOR	1 Oktoviana T Watto, S.H	
NOTULEN	1 Engelbertha Turot, S.H	
PESERTA RAPAT	1 Seluruh Aparatur Pengadilan Negeri Fakfak	

SOSIALISASI DIPA TAHUN ANGGARAN 2022

PEMBUKAAN:

Pada Hari ini Jumat, 14 Januari 2022, pukul 16:00 WIT bertempat di ruang Meeting Pengadilan Negeri Fakfak yang dihadiri oleh Seluruh Aparatur Pengadilan Negeri Fakfak, dengan agenda sosialisasi DIPA Tahun Anggaran 2022. Sosialisasi dibuka dan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak dan Plt. Sekretaris Pengadilan Negeri Fakfak selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemateri.

PEMBAHASAN :

❖ **Arahan dan Pembukaan Sosialisasi dari Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II, yaitu :**

Sosialisasi DIPA Tahun Anggaran 2022, dibuka oleh Ketua pengadilan Negeri Fakfak Kelas II. Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Syaloom,

Salam Sejahtera untuk kita semua.

Tujuan dari Sosialisasi yang dilaksanakan ini adalah, agar supaya setiap bagian baik Kesekretariatan maupun Kepaniteraan dapat mengetahui kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dan kemudian diimbangi dengan penyerapan anggaran yang konsisten, dan diharapkan masing-masing bagian harus mempunyai program tersendiri sehingga tidak membuat beban penyerapan pada akhir tahun.

Setiap 3 (Tiga) bulan akan diadakan monitoring dan Evaluasi untuk mengevaluasi kegiatan yang sudah berjalan dan mempersiapkan kegiatan berikutnya, ada beberapa kendala pada tahun 2021, yaitu mengenai kegiatan penjilidan, pengiriman berkas dan penyampaian surat dll tidak lagi menunggu akhir tahun untuk diselesaikan, harus ada konsistensi dari awal tahun sampai dengan akhir tahun.

Untuk anggaran tahun 2022 pada bagian kesekretariatan maupun bagian kepaniteraan ada beberapa perubahan, sehingga dengan adanya sosialisasi ini dapat di pahami terkait kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan. Hal ini juga termasuk dalam salah 1 (satu) persyaratan dalam pembanguna Zona Integritas yaitu mengenai keterbukaan informasi publik.

**NOTULENSI SOSIALISASI DIPA TAHUN ANGGARAN 2022
(14 JANUARI 2022)**

Adapun beberapa Materi Sosialisasi yang dibawakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Ibu. Yurice J.C. Rembet, S.T)

❖ **Materi Sosialisasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran:**

Sosialisasi ini adalah tindaklanjut dari hasil pencaangan DIPA tahun 2022 yang telah diusulkan pada tahun 2021, secara garis besar sebagai berikut:

- Belanja pegawai yang berkaitan dengan Gaji Pokok dan Tunjangan;
- Belanja barang yang berkaitan dengan pemeliharaan operasional perkantoran;
- Belanja Modal yang berkaitan dengan perangkat pengolahan data dan komunikasi;
- Belanja modal pada tahun 2022, Pengadilan Negeri Fakfak mendapatkan 2 (dua) unit printer;
- Untuk Gaji 13 dan Gaji 14 masih ada, hanya untuk Tunjangan Kinerja belum ada;
- **Belanja kebutuhan sehari-hari perkantoran**
 - berkaitan dengan Gaji tenaga Pramubakti;
 - Untuk tahun 2022, gaji Pramubakti ada kenaikannya 90%;
 - Untuk jamuan tamu berkaitan dengan kegiatan kantor terdapat air minum, foto copy;
 - Semua rapat ada snack nya, tidak lagi memakai kata makan-makan, namun berubah menjadi snack, karena semua yang berhubungan dengan kegiatan perkantoran dan menggunakan konsumsi tetap di catat sebagai snack;
 - Jika satker ingin membuat jamuan tamu berupa makan-makan, maka harus melibatkan kementerian lain atau instansi lain;
 - Belanja operasional lainnya yaitu, Biaya keperluan kantor lainnya yang dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak terdapat di dalam DIPA seperti ZI dan APM;
 - Belanja barang persediaan yaitu, barang yang dapat di konsumsi oleh kantor, tetapi dalam bentuk persediaan/stock;
- **Langganan Daya dan Jasa**
 - Langganan internet
 - Surat dinas keluar masuk
 - Langganan listrik, telpon dan air
 - Sewa web hosting seperti zoom meeting
- **Pemeliharaan Kantor**
 - Pemeliharaan Halaman;
 - Pemeliharaan Gedung;
 - Pemeliharaan pagar gedung kantor
 - Pemeliharaan rumah dinas
 - Semua pemeliharaan ini terkoneksi dengan aplikasi SIMAK-BMN
 - Termasuk kabel listrik, jaringan dan indihome (pemeliharaan gedung kantor)
 - Belanja pemeliharaan gedung bangunan lainnya (pemeliharaan untuk semua rumah dinas);

**NOTULENSI SOSIALISASI DIPA TAHUN ANGGARAN 2022
(14 JANUARI 2022)**

- Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin (kendaraan roda 2 dan roda 4, PC, laptop, printer, AC split, pemeliharaan Genset dan BBM Genset);
- **Pembayaran terkait Pelaksanaan Operasional Kantor**
 - Belanja keperluan perkantoran (pakaian Dinas CPNS, pakaian dinas Satpam, pakaian dinas Pengemudi, pakaian dinas Pramubakti, pakaian dinas pegawai non Hakim);
 - Belanja Honor operasional Satuan Kerja (Honor KPA, honor PPK, pejabat pembuat SPM, honor bendahara pengeluaran dan honor staf keuangan)
- **Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan**
 - Belanja barang operasional lainnya (Bahan spanduk/dokumentasi)
 - Belanja jasa lainnya (jasa Ronaiawan)
- **Rapat Koordinasi Internal**
 - Belanja barang operasional lainnya (snack dan bahan lainnya)
- **Koordinasi ke Pusat atau Tingkat Banding**
 - Belanja jasa-penanganan Pandemi Covid-19 (tes swab/rapid);
 - Untuk swab/rapid sudah tidak termasuk lagi di dalam akun perjalanan dinas;
 - Belanja perjalanan dinas biasa (tiket, penginapan, dan uang harian)
- **Konsultasi ke KPPN/Kanwil DJPB/KPKNL**
 - Belanja jasa -penanganan Pandemi COVID-19 (tes swab/rapid);
 - Belanja perjalanan dinas biasa (tiket, penginapan, transport rill, uang harian);
 - Belanja perjalanan dinas dalam kota (transportasi dalam kota)
- **Penanganan Covid-19**
 - Belanja barang operasional -penanganan pandemic Covid-19 (biaya penanganan pandemic Covid-19, masker, handsanitiser, vitamin, thermogen)
 - Belanja jasa- penanganan pandemic Covid-19 (penyemprotan Desinfektan)
- **DIPA 03**
 - Untuk posbakum yang dibayarkan hanya 2 jam, 13 hari dalam 1 bulan, jika ada perubahan, maka kembali kepada MOU;
 - Untuk Pidana, pendaftaran berkas perkara (checklist, map, penggandaan dan penjilidan berkas perkara/ATK);
 - Untuk pembelian ATK DIPA 03 tidak dianjurkan untuk pembelian Tissue, pengharum atau peralatan kebersihan lainnya;
 - Pengiriman penetapan hari sidang tidak digabung baik penahanan dan penetapan hari sidang;
 - Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan untuk 1 perkara;
 - Pemeriksaan di sidang pengadilan (belanja konsumsi makan terdakwa dan konsumsi makan polisi);
 - Pengiriman salinan putusan ke JPU dan Terdakwa sama seperti penetapan hari sidang dan perpanjangan penahanan;

**NOTULENSI SOSIALISASI DIPA TAHUN ANGGARAN 2022
(14 JANUARI 2022)**

- Minutasi upaya hukum (penggandaan, penjilidan berkas perkara dengan kondisi yang bagus);
- Penanganan perkara lainnya di tingkat pertama (pengiriman berkas banding, pemberitahuan putusan banding);

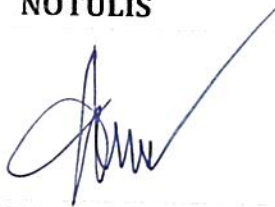
❖ **Kesimpulan/Tanggapan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak :**

- Untuk bagian kepaniteraan pidana hampir semua kegiatan ada biayanya, untuk itu harap diperhatikan baik-baik untuk penggunaannya dan dikelola dengan baik;
- Untuk jurusita mengenai biaya ada atau pun tidak ada tetap harus menjalani tugasnya;
- untuk salinan harus dilaksanakan dan semuanya sudah secara rinci dalam akun DIPA;
- untuk bapak Panitera agar dikoordinasikan dengan seluruh bagian kepaniteraan untuk bagaimana menggunakan anggaran tersebut agar terealisasi secara konsisten;
- Panitera dan Sekretaris harus saling koordinasi dalam penggunaan anggaran, sehingga penyerapannya bisa mencapai target;
- Diingatkan kepada Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara, agar dalam penggunaan dan pengelolaan Anggaran DIPA, untuk tidak bermain anggaran untuk menguntungkan diri sendiri atau pribadi, melainkan harus dipergunakan dan direalisasikan sesuai dengan kegiatan yang telah ditentukan.

❖ **Penutup :**

Demikian Sosialisasi DIPA Tahun Anggaran 2022, Tanggal 14 Januari 2022 yang telah dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak, Bapak TRI MARGONO, S.H

NOTULIS



ENGELBERTHA TUROT, S.H
NIP. 19860126 201903 2 005

MENGETAHUI

Ketua Pengadilan Negeri Fakfak



TRI MARGONO, S.H
NIP. 19760211 200212 1 004

**DOKUMENTASI SOSIALISASI DIPA TAHUN ANGGARAN 2022
(14 JANUARI 2022)**





PENGADILAN NEGERI FAKFAK KELAS II

JLN. YOS SUDARSO NO. 92 TELP. (0956) 22413

Tlp. (0956) 22413 FAX (0956) 22413

Website : www.pn_fakfak.go.id

Email : pengadilan_negeri_fakfak@yahoo.co.id

DAFTAR HADIR

SOSIALISASI DIPA TAHUN ANGGARAN 2022

HARI : Jumat

TANGGAL : 14 Januari 2022

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1	TRI Mangala	Ketua	
2	Dedy ff	Wakil	
3	Iranda Careea Anindhyo	Hakim	
4	IVAN BHAKTI YUDISTIRA	Hakim	
5	YURICE J.C. REMBET	Kasubag PTIP	
6	Rival Abr	Kasubag Uk	
7	LA Ida	Kasubag. Keperantala	
8	Agung Irvan. B	Staf PTIP	
9	ISMET WINDOY	Akun Sita	
10	Salmunz	Panmud Hukum	
11	Salmunz	Panmud Perdata	
12	J. Siahaya	Panmud Pidana	
13	S. Sitanggang	Panitera	
14	Indarto Punggalma	Staf. Pidana	
15	Rita M Sari	Staf. Unkeu	

16	Orboulama . W .	Staf Ongala	Orboulama
17	Yulian Riski A.	Staf Perdata	
18	Randy	Jurunta	sf
19	Robertus. Jawirama	Staf Perdata	
20	Rahma.	Staf Umum	
21	Juniar Patimbang	Staf Hukum	
22	Windi Junita	Staf Hukum	
23	Tani. A.	Staf Perdata	Am
24	Asri Wati	Staf Keuangan	
25	THOMAS MIRAITRAN	Staf Umum	
26	Engelbertha. T	Staf. Kepegawaian	
27			
28			
29			
30			
31			



Mengetahui,
Ketua,

IRI MARGONO, SH
NIP. 19760211 200212 1 004

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(005)
(01)
(400061)
Rp.5.759,038,000

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

MAHKAMAH AGUNG
Badan Urusan Administrasi
PENGADILAN NEGERI FAK FAK

Halaman: 1

KODE (1)	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ ROI KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL (2)	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP (6)
		VOLUME (3)	HARGA SATUAN (4)	JUMLAH BIAYA (5)	
005.01.WA	Program Dukungan Manajemen			5.759.038.000	
1000	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi			5.749.038.000	
1000.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Basis Line)	3.0 Layanan		5.749.038.000	
	Lokasi : KAR, FAK FAK				
1066.EBA.962	Layanan Umum	1.0 Layanan		5.000.000	
051	Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah			5.000.000	
A	PENANGANAN COVID-19 NON OPS			5.000.000	
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 (KPPN.067-Fak - Fak)			5.000.000	RM
	- Swab Analisis PCR	1.0 THN			
1066.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan	5.000.000	5.000.000	
001	Gaji dan Tunjangan			5.744.038.000	
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan			3.359.335.000	
511111	Belanja Gaji Pokok PNS (KPPN.067-Fak - Fak)			4.359.335.000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS	1.0 THN	1.093.199.000	1.093.199.000	RM
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	66.409.000	66.409.000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	66.409.000	66.409.000	
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS (KPPN.067-Fak - Fak)			36.000	RM
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.0 THN	34.000	34.000	
	- Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	1.000	1.000	
	- Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	1.000	1.000	
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (KPPN.067-Fak - Fak)			112.602.000	RM
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.0 THN	99.320.000	99.320.000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	6.641.000	6.641.000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	6.641.000	6.641.000	
511122	Belanja Tunj. Anak PNS (KPPN.067-Fak - Fak)			28.127.000	RM
	- Belanja Tunj. Anak PNS	1.0 THN	25.537.000	25.537.000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	1.295.000	1.295.000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	1.295.000	1.295.000	
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS (KPPN.067-Fak - Fak)			48.140.000	RM
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS	1.0 THN	44.120.000	44.120.000	
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	2.010.000	2.010.000	
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	2.010.000	2.010.000	
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS (KPPN.067-Fak - Fak)			750.000.000	RM
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.0 THN	650.000.000	650.000.000	
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	50.000.000	50.000.000	
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	50.000.000	50.000.000	

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(005)
(01)
(400081)
Rp.5.759.038,000

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

MAHKAMAH AGUNG
Badan Urusan Administrasi
PENGADILAN NEGERI FAK FAK

KODE (1)	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL (2)	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP (6)
		VOLUME (3)	HARGA SATUAN (4)	JUMLAH BIAYA (5)	
511125	Belanja Tunj. PPH PNS (KPPN.067-Fak - Fak)			204.298.000	RM
	- Belanja Tunj. PPH PNS	1.0 THN	150.000.000	150.000.000	
	- Belanja Tunj. PPH PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	27.149.000	27.149.000	
	- Belanja Tunj. PPH PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	27.149.000	27.149.000	
511126	Belanja Tunj. Boras PNS (KPPN.067-Fak - Fak)			103.030.000	RM
	- Belanja Tunj. Boras PNS	1.0 THN	103.030.000	103.030.000	
511129	Belanja Uang Makan PNS (KPPN.067-Fak - Fak)			263.740.000	RM
	- Belanja Uang Makan PNS	1.0 THN	263.740.000	263.740.000	
511129	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS (KPPN.067-Fak - Fak)			409.320.000	RM
	- Belanja Tunj. Khusus Papua PNS	1.0 THN	409.320.000	409.320.000	
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS (KPPN.067-Fak - Fak)			41.225.000	RM
	- Belanja Tunj. Umum PNS	1.0 THN	35.335.000	35.335.000	
	- Belanja Tunj. Umum PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	2.945.000	2.945.000	
	- Belanja Tunj. Umum PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	2.945.000	2.945.000	
511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim (KPPN.067-Fak - Fak)			172.800.000	RM
	- Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim (5 ORG x 12 BLN)	72.0 OB	2.400.000	172.800.000	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN			2.384.703.000	
A	Belanja Keperluan Perkantoran (KPPN.067-Fak - Fak)			624.175.000	
521111	(KPPN.067-Fak - Fak)			547.106.000	RM
	- SATPAM (12 BLN x 4 ORG)	48.0 OB	3.793.000	182.064.000	
	- THR SATPAM (1 BLN x 4 ORG)	4.0 OB	3.793.000	15.172.000	
	- PENGENMUDI (12 BLN x 2 ORG)	24.0 OB	3.793.000	91.032.000	
	- THR PENGENMUDI (1 BLN x 2 ORG)	2.0 OB	3.793.000	7.586.000	
	- PRAMUBAKTI (12 BLN x 5 ORG)	60.0 OB	3.449.000	206.940.000	
	- THR PRAMUBAKTI (1 BLN x 5 ORG)	5.0 OB	3.449.000	17.245.000	
	- Jamuan Tamu (kudapan) (20 ORG x 16 KEG)	320.0 OB	31.000	9.920.000	
	- Air Minum/ Galon	12.0 BLN	200.000	2.400.000	
	- Biaya Fotokopi/ Perijinan	1.0 THN	14.747.000	14.747.000	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.067-Fak - Fak)			16.202.000	RM
	- Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran Lainnya	1.0 THN	16.202.000	16.202.000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.067-Fak - Fak)			60.867.000	RM
	- Biaya Keperluan Sehari-hari perkantoran	1.0 THN	60.867.000	60.867.000	
B	LANGGANAN DAYA DAN JASA			366.050.000	

ATK

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(005)
(01)
(400031)
Rp.5.759.038,000

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022
MAHKAMAH AGUNG
Badan Urusan Administrasi
PENGADILAN NEGERI FAK FAK

Halaman: 2

KODE (1)	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL (2)	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP (6)
		VOLUME (3)	HARGA SATUAN (4)	JUMLAH BIAYA (5)	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran (KPPN.067-Fak - Fak)			219.000.000	RM
	- Langganan Internet	1.0 THN	216.000.000		
	- Lisensi Video Conference	1.0 THN	3.000.000	3.000.000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.067-Fak - Fak)			30.000.000	RM
	- Biaya Pengiriman Surat Dinas				
522111	Belanja Langganan Listrik (KPPN.067-Fak - Fak)	12.0 BLN	2.500.000	30.000.000	
	- Langganan Listrik			108.000.000	RM
522112	Belanja Langganan Telepon (KPPN.067-Fak - Fak)	12.0 BLN	9.000.000	108.000.000	
	- Langganan Telepon			12.000.000	RM
522113	Belanja Langganan Air (KPPN.067-Fak - Fak)	12.0 BLN	1.000.000	12.000.000	
	- Langganan Air/ Tangki Air			12.000.000	RM
522141	Belanja Sewa (KPPN.067-Fak - Fak)	12.0 BLN	1.000.000	12.000.000	
	- Sewa Web Hosting			5.090.000	RM
C	PEMELIHARAAN KANTOR	1.0 THN	5.090.000	5.090.000	
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (KPPN.067-Fak - Fak)			1.084.418.000	
	- Gedung Kantor			905.343.000	RM
	- Pemeliharaan Pagar Gedung Kantor	1943.0 m2	442.400		
	- Halaman Gedung Kantor	1.0 THN	10.000.000	859.583.000	
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya (KPPN.067-Fak - Fak)	3576.0 m2	10.000	35.760.000	
	- Rumah Dinas			56.483.000	RM
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (KPPN.067-Fak - Fak)	747.0 m2	89.000	66.483.000	
	- Kendaraan Roda 4			112.592.000	RM
	- Kendaraan Bermotor Roda 2	3.0 UNIT	15.408.000		
	- PC	4.0 UNIT	1.964.500	46.224.000	
	- Laptop	18.0 UNIT	730.000	7.858.000	
	- Printer	8.0 UNIT	730.000	13.140.000	
	- AC Split	16.0 UNIT	330.000	5.840.000	
	- Pemeliharaan Genset	29.0 UNIT	610.000	11.340.000	
	- Genset	1.0 THN	9.800.000	17.690.000	
D	PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR	1.0 THN	1.000.000	9.800.000	
				1.000.000	
				62.600.000	

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(005)
(01)
(400031)
Rp.5,759,038,000

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

MAHKAMAH AGUNG
Badan Urusan Administrasi
PENGADILAN NEGERI FAK FAK

Halaman: 4

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521111	Belanja Keperluan Perkantoran (KPPN.067-Fak - Fak)			19,400,000	RM
	- Pakaian Dinas CPNS (2 ORG x 1 STEL)	2.0 STEL	600,000	1,200,000	
	- Pakaian Dinas Satpam (4 ORG x 1 STEL)	4.0 STEL	400,000	1,600,000	
	- Pakaian Dinas Pengemudi (2 ORG x 1 STEL)	2.0 STEL	400,000	800,000	
	- Pakaian Dinas Prumuhakti (5 ORG x 1 STEL)	5.0 STEL	400,000	2,000,000	
	- Pakaian Dinas Pegawai Non Hakim (23 ORG x 1 STEL)	23.0 STEL	600,000	13,800,000	
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja (KPPN.067-Fak - Fak)			43,200,000	RM
	- Honor Kuasa Pengguna Anggaran (12 BLN x 1 ORG)	12.0 OB	750,000	9,000,000	
	- Honor Pejabat Pembuat Komitmen (12 BLN x 1 ORG)	12.0 OB	650,000	7,800,000	
	- Honor Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM (12 BLN x 1 ORG)	12.0 OB	650,000	7,800,000	
	- Honor Bendahara Pengeluaran (12 BLN x 1 ORG)	12.0 OB	650,000	7,800,000	
	- Honor Staf Pengelola Keuangan (12 BLN x 2 ORG)	24.0 OB	300,000	7,200,000	
	- Honor Pengelola Penerimaan PNSP (12 BLN x 1 ORG)	12.0 OB	300,000	3,600,000	
F	PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN			8,200,000	RM
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.067-Fak - Fak)			7,480,000	
	- Bahan/Spanduk/Dokumentasi (2 KEG x 1 THN)	2.0 OT	2,500,000	5,000,000	
	- Kudapan (Snack) (2 KEG x 40 ORG)	80.0 OK	31,000	2,480,000	
522191	Belanja Jasa Lainnya (KPPN.067-Fak - Fak)			720,000	RM
	- Jasa Rohaniawan (2 KEG x 1 THN)	2.0 OK	360,000	720,000	
G	RAPAT KOORDINASI INTERNAL			11,040,000	RM
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya (KPPN.067-Fak - Fak)			11,040,000	
	- Snack (20 ORG x 12 KEG)	240.0 OK	31,000	7,440,000	
	- Bahan	12.0 KEG	300,000	3,600,000	
H	KOORDINASI KE PUSAT/ TINGKAT BANDING			172,980,000	RM
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 (KPPN.067-Fak - Fak)			7,200,000	
	- test swab/rapid (2 ORG x 13 KEG)	26.0 OK	200,000	5,200,000	
521111	Belanja Perjalanan Dinas Biaya (KPPN.067-Fak - Fak)			165,780,000	RM
	- Tiket (2 ORG x 1 PP x 9 KEG)	18.0 OK	5,150,000	92,700,000	
	- Penginapan (2 ORG x 3 HR x 9 KEG)	54.0 OH	580,000	31,320,000	
	- Uang Harian (2 ORG x 4 HR x 9 KEG)	72.0 OH	580,000	41,760,000	
I	KONSULTASI KE KPPN/ KANWIL DJPB/ KPKNL			25,200,000	RM
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 (KPPN.067-Fak - Fak)			1,600,000	
	- test swab/rapid (2 ORG x 4 KEG)	8.0 OK	200,000	1,600,000	


KEMEN/LEMB (005)
 UNIT ORG (01)
 UNIT KERJA (400081)
 ALOKASI Rp.5,759,038,000

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022
 MAHKAMAH AGUNG
 Badan Unsur Administrasi
 PENGADILAN NEGERI FAK FAK

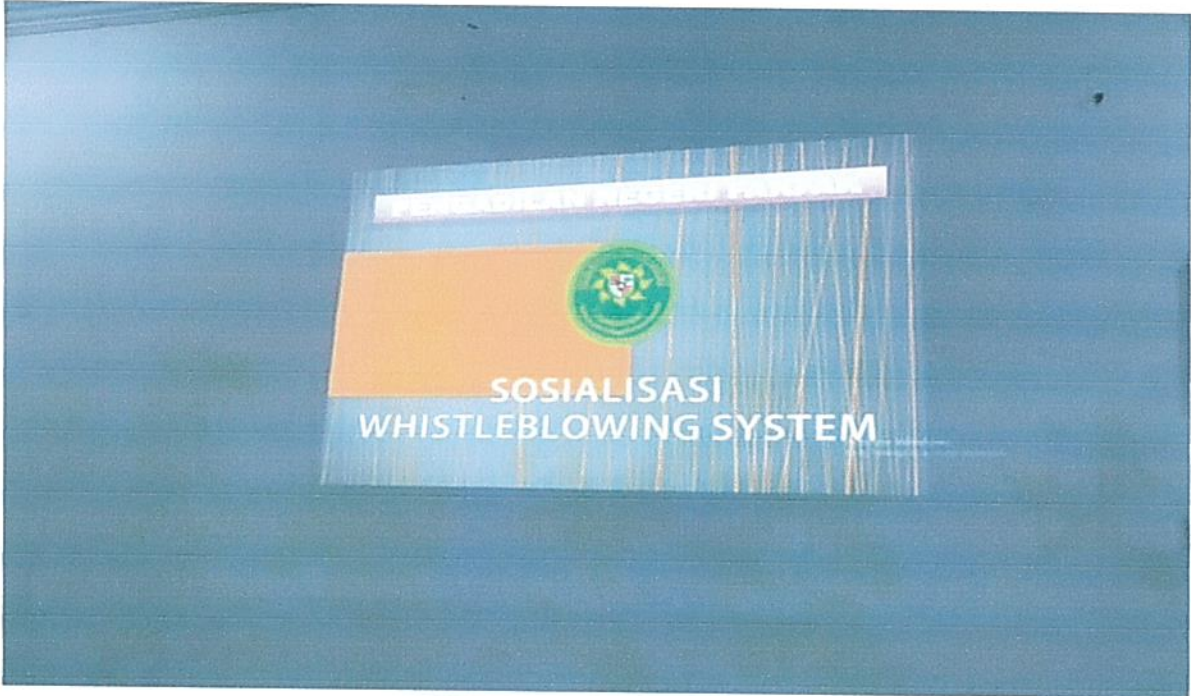
(1)	(2)	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/CP
		VOLUME (3)	HARGA SATUAN (4)	JUMLAH BIAYA (5)	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.067-Fak - Fak) - Tiket [2 ORG x 2 KEG] - Penginapan [2 ORG x 3 HR x 2 KEG] - Transport Ritel [2 ORG x 1 PP x 2 KEG] - Uang Harian [2 ORG x 3 HR x 2 KEG]	4.0 OK 12.0 OH 4.0 OH 12.0 OH	1,600,000 550,000 400,000 550,000	21,200,000 6,400,000 6,600,000 1,600,000	RM
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.067-Fak - Fak) - Transportasi dalam kota [2 ORG x 12 KEG]	24.0 OK	100,000	2,400,000	RM
J	PENANGANAN COVID-19				
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 (KPPN.067-Fak - Fak) - Biaya Penanganan Pandemi Covid Masker/Handsanitiser/Vitamin/termogun	1.0 THN	5,000,000	5,000,000	RM
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 (KPPN.067-Fak - Fak) - Penyemprotan Disinfektan	1.0 KEG	5,000,000	5,000,000	RM
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	2.0 Unit		10,000,000	
1071.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal [Basis Lini] Lokasi : KAB. FAK FAK	2.0 Unit		10,000,000	
1071.EBB.951	Layanan Sarana Internal	2.0 Unit		10,000,000	
052	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi			10,000,000	
A	Pengadaan Alat Pengolah Data			10,000,000	
532111	Belanja Modal Perabotan dan Mesin (KPPN.067-Fak - Fak) - Printer	2.0 Unit	5,000,000	10,000,000	RM

Catatan : 1. U = Komponen Utama
 2. P = Komponen Pemunjang
 3. * = Blokir

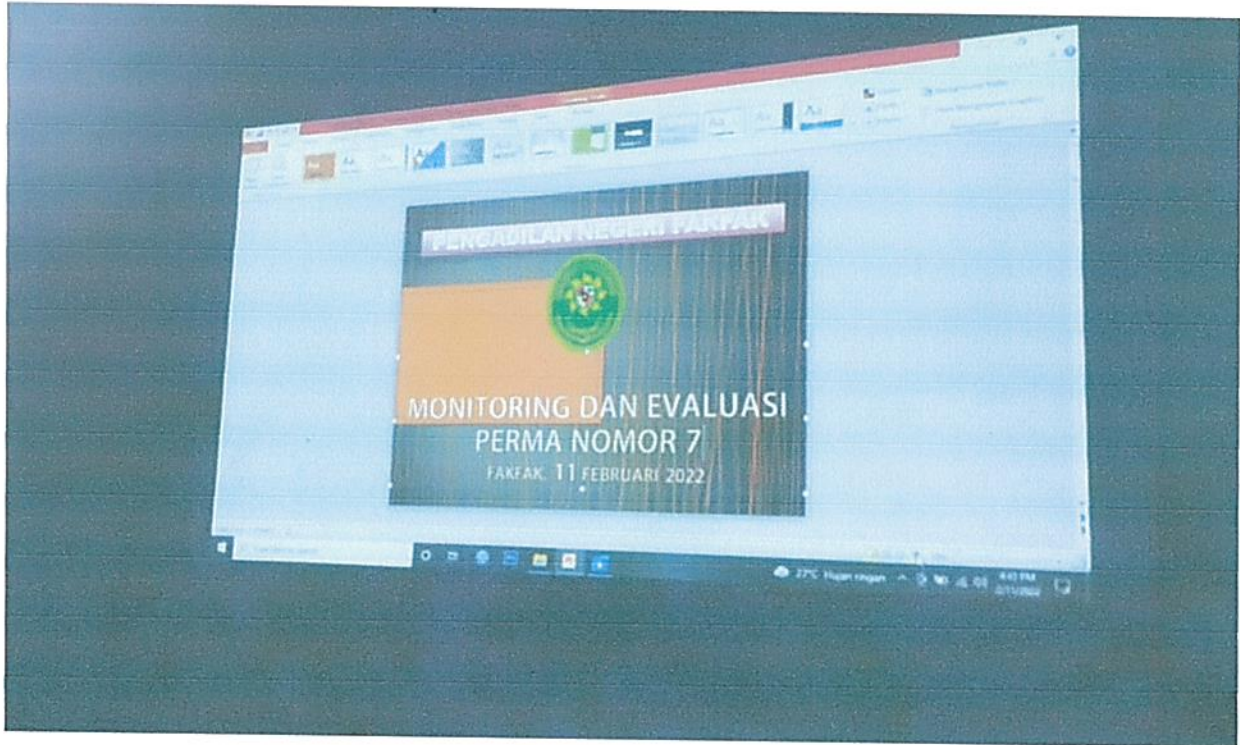
FAKFAK, 28 Oktober 2021


 SUKARMAN, S.Hi
 NIP 196312311991031045

DOKUMENTASI



DOKUMENTASI





DOKUMENTASI KOMITMEN BERSAMA



DOKUMENTASI KOMITMEN BERSAMA



Keterangan : Seluruh Aparatur Pengadilan Negeri Fakfak mengikuti kegiatan apel pagi dan apel sore yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak yang dalam amanatnya menghimbau kepada seluruh aparaturnya agar konsisten dalam melaksanakan pembagunan Zona Integritas dengan tidak menerima suap, hadiah dan uang dari pihak dan melaksanakan tugas sesuai integritas.